

**MANFAAT PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH
TERHADAP MASYARAKAT NELAYAN
DI KAWASAN BANDENGAN KABUPATEN KENDAL**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh:
Mustofa Kamal
L4D000195



**MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA - UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

**MANFAAT PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH
TERHADAP MASYARAKAT NELAYAN
DI KAWASAN BANDENGAN KABUPATEN KENDAL**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

MUSTOFA KAMAL
L4D000195

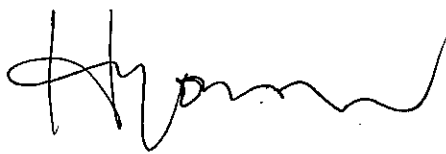
Diajukan Pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 23 Agustus 2005

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 23 Agustus 2005

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama



Ir. Hadi Wahyono, MA



Ir. Nany Yuliasuti, MSP

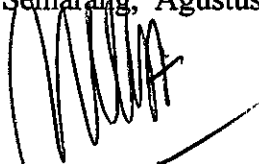
Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, Agustus 2005



MUSTOFA KAMAL
NIM L4D0000195

UPT-MUSTAK-UNSW	
No. Daft:	4.233/T/MPWIS/e,
Tgl.	10/5.06

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala Puji bagi Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul **“Manfaat Penataan Pemukiman Kumuh Terhadap Masyarakat Nelayan Kawasan Bandengan Kabupaten Kendal”** sebagai rangkaian untuk menyelesaikan studi pada Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas segala bantuan, bimbingan dan arahnya dalam rangka penyelesaian Tesis kepada :

1. Prof. Dr.Ir. Sugiono Soetomo, DEA selaku Ketua Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro
2. Ir. Nany Yuliasuti, MSP selaku Mentor dengan penuh ketulusan dan kearifan dalam membimbing penyusunan tesis.
3. Ir.Hadi Wahyono, MA selaku co-Mentor yang dengan penuh ketulusan dan kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penyusunan tesis.
4. Ir. Holi Bina Wijaya, MUM, selaku Penguji 1 yang telah banyak memberikan masukan sehingga penulisan ini lebih terarah.
5. Ir. Parfi Khadiyanto, MSc, selaku Penguji 2 yang telah memberi kemudahan sehingga penulisan ini lebih terarah.
6. Seluruh Dosen yang mengampu mata kuliah pada Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro .
7. Teman-teman angkatan V Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.
8. Istri, anak-anakku dan Keluarga Besar yang telah memberikan dukungannya selama kuliah sampai pembuatan tesis ini selesai..
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian penyusunan tesis.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, penulis terbuka atas saran dan kritik demi perbaikan tulisan ini. Akhirnya, semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, Agustus 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Studi	8
1.3.1 Tujuan	8
1.3.2 Sasaran	8
1.3.3 Manfaat Studi	8
1.4 Pengertian	8
1.5 Ruang Lingkup	10
1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah	10
1.5.2 Ruang Lingkup Materi	11
1.6 Kerangka Pemikiran	13
1.7 Pendekatan Studi	14
1.8 Metode Penelitian	15
1.8.1 Kebutuhan Data dan Teknik Pengumpulan Data	15
1.8.1.1 Survey Instansi dan Literatur (Sekunder)	17
1.8.1.2 Survey Lapangan (Field Observation)	18
1.8.1.3 Survey Wawancara	18
1.8.2 Pengolahan Data	19
1.8.3 Analisis Data	20
1.8.3.1 Analisis Perubahan Tingkat Kekumuhan Sebelum dan Setelah Penataan Lingkungan Permukiman	20
1.8.3.2 Analisis Manfaat Penataan Kawasan Kumuh Menurut Masyarakat	38
1.8.3.3 Analisis Hubungan Antara Perubahan Tingkat Kekumuhan dengan Manfaat yang Diperoleh Masyarakat Bandengan	39
1.9 Sistematika Penulisan	40

BAB II KAJIAN PENATAAN KAWASAN KUMUH

2.1	Permukiman	42
2.1.1	Pengertian Permukiman	42
2.1.2	Permukiman Kumuh	47
2.1.3	Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh	52
2.1.4	Karakteristik dan Tipologi Permukiman Kumuh	53
2.1.4.1	Karakteristik Permukiman Kumuh	54
2.1.4.2	Tipologi Permukiman Kumuh	56
2.1.4.3	Klasifikasi Permukiman Kumuh	60
2.2	Permukiman Nelayan	64
2.3	Peremajaan Perumahan dan Permukiman	69
2.3.1	Jenis-jenis Peremajaan Kota	71
2.3.2	Peremajaan Permukiman Kumuh	73
2.4	Program Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh	74
2.4.1	Penataan Permukiman Kumuh dengan Konsep Tridaya ...	77
2.4.1.1	Maksud Program Tridaya	78
2.4.1.2	Tujuan Program Tridaya	79
2.4.1.3	Sasaran Program Tridaya	79
2.4.1.4	Pengembangan Program Tridaya	80
2.4.2	Rencana Induk Program Tridaya	82
2.5	Tingkat Kekumuhan	83
2.6	Rangkuman Kajian Teori	86

BAB III GAMBARAN UMUM PERMUKIMAN KUMUH NELAYAN BANDENGAN

3.1	Gambaran Umum Makro Kabupaten Kendal	89
3.2	Gambaran Umum Kelurahan Bandengan	90
3.2.1	Kondisi Kependudukan	90
3.2.2	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	91
3.2.3	Mata Pencaharian Penduduk	92
3.2.4	Tingkat Pendidikan Masyarakat	92
3.2.5	Kondisi Sosial Budaya Masyarakat	93
3.2.6	Kondisi Lingkungan Permukiman	94
3.2.7	Kondisi Fasilitas dan Utilitas Lingkungan	95
3.3	Tinjauan Proses Penataan Permukiman Nelayan Bandengan	98

BAB IV ANALISIS PERMUKIMAN KUMUH NELAYAN DI KAWASAN NELAYAN BANDENGAN KABUPATEN KENDAL

4.1	Analisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Nelayan Bandengan Sebelum Penataan	104
4.2	Analisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Nelayan Bandengan Setelah Penataan	111
4.3	Analisis Perubahan Tingkat Kekumuhan Sebelum Penataan dan Setelah Penataan	117
4.4	Analisis Manfaat Penataan Kawasan Kumuh menurut Masyarakat	120
4.4.1	Fisik Lingkungan	121

4.4.2	Ekonomi	123
4.4.3	Sosial Budaya	125
4.5	Analisis Hubungan Antara Perubahan Tingkat Kekumuhan dengan Manfaat yang Diperoleh	128
4.6	Interpretasi terhadap Penataan Permukiman Kumuh	135
4.6.1	Pengembangan Sumber Daya Manusia	136
4.6.2	Lingkungan Perumahan dan Permukiman	136
4.6.3	Ekonomi dan Usaha	137

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	138
5.2	Temuan Studi	140
5.3	Rekomendasi	141

DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	I.1	: Kebutuhan Data	17
Tabel	I.2	: Bobot masing-masing Kelompok Indikator	23
Tabel	I.3	: Bobot masing-masing Indikator	23
Tabel	I.4	: Format Sebaran Hasil Penilaian Seluruh sub-Indikator	24
Tabel	II.1	: Karakteristik Permukiman Nelayan	68
Tabel	II.2	: Variabel Penelitian	87
Tabel	III.1	: Kepadatan Penduduk Kelurahan Bandengan Tahun 2000 – 2002	91
Tabel	III.2	: Penduduk Bandengan Menurut Mata Pencaharian Tahun 2000-2002	92
Tabel	III.3	: Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2000-2001	93
Tabel	III.4	: Penggunaan Lahan di Kelurahan Bandengan Tahun 2002	94
Tabel	III.5	: Kondisi Lingkungan Kelurahan Bandengan Tahun 2001-2002	95
Tabel	III.6	: Kondisi Sarana di Kelurahan Bandengan pada Tahun 2002	96
Tabel	III.7	: Kondisi Prasarana Air Bersih di Kelurahan Bandengan Tahun 2002	97
Tabel	III.8	: Kondisi Jalan di Kelurahan Bandengan tahun 1998-2002	98
Tabel	IV.1	: Nilai masing-masing Indikator Sebelum Penataan	104
Tabel	IV.2	: Hasil Perhitungan Sebelum Penataan	107
Tabel	IV.3	: Nilai masing-masing Indikator Setelah Penataan	112
Tabel	IV.4	: Hasil Perhitungan Sebelum Penataan	114
Tabel	IV.5	: Perbandingan Tingkat Kekumuhan Sebelum dan Sesudah Penataan	118
Tabel	IV.6	: Tipe Rumah Permukiman Kumuh Bandengan	122
Tabel	IV.7	: Manfaat Fisik Lingkungan Menurut Masyarakat	122

Tabel	IV.8	: Tingkat Pendapatan Nelayan Bandengan	124
Tabel	IV.9	: Manfaat Ekonomi Menurut Masyarakat	124
Tabel	IV.10	: Tingkat Pendidikan Nelayan Bandengan	127
Tabel	IV.11	: Manfaat Sosial Budaya Menurut Masyarakat	127
Tabel	IV.12	: Uji Statistik Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Perubahan Tingkat Kekumuhan	130
Tabel	IV.13	: Uji Statistik Hubungan Antara Tingkat Pendapatan Dengan Perubahan Tingkat Kekumuhan	131
Tabel	IV.14	: Uji Statistik Hubungan Antara Manfaat Prasarana Dengan Perubahan Tingkat Kekumuhan	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	: Peta Orientasi Kabupaten Kendal	12
Gambar	1.2	: Kerangka Pemikiran	14
Gambar	1.3	: Diagram Proses Pengumpulan Data	16
Gambar	1.4	: Diagram Proses Analisa	40
Gambar	2.1	: Kerangka Dasar Pembentukan Lingkungan Fisik	46
Gambar	3.1	: Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Kendal Kota	100
Gambar	3.2	: Peta Wilayah Administrasi Kelurahan Bandengan	101
Gambar	3.3	: Peta Tata Lahan	102
Gambar	3.4	: Peta Penataan Permukiman	103
Gambar	4.1	: Permukiman Nelayan Bandengan	109

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	:	Hasil Analisis Korelasi	Lamp. 1
Lampiran	:	Kuesioner	Lamp. 2

ABSTRAK

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah kota tidak selalu membawa dampak yang positif. Perkembangan penduduk yang tinggi mengakibatkan meningkatnya kepadatan penduduk maupun peningkatan kepadatan bangunan untuk permukiman serta terjadinya peningkatan kebutuhan sarana prasarana untuk melakukan aktivitas dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Peningkatan kebutuhan ruang tersebut hampir selalu dibarengi dengan pertumbuhan dan perkembangan permukiman kumuh dan liar di suatu kawasan.

Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kawasan kumuh, yaitu kawasan permukiman nelayan Bandengan yang terletak di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kota Kendal yang tidak luput dari permasalahan kekumuhan. Kalau hal ini dibiarkan tanpa penanganan perbaikan akan memperluas kawasan kumuh yang telah ada. Usaha yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah dengan melalui pelaksanaan program penataan permukiman kumuh yang telah dilaksanakan sejak dulu dengan berbagai pendekatan. Pendekatan tridaya pada prinsipnya menggabungkan program kegiatan yang mencakup tiga fokus yakni masyarakat, fisik lingkungan serta kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat

Salah satu program pemerintah dalam menangani kawasan kumuh adalah menata permukiman kumuh yang secara ideal diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan dan harkat masyarakat berpenghasilan rendah melalui penataan dan perbaikan kualitas yang menyeluruh pada kawasan yang sangat kumuh.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar manfaat penataan permukiman kumuh terhadap masyarakat nelayan Bandengan. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Secara kuantitatif dilakukan dengan menganalisis hubungan antara perubahan tingkat kekumuhan dengan manfaat yang diperoleh dengan menggunakan analisis Crosstab, sedangkan secara kualitatif dilakukan dengan memberikan argumentasi.

*Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan tingkat kekumuhan yang semula **KUMUH BERAT** menjadi **KUMUH SEDANG** selain itu terdapat pengaruh yang kuat antara variabel perubahan tingkat kekumuhan dengan manfaat yang diterima, hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya saling hubungan antar komponen variabel penataan permukiman dengan manfaat yang diperoleh.*

Rekomendasi studi yang dapat dikemukakan adalah perlunya menindak lanjuti studi ini dengan studi yang lebih dalam yang melibatkan seluruh komponen dari program tridaya yang meliputi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan fisik lingkungan dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

Kata Kunci : - Kumuh,
- Penataan dan
- Masyarakat.

ABSTRAK

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah kota tidak selalu membawa dampak yang positif. Perkembangan penduduk yang tinggi mengakibatkan meningkatnya kepadatan penduduk maupun peningkatan kepadatan bangunan untuk permukiman serta terjadinya peningkatan kebutuhan sarana prasarana untuk melakukan aktivitas dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Peningkatan kebutuhan ruang tersebut hampir selalu dibarengi dengan pertumbuhan dan perkembangan permukiman kumuh dan liar di suatu kawasan.

Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kawasan kumuh, yaitu kawasan permukiman nelayan Bandengan yang terletak di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kota Kendal yang tidak luput dari permasalahan kekumuhan. Kalau hal ini dibiarkan tanpa penanganan perbaikan akan memperluas kawasan kumuh yang telah ada. Usaha yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah dengan melalui pelaksanaan program penataan permukiman kumuh yang telah dilaksanakan sejak dulu dengan berbagai pendekatan. Pendekatan tridaya pada prinsipnya menggabungkan program kegiatan yang mencakup tiga fokus yakni masyarakat, fisik lingkungan serta kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat

Salah satu program pemerintah dalam menangani kawasan kumuh adalah menata permukiman kumuh yang secara ideal diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan dan harkat masyarakat berpenghasilan rendah melalui penataan dan perbaikan kualitas yang menyeluruh pada kawasan yang sangat kumuh.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar manfaat penataan permukiman kumuh terhadap masyarakat nelayan Bandengan. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Secara kuantitatif dilakukan dengan menganalisis hubungan antara perubahan tingkat kekumuhan dengan manfaat yang diperoleh dengan menggunakan analisis Crosstab, sedangkan secara kualitatif dilakukan dengan memberikan argumentasi.

*Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan tingkat kekumuhan yang semula **KUMUH BERAT** menjadi **KUMUH SEDANG** selain itu terdapat pengaruh yang kuat antara variabel perubahan tingkat kekumuhan dengan manfaat yang diterima, hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya saling hubungan antar komponen variabel penataan permukiman dengan manfaat yang diperoleh.*

Rekomendasi studi yang dapat dikemukakan adalah perlunya menindak lanjuti studi ini dengan studi yang lebih dalam yang melibatkan seluruh komponen dari program tridaya yang meliputi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan fisik lingkungan dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

Kata Kunci : Manfaat Penataan Permukiman Kumuh

ABSTRACT

Every growth and development in a city doesn't always bring positive effect. Growth rate population causing either the increasing of firmly population or built up area for housing and also the increasing of facilities need to do same activities in order to get the necessary of life. The increasing of space need almost always together with growth and developed slum in a region.

The district of Kendal is one of the district which has slum, it is Bandengan fisher man village in Kelurahan Bandengan of Kendal which has slum problem. These slum problem without any control and repairment it will enlarge the slum that has been existed. The government have any efforts to solve this problem by implemented the arrangement of slum program that have been held a long time ago by many approachment. In principle "Tridaya" approachment combine activity program consist three focus which is society, physical environment and also research activity economic society.

One of the government program for the slum settlement is re-arrangement of slum settlement area, in purpose ideally to increasing the prosperity of people community with low income throughtout the qualities repair and arrangement for the quality in whole slum.

This study has the purpose to recognize the benefits of slum settlement area re-arrangement program for people society of Bandengan fisherman's. This study using the qualitative and quantitative method. Quantitatively method is used by analyzing the co-relation between the slum level change and benefits had taken. This has done with Crosstab analysis. While, qualitatively method done by giving some argumentation.

The conclusion of this study is that the level of the slum grade has changed, from the high level grade into the middle level grade. Beside that, there is a big impact of variable between that the slum level change and benefits taken. It is shown from the co-relation between variable component of the settlement re-arrangement and the benefits taken by the people.

The study recommended the further study which involve whole of people and all component from "tridaya" program that consist society power, physical environment power and economic society power.

Key Word :

- The slum,
- Re-arrangement and
- Society.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Permasalahan permukiman kumuh dan *squatters* merupakan permasalahan manajemen pembangunan wilayah yang kompleks. Kumuh dan *squatters* secara integral merupakan dampak dari berbagai kebijakan pembangunan pada masa sebelumnya. Ketimpangan pembangunan yang menyangkut infrastruktur, akses, investasi dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi pemicu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain.

Kantong-kantong kemiskinan menunjukkan kecenderungan terus berkembang, terutama disebabkan kebijakan pembangunan yang terdesentralisasi di masa lalu yang kurang memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah, yang lebih condong kepada pembangunan ekonomi yang pada umumnya terpusat di daerah perkotaan. Pertumbuhan sektor pertanian yang secara riil menurun sejak tahun 1978, nilai tukar produk-produk pertanian terhadap nilai barang dan jasa semakin menurun, jumlah pemilikan lahan per keluarga semakin menurun menyebabkan sektor pertanian tidak lagi mampu menopang kehidupan masyarakat desa. Banyak diantara keluarga ini kemudian melakukan migrasi ke tempat lain yang dianggapnya lebih baik, mereka tidak memiliki ketrampilan yang memadai untuk hidup di tempat tersebut, akibatnya semakin besar dari mereka menjadi kelompok paling miskin di wilayah itu, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi keluarga terutama kebutuhan papan.

Kelompok miskin banyak mendominasi pada kawasan-kawasan pengembangan ekonomi dan bermukim secara informal, sebagai upaya mendekati sumber mata pencaharian mereka. Berdasarkan administrasi pemerintahan, kedudukan pemukim miskin dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pemukim miskin yang menempati tanah-tanah legal, memiliki status hukum dan tepat peruntukan.
2. Pemukim miskin yang menempati tanah tanpa hak dan atau bukan peruntukannya, kepada mereka ini diberikan sebutan *squatters*, artinya orang yang menumpang/menduduki tanpa ijin. Kondisi lahan yang mereka tinggali memiliki resiko membahayakan diri dan lingkungan serta mengganggu aktivitas umum.

Jumlah masyarakat yang menghuni permukiman kumuh ini terus berkembang akibat migrasi penduduk antar kota yang umumnya didominasi oleh penduduk miskin tanpa ketrampilan. Laju pertumbuhan populasi migran ini cukup tinggi, mencapai 3,5-5 %, terutama pada masa krisis ekonomi.

Pertambahan jumlah penduduk informal berlangsung dengan pesat dan semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun hal ini tidak diimbangi dengan penyediaan perumahan yang memadai. Akibat belum tersedianya lahan siap bangun yang telah direncanakan, maka seringkali masyarakat membangun sendiri rumahnya pada lahan yang belum direncanakan dengan baik. Hal ini menjadi bibit timbulnya lingkungan permukiman yang tidak teratur dan tidak adanya kelengkapan komponen prasarana sarana yang memadai sesuai ketentuan teknis syarat-syarat kesehatan. Kondisi ini diperburuk oleh tingginya harga lahan bagi perubahan akibat kompetisi dengan peruntukan lainnya yang memiliki nilai ekonomi yang lebih kompetitif, hal

ini menyebabkan timbulnya perumahan dengan konsentrasi tinggi di wilayah-wilayah yang tidak direncanakan.

Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah pada umumnya tidak mampu memperoleh hunian yang layak, terpaksa membangun gubug-gubug liar di atas lahan kosong yang tidak diawasi oleh pemiliknya, kelompok ini disebut *squatters*. Tempat-tempat yang umumnya dihuni *squatters* adalah tempat-tempat yang dekat dengan sumber mata pencaharian mereka. Proses ini berlangsung terus dan menyebabkan semakin bertambah luasnya lingkungan permukiman kumuh dan *squatters*. Lingkungan kumuh tidak hanya memberikan visual yang buruk, tetapi juga memberikan kontribusi yang tidak baik bagi perkembangan fisik kota secara umum, menimbulkan permasalahan fisik maupun non fisik, bagi lingkungan kawasan itu sendiri maupun ke kawasan sekitarnya.

Permasalahan yang umum disandang oleh masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh adalah :

1. Permasalahan ekonomi yang menyangkut rendahnya pendapatan dan akses, rendahnya kesempatan kerja, rendahnya akses pada fasilitas kredit pada lembaga keuangan formal.
2. Permasalahan fisik dan lingkungan yang menyangkut hunian yang tidak layak, tidak tersedianya infrastruktur primer, sanitasi yang buruk, langganan banjir dan pencemaran lingkungan.
3. Permasalahan sosial yang menyangkut keterbatasan dalam memperoleh pelayanan umum dan pemenuhan utilitas.

Melihat kompleksitas permasalahan perumahan dan permukiman kumuh yang telah diuraikan di atas, maka perlu diadakan penanganan secara komprehensif

dan berkesinambungan. Sebagai langkah awal adalah perlunya identifikasi kawasan-kawasan yang diindikasikan kumuh dan kawasan yang kemungkinan akan berkembang menjadi kawasan kumuh.

Salah satu permukiman kumuh yang ada di Jawa Tengah yang perlu diidentifikasi dan memiliki indikasi kearah kekumuhan adalah Kawasan Kumuh Bandengan Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal yang merupakan sebuah kelurahan yang memiliki produktivitas tinggi akan hasil-hasil perikanan. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani (petani sawah dan petani tambak). Dengan keadaan sosial ekonomi yang demikian ini Kelurahan Bandengan dapat dikategorikan sebagai kelurahan nelayan yang produktivitas tangkapan ikannya dikategorikan tinggi.

Sebagaimana kelurahan nelayan lainnya, dan akibat dari karakteristik kehidupan nelayan yang sepanjang hari hidup di laut, kondisi permukiman mereka kurang terurus dan sangat memprihatikan. Sarana dan prasarana yang tersedia di permukiman nelayan sangat minim dan walaupun tersedia kondisinya tidak mencukupi kebutuhan karena-ketersediaannya tidak sebanding dengan kebutuhannya.

Akibat dari kualitas lingkungan permukiman mereka sangat rendah dan dampak yang ditimbulkan atas kondisi yang demikian adalah rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, yang ditandai oleh:

- a. banyaknya angka kematian bayi,
- b. rendahnya angka umur harapan hidup,
- c. banyaknya penderita penyakit sebagai tanda rendahnya kualitas lingkungan seperti penyakit kulit, diare dan muntaber.

Akibat dari kondisi demikian, produktivitas penduduk yang ditandai dengan

pendapatan perkapita mereka yang cukup tinggi banyak terserap untuk membiayai usaha-usaha produktif dan kuratif di bidang kesehatan. Karena banyaknya pengeluaran yang terserap untuk membiayai upaya-upaya penanggulangan beberapa penyakit yang dideritanya, maka kemampuan dan kemauannya dalam penyediaan sarana dan prasarana permukiman menjadi menurun.

Diindikasinya Kawasan Bandengan kearah kekumuhan maka pemerintah mulai menata kawasan kumuh Bandengan dengan menyediakan satu persatu sarana prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat Bandengan meskipun tidak seluruh kebutuhan dapat dipenuhi.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kendal lewat program penataan permukiman nelayan yang didanai dari Anggaran dan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2001 dan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2001, tentang pembiayaan Proyek Penataan Permukiman Nelayan Bandengan Kota Kendal telah membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan kelurahan Bandengan, seperti fasilitas air bersih, jalan lingkungan, drainase, perbaikan dan pembangunan rumah, tambatan perahu/kapal, pasar desa, pengerukan muara sungai, tempat pelelangan ikan serta fasilitas dan utilitas lain yang mereka butuhkan berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang dilakukan.

Dipilihnya kawasan ini sebagai wilayah studi dikarenakan kawasan Bandengan memiliki potensi ekonomi dan produktivitas masyarakatnya yang cukup tinggi didukung penyediaan sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah, mampukah masyarakat bandengan keluar dari kekumuhan, hal inilah yang menarik untuk diamati dan diharapkan dari penelitian ini mendapatkan temuan-temuan baru

yang berguna untuk penanganan kawasan kumuh masa mendatang.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan Bandengan Kendal adalah tingkat kesehatan masyarakat yang rendah. Permasalahan struktural ini muncul karena kualitas lingkungan permukiman nelayan yang rendah, akibat dari sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang tersedia kurang memadai. Karena tingkat kesehatan mereka yang rendah, keadaan sosial ekonomi mereka terganggu, yang pada gilirannya kemampuan mereka dalam penyediaan sarana dan prasarana permukiman menjadi turun.

Permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi di Kawasan Kumuh Bandengan antara lain :

- Kurangnya sarana prasarana seperti air bersih, jaringan jalan dan drainase,
- Kurangnya fasilitas penunjang perekonomian seperti tempat pelelangan ikan dan tambatan perahu,
- Rumah-rumah yang masih menempati bantaran sungai, dengan kondisi yang tidak layak huni,
- Banyaknya pendatang yang masuk kawasan ini secara ilegal menyebabkan beban sarana prasarana yang ada di kawasan ini menjadi berat.

Permasalahan struktural seperti disebutkan di atas merupakan permasalahan klasik yang bersifat "*Vicious Circle*" dan diupayakan untuk memutus lingkaran permasalahan yang tak berujung pangkal ini. Program strategis yang sekiranya dapat memutuskan permasalahan yang tidak berujung pangkal ini, adalah program penataan permukiman nelayan yang dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan

sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan kelurahan Bandengan.

Dengan di indikasikan adanya permasalahan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal berupaya menata Kawasan Bandengan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Penataan tersebut berupa pemindahan lokasi permukiman dari bantaran sungai ke daratan yang berjarak kurang lebih 10 meter dari tempat semula, sehingga diharapkan tidak akan merubah pola kehidupan masyarakat yang ada di sana. Dalam penataan kawasan ini Pemerintah Daerah Kendal hanya menyediakan lahan untuk permukimannya, sedangkan pembangunan rumah dan pemenuhan sarana prasarana dibantu oleh beberapa instansi baik di tingkat propinsi maupun pusat dan masyarakat yang akan menempati.

Setelah adanya program relokasi dari pemerintah, permukiman nelayan Bandengan mulai menunjukkan dampak positif terhadap kawasan tersebut yang tadinya secara fisik kumuh menjadi lebih tertata, namun perilaku masyarakat yang menempati kawasan relokasi tersebut masih terbawa dengan perilaku waktu masih di pinggiran sungai.

Dari fenomena di atas dan kondisi serta permasalahan yang berkaitan dengan kekumuhan lingkungan permukiman Bandengan, maka yang menjadi pertanyaan (*research question*) dari penelitian ini adalah: " Bermanfaatkah penataan permukiman kumuh terhadap masyarakat nelayan di kawasan Bandengan Kabupaten Kendal ?". Untuk menjawab pertanyaan ini tentunya membutuhkan penelitian yang lebih dalam tentang kekumuhan suatu tempat dengan melakukan studi penataan permukiman kumuh yang ada di permukiman nelayan Bandengan.

1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Studi

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penyusunan studi ini adalah untuk mengkaji manfaat penataan permukiman kumuh melalui pembangunan sarana prasarana di kawasan nelayan Bandengan Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal.

1.3.2 Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang dilakukan adalah :

Mengkaji perubahan tingkat kekumuhan sebelum dan setelah penataan permukiman nelayan Bandengan

1. Mengkaji manfaat perbaikan permukiman kumuh nelayan Bandengan
2. Mengkaji hubungan antara perubahan tingkat kekumuhan dengan manfaat yang di peroleh.

1.3.3 Manfaat Studi

Manfaat Studi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi pelaku-pelaku pembangunan perumahan dan permukiman dalam rangka menata suatu kawasan kumuh menjadi kawasan yang lebih manusiawi untuk ditempati.

1.4 Pengertian

Dalam rangka pelaksanaan studi manfaat penataan permukiman nelayan Bandengan Kota Kendal sebaiknya perlu diketahui beberapa pengertian atau definisi operasional yang berkaitan dengan permukiman kumuh sebagai berikut:

a. Kampung

Merupakan lingkungan permukiman tempat tinggal (*residential area*) baik di perkotaan, perdesaan maupun nelayan.

b. Permukiman kumuh

Permukiman tidak layak huni atau dapat membahayakan kehidupan penghuni, karena keadaan, keamanan, dan kesehatan memprihatinkan, kenyamanan dan keandalan bangunan di lingkungan tersebut tidak memadai, baik dilihat dari segi tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi, kualitas bangunan yang sangat rendah serta prasarana dan sarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat (UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman).

c. Penataan Permukiman

Salah satu upaya atau pendekatan perencanaan di dalam suatu proses perencanaan kawasan yang diterapkan untuk menata kembali suatu kawasan tertentu di dalam kota dan merupakan kegiatan tanpa perombakan yang mendasar, bersifat parsial dan memerlukan peran serta masyarakat yang bersifat mendasar.

d. Penataan Kembali Lingkungan Permukiman Kumuh

Diartikan sebagai perbaikan fisik lingkungan agar masyarakat yang tadinya tinggal di lingkungan permukiman kumuh menikmati pelayanan lingkungan yang setara dengan mereka yang tinggal di lingkungan yang lebih baik, serta perbaikan sistem sosial yang mampu mengantarkan mereka ke jenjang sosial yang lebih tinggi (Inpres Nomor 5 Tahun 1990 sebagai acuan/pola dasar penataan kembali lingkungan permukiman kumuh).

e. Permukiman Kumuh Nelayan

Permukiman kumuh nelayan yaitu permukiman yang terletak di luar area antara

garis pasang tertinggi dan terendah. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah nelayan dan atau yang terkait dengan nelayan.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup studi ini akan dibagi lagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup wilayah studi dan ruang lingkup materi studi.

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kajian wilayah penelitian secara umum berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Kendal, namun secara spesifik berada dalam kawasan permukiman nelayan Bandengan yang terletak di wilayah administrasi Kelurahan Bandengan Kecamatan Kota Kendal. Kelurahan Bandengan memiliki luas wilayah sebesar 1,97 Km² dengan jumlah penduduk 3.975 jiwa dan kepadatan penduduk 50 jiwa/Ha.

Kelurahan Bandengan merupakan suatu kawasan permukiman yang kondisinya kumuh dan telah mengalami penurunan kualitas lingkungan fisik. Kerapatan bangunan cukup tinggi, gang-gang sangat sempit, dan pelayanan air bersih yang minim. Selain itu, kondisi kekumuhan juga dipengaruhi oleh buruknya saluran drainase dan sanitasi serta terjadinya pendangkalan sungai kendal akibat sampah yang memenuhi badan sungai.

Kawasan Bandengan ini mempunyai tipologi permukiman kumuh nelayan, permukiman kumuh dekat pusat kegiatan sosial ekonomi, permukiman kumuh pinggir kota, permukiman kumuh daerah pasang surut serta permukiman kumuh tepi sungai, namun yang paling menonjol tipologi kawasan ini adalah permukiman kumuh nelayan dengan sifat yang kekumuhan homogin. Ke-homogin-an ini terlihat dari mata-pencaharian mereka sebagian besar adalah nelayan atau yang berkaitan dengan

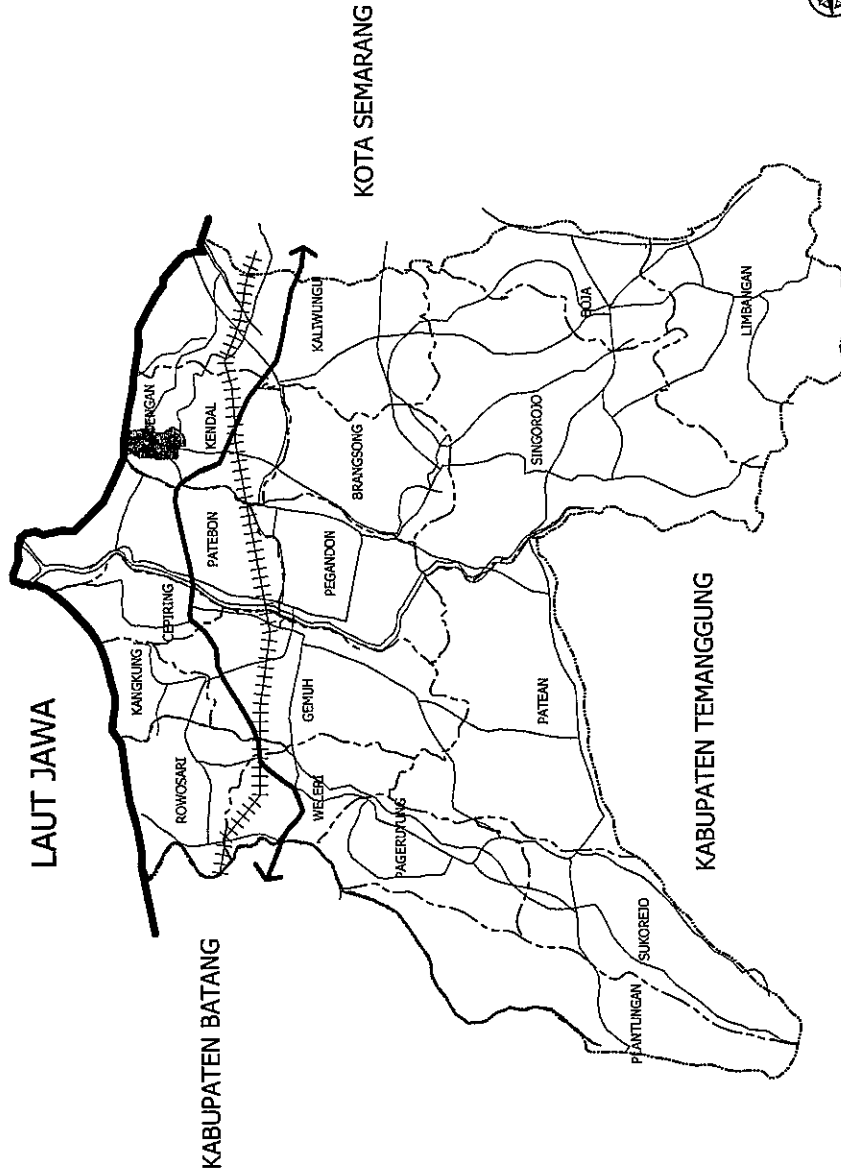
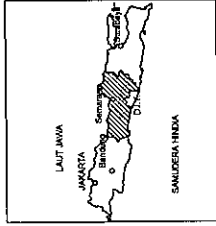
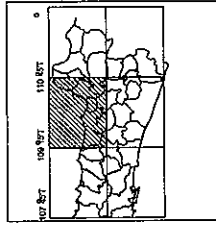
nelayan.

Penelitian tingkat kekumuhan lebih dititik beratkan pada cakupan wilayah seluruh kelurahan Bandengan, sedangkan pendapat masyarakat lebih diarahkan pada masyarakat yang telah menerima manfaat penataan ini meliputi RW I dan RW II.

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Dalam pelaksanaan studi ini, materi yang akan dibahas mencakup pada penyebab kekumuhan permukiman yang akan diidentifikasi sebagai faktor penyebab yang menjadikan kawasan tersebut mengalami penurunan kualitas lingkungan dan menjadikan kawasan tersebut mengalami kekumuhan. Setelah diidentifikasi penyebab kekumuhan, kemudian ditentukan tingkat kekumuhan suatu kawasan termasuk dalam kriteria sangat kumuh, kumuh berat, kumuh sedang, kumuh ringan dan tidak kumuh.

**GAMBAR 1.1
PETA ORIENTASI KABUPATEN
KENDAL**



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

MANFAAT PENYATAAN PERMUKIDAN KUMUH TERHADAP
MASYARAKAT NELAYAN DI KAWASAN BAHENDANG

**PETA ORIENTASI
KABUPATEN KENDAL**

LEGENDA

- BATAS KECAMATAN
- - - BATAS KABUPATEN
- ~ ~ ~ SUNGAI
- JALAN
- ##### JALAN KERETA API
- JALAN PANTURA

HALAMAN

12



1.6 Kerangka Pemikiran

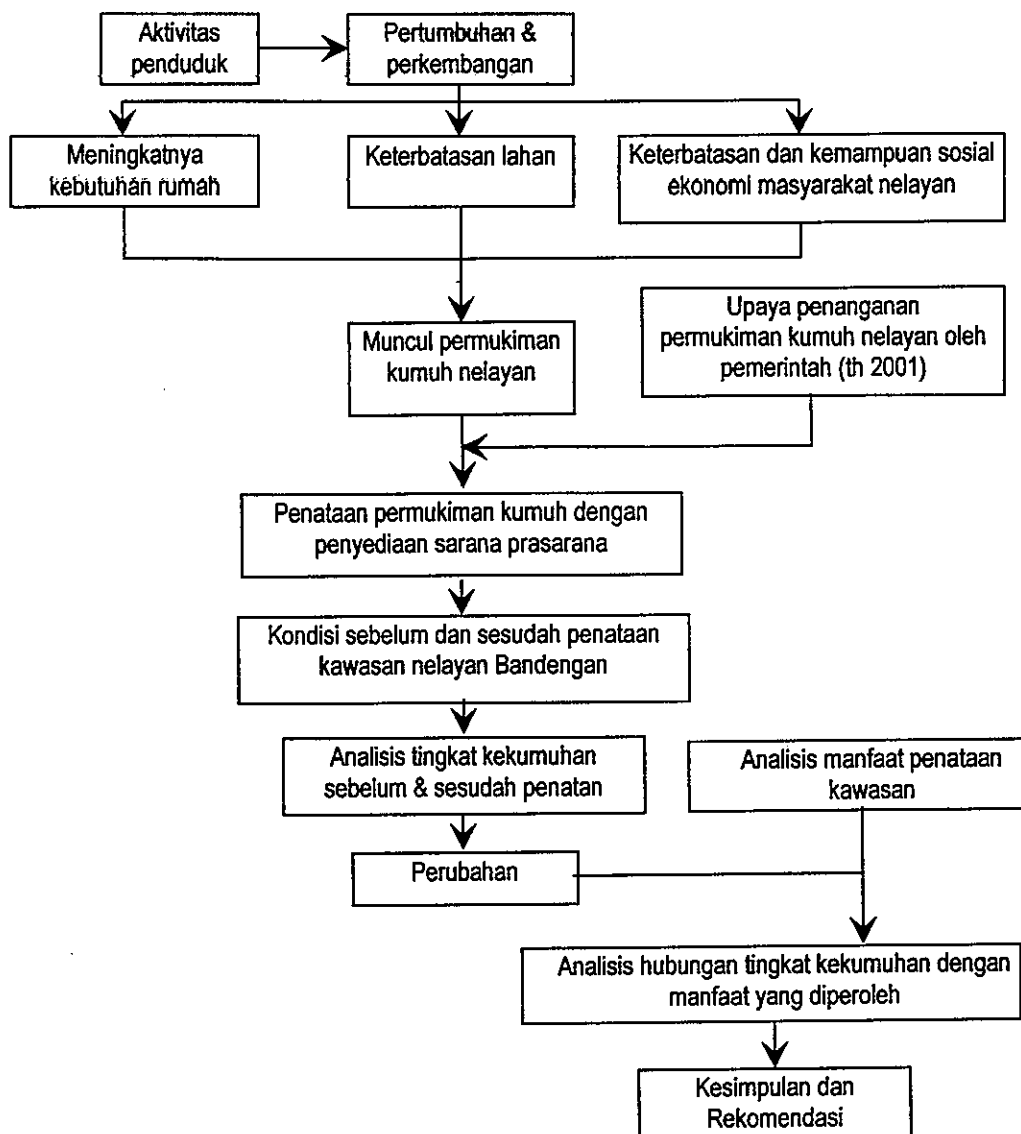
Pertumbuhan dan perkembangan suatu kawasan sangat dipengaruhi oleh migrasi antar wilayah serta dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan alami suatu kawasan. Terjadinya migrasi disebabkan oleh faktor-faktor yang menarik (*pull factor*) dari suatu kawasan, seperti lapangan kerja lebih luas dan bervariasi, penghasilan yang lebih menjanjikan, serta pertumbuhan dan perkembangan aktivitas kawasan tersebut.

Disisi lain meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan lahan di kawasan tersebut menjadi terbatas dan langka, karena masing-masing individu membutuhkan sandang, pangan dan papan juga meningkat. Disamping hal tersebut adanya keterbatasan dan kemampuan sosial ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, menyebabkan mereka tidak dapat menempati rumah layak huni. Karena hal-hal tersebut kemudian muncul permukiman-permukiman kumuh dan liar.

Dengan munculnya permukiman kumuh nelayan, pemerintah daerah berusaha untuk bisa meminimalkan kekumuhan tersebut dengan memberikan bantuan sarana prasarana penunjang aktivitas masyarakat melalui proyek-proyek yang didanai oleh Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara. Dengan pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah diharapkan tingkat kekumuhan di kawasan tersebut dapat diminimalkan.

Hasil akhir dari studi ini dapat menjadi masukan dalam hal penanganan dalam upaya pengembangan kawasan tersebut yaitu meningkatkan/mengembangkan potensi yang mereka miliki dan meminimalkan kendala yang ada.

Dari uraian tersebut di atas apabila disajikan dalam bentuk bagan kerangka pemikiran yang lebih sistematis, dapat dilihat pada Gambar 1.2. di bawah ini :



Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran

1.7 Pendekatan Studi

Dalam pendekatan studi ini diuraikan beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan penelitian, sebelum terjun di lapangan untuk melakukan survei pengumpulan data.

Studi yang akan dilaksanakan ini terdiri atas beberapa tahapan yang berurutan

dan berkaitan satu dengan yang lain. Secara garis besar tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam studi ini adalah:

1. Melakukan penelitian kepustakaan atau penelusuran literatur, terutama yang menyangkut dengan metoda penelitian, kajian teori-teori seperti teori permukiman kumuh, dan teori penataan lingkungan kumuh
2. Penyiapan administrasi perijinan penelitian pada instansi setempat dan peralatan yang digunakan dalam survey di lapangan
3. Penyiapan lembar kuesioner baik untuk pengumpulan data primer maupun data sekunder
4. Penyiapan alat analisis
5. Pengolahan data yang diperoleh dari hasil survey.
6. Melakukan analisis dari data yang telah dikumpulkan melalui pendekatan dan metoda penelitian yang digunakan
7. Menyusun naskah penelitian

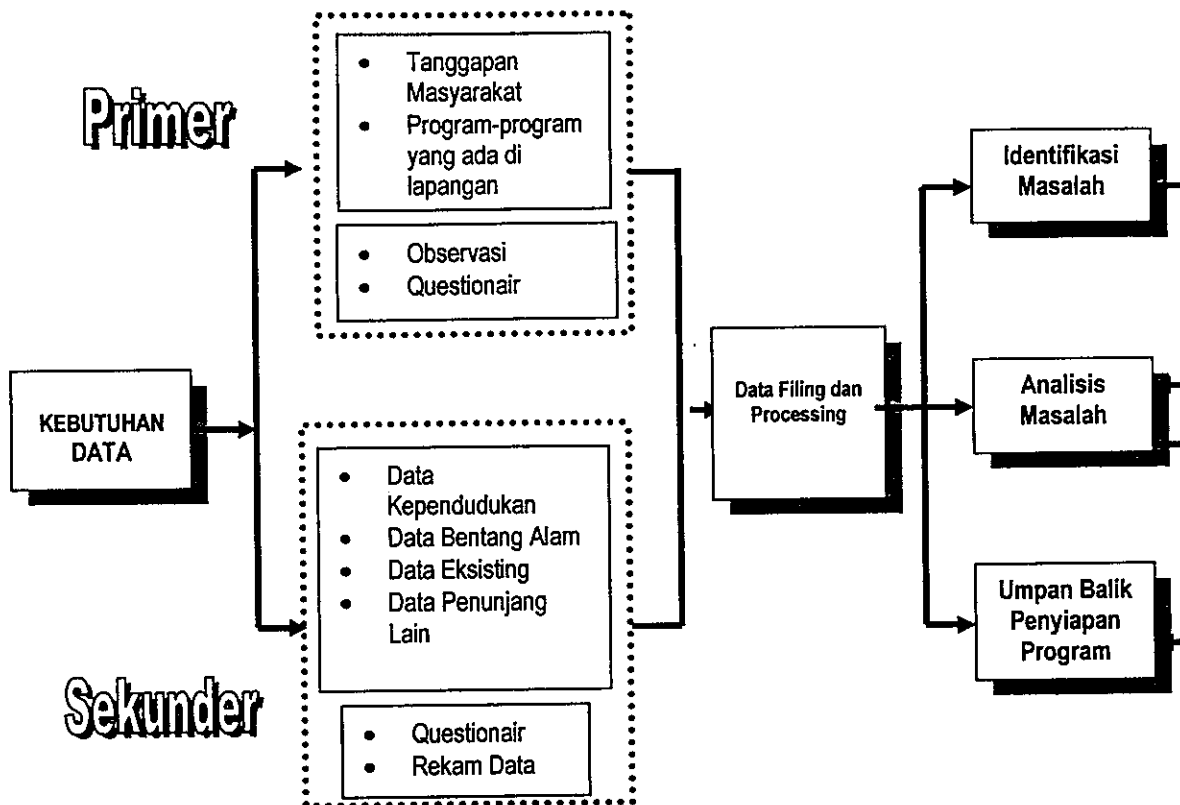
1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Kebutuhan Data dan Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data pada prinsipnya untuk mendapatkan suatu gambaran tentang kondisi lingkungan perumahan dan permukiman. Secara khusus, tahapan ini berupaya untuk menggali berbagai permasalahan yang dihadapi di setiap kawasan permukiman kumuh yang terdapat di wilayah studi. Tahap pengumpulan data ini harus direncanakan sebaik-baiknya, sehingga tercapai hasil yang optimal sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran pada proses-proses selanjutnya.

Proses pengumpulan data akan dilakukan dalam dua jenis, yaitu pengumpulan

tanggapan masyarakat secara langsung (primer), dan pengumpulan data melalui buku laporan statistik (sekunder). Tahapan prosesnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.3
Diagram Proses Pengumpulan Data

Adapun variabel untuk menghasilkan analisis tingkat manfaat penataan kawasan kumuh dan analisis tingkat kekumuhan dalam studi ini, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Kebutuhan Data

NO	VARIABEL	KEBUTUHAN DATA	SUMBER DATA	JENIS DATA
1	Tingkat kekumuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Legalitas Tanah • Status Penguasaan bangunan • Frekuensi kebakaran • Frekuensi banjir • Tingkat kepadatan penduduk • Rata-rata anggota Keluarga • Jumlah KK per rumah • Tingkat penambahan penduduk • Angka kematian kasar • Status gizi balita • Angka kesakitan malaria, diare, demam berdarah, & ISPA 	<ul style="list-style-type: none"> • BPN, Bappeda • Kelurahan • Kelurahan • Kelurahan • Kelurahan • Kelurahan • Kelurahan • Kelurahan • Kelurahan • Kelurahan • Kelurahan • Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Sekunder Primer Primer Primer Primer Primer Primer Primer Primer Primer Primer
2	Manfaat Penataan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendapatan • Pendidikan • Keamanan • Tingkat Kesehatan dan kenyamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan • Kelurahan • Kelurahan • Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Primer Primer Primer Primer
3	Komparasi tingkat kekumuhan dengan manfaat penataan	<ul style="list-style-type: none"> • Komparasi no. 1 dan 2, 	<ul style="list-style-type: none"> • Komparasi 	<ul style="list-style-type: none"> Primer

Sumber : Penyusun, 2005

Kegiatan survey atau pengumpulan data, secara umum meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu primer dan sekunder. Berikut ini beberapa teknik dan metode pengumpulan data, sebagai berikut :

1.8.1.1 Survey Instansi dan Literatur (Sekunder)

Survey instansional adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui survey sekunder pada instansi-instansi terkait. Tujuan penggunaan metode pengumpulan data ini adalah untuk mendapatkan data-data peraturan, pedoman pelaksanaan dan aturan-aturan standar yang telah dikeluarkan oleh instansi-instansi yang terkait dengan ruang lingkup studi.

Disamping pada instansi yang terkait, survey pengumpulan data sekunder juga dilakukan pada berbagai perpustakaan umum dan perguruan tinggi, yang diperkirakan

mempunyai buku-buku pegangan (*textbooks*) untuk ruang lingkup penelitian ini. Termasuk disini adalah berbagai kepustakaan tentang hasil penelitian. Survei instansional ini dilakukan di beberapa tempat baik di lingkungan Pemda Kabupaten Kendal, serta di lingkungan perguruan tinggi.

1.8.1.2 Survey Lapangan (*Field Observation*)

Survey lapangan adalah pengamatan keadaan lapangan secara visual. Adapun tujuan dari survey lapangan ini adalah untuk mengamati kondisi yang terdapat di lapangan, untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang sebenarnya terdapat di lapangan. Di dalam kegiatan pengamatan di lapangan ini, metode yang digunakan adalah pengamatan terkendali (*controlled obersevation*), yaitu metode pengamatan dimana posisi pengamat hanya terbatas pada pengamatan dari kondisi yang ada, tetapi tidak secara langsung terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang diamatinya. Obyek lapangan yang akan dikunjungi adalah lingkungan permukiman nelayan Bandengan yang mempunyai potensi permasalahan perumahan.

1.8.1.3 Survey Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai permasalahan yang dihadapi di dalam proses penataan lingkungan permukiman kumuh, melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*). Pada dasarnya, tujuan dari pengumpulan data melalui wawancara ini adalah untuk menunjang metode survey lapangan.

Adapun target-target pihak-pihak yang akan diwawancarai meliputi semua pihak yang terkait dengan permasalahan permukiman kumuh. Sebelum melakukan kegiatan survey perlu adanya persiapan-persiapan, yang meliputi persiapan-persiapan

sebagai berikut :

- Penyusunan daftar kebutuhan data yang diperlukan, yang ditujukan baik kepada instansi maupun lembaga serta narasumber yang lain.
- Inventarisasi data yang sudah ada, berupa data sekunder, berupa pedoman dan arahan kegiatan serta standar-standar, hasil studi dan penelitian yang pernah dilakukan. Inventarisasi data ini sangat perlu untuk menyusun strategi pengumpulan data yang dapat digunakan pada proses-proses penataan lingkungan, khususnya lingkungan nelayan.
- Pembuatan kerangka dasar, yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan survey, analisis dan rencana serta penyajian dalam laporan.

Selanjutnya, setelah semua peralatan yang dibutuhkan tersedia, lalu dilakukan pelaksanaan survey di lapangan. Hasil pengumpulan data ini kemudian diolah kedalam formulasi penyajian data, sehingga menjadi masukan untuk proses analisis. Produk penyajian data ini merupakan proses seleksi data yang disajikan dalam bentuk tabulasi, diagram, diskripsi dan peta yang disusun secara sistematis sehingga mudah dibaca, dimengerti dan siap untuk dianalisis.

1.8.2 Pengolahan Data

Analisis adalah kegiatan atau proses untuk mengidentifikasi karakteristik suatu hal tertentu. Dalam hubungannya dengan kegiatan tersebut, kita mengenal ada beberapa macam analisis yang dapat dilakukan, yaitu :

a. Berdasarkan cara penarikan kesimpulan/hasil:

Analisis yang dipergunakan adalah analisis deduktif yaitu analisis yang lebih banyak mengungkapkan fakta/informasi yang terjadi. Hal yang perlu kita lakukan adalah

menarik kesimpulan dengan cara mengaitkan adanya sekumpulan fakta tersebut .

b. Berdasarkan jenis datanya:

1. Analisis Kuantitatif

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu data-data yang dapat diukur dengan jelas, biasanya berupa angka-angka, grafik, tabel dan data-data statistik lainnya.

2. Analisis Kualitatif

Analisis ini menggunakan data-data yang tidak secara langsung dapat diukur besarnya, dengan kata lain tidak menggunakan data-data statistik untuk menyatakan hasil akhir. Biasanya dikenal ada beberapa teknik analisis, yaitu:

• **Analisis Komparatif**

Analisis ini biasanya digunakan untuk membandingkan dua fenomena yang berbeda. Hasil akhir analisis ini ditentukan melalui tingkat perbandingan yang dilakukan.

• **Analisis Deskriptif**

Analisis ini adalah menggambarkan kondisi/keadaan yang berkembang di masyarakat. Pada umumnya metode ini merupakan uraian-uraian /narasi yang harus bisa merepresentasikan keadaan yang sebenarnya tanpa dikurangi atau ditambah.

1.8.3 Analisis Data

1.8.3.1 Analisis Perubahan Tingkat Kekumuhan Sebelum dan Setelah Penataan Lingkungan Permukiman

Tingkat kekumuhan suatu lingkungan permukiman dapat diukur dari beberapa derajat kekumuhan yang signifikan dan sangat berpengaruh terhadap terjadinya kekumuhan suatu lingkungan permukiman.

Sebagai panduan, kriteria dibawah ini dapat digunakan sebagai dasar penentuan tingkat kekumuhan, atau dapat juga dilakukan penyesuaian terhadap kondisi masing-masing. Kriteria-kriteria tersebut (Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman, 2002) antara lain:

a. Kriteria berdasarkan lokasi:

- Status legalitas tanah
- Status penguasaan bangunan
- Frekuensi bencana

b. Kriteria berdasarkan kependudukan

- Tingkat kepadatan penduduk
- Jumlah anggota keluarga dalam 1 KK
- Jumlah KK per rumah
- Tingkat pertumbuhan penduduk
- Angka kematian kasar
- Status gizi balita
- Angka Kesakitan

c. Kriteria berdasarkan kondisi bangunan

- Kualitas bangunan
- Kepadatan bangunan
- Kelayakan bangunan
- Penggunaan luas lantai bangunan

d. Kriteria berdasarkan kondisi sarana dan prasarana dasar

- Tingkat pelayanan air bersih
- Kondisi sanitasi lingkungan
- Kondisi persampahan
- Kondisi saluran air hujan
- Kondisi jalan
- Ruang terbuka

e. Kriteria berdasarkan kondisi sosial ekonomi

- Tingkat kemiskinan
- Tingkat pendapatan
- Tingkat pendidikan
- Tingkat kerawanan keamanan.

Selanjutnya dari berbagai kriteria diatas selanjutnya dilakukan penilaian dan pembobotan agar didapatkan urutan tingkat kekumuhan dari masing-masing lingkungan permukiman, seperti diterang sebagai berikut ;

1. Penilaian

Penilaian adalah angka yang diberikan kepada setiap indikator yang besarnya menunjukkan derajat atau tingkat kekumuhan suatu lingkungan permukiman berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun dalam memberikan nilai, preferensi individu atau kelompok masyarakat sangat berpengaruh, namun kriteria dasar penilaian adalah hal yang diupayakan bersifat umum dan obyektif.

2. Pemberian Bobot

a. Bobot kelompok indikator

Bobot kelompok indikator adalah besaran yang diberikan pada masing-masing

indikator untuk menunjukkan seberapa signifikan aspek indikator tersebut dalam menentukan tingkat atau derajat kekumuhan suatu lingkungan permukiman. Seringkali dalam pemberian bobot ini tergantung kepada preferensi seseorang atau kelompok masyarakat dalam memandang kondisi riil di lapangan yang berhubungan dengan tingkat kekumuhan yang ada, tergantung juga pada karakter khas masing-masing tipologi lingkungan permukiman.

Tabel I.2 memperlihatkan merupakan tabel pemberian bobot yang ditentukan berdasarkan skala prioritas.

Tabel I.2
Bobot Masing-Masing Kelompok Indikator

No	INDIKATOR	Bobot (%)
1	Lokasi	20
2	Kependudukan	15
3	Kondisi Bangunan	25
4	Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar	30
5	Kondisi Sosial Ekonomi	10
Total		100

Sumber : Ditjen Perumahan dan Permukiman, 2002

b. Bobot Masing-Masing Indikator

Pemberian bobot juga diberikan kepada masing-masing indikator di setiap kelompok sub-indikator. Penentuan bobot masing-masing indikator juga didasarkan pada pertimbangan prioritas masing-masing dalam satu kelompok yang sama seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel I.3
Bobot Masing-Masing Indikator

No	INDIKATOR	Bobot (%)	Sub-Indikator	Bobot (%)	Jumlah Bobot (%)
1	Lokasi	20	1. Legalitas Tanah	30	100
			2. Status penguasaan Bangunan	25	
			3. Frekuensi bencana kebakaran	20	
			4. Frekuensi bencana banjir	15	
			5. Frekuensi bencana tanah longsor	10	

No	INDIKATOR	Bobot (%)	Sub-Indikator	Bobot (%)	Jumlah Bobot (%)
2	Kependudukan	15	6. Tingkat kepadatan penduduk	20	100
			7. Rata-rata anggota keluarga	10	
			8. Jumlah KK per rumah	15	
			9. Tingkat pertumbuhan penduduk	10	
			10. Angka kematian kasar	10	
			11. Status gizi balita	15	
			12. Angka kesakitan malaria	5	
			13. Angka kesakitan diare	5	
			14. Angka kesakitan demam berdarah	5	
			15. Angka kesakitan ISPA	5	
3	Kondisi Bangunan	25	16. Tingkat kualitas struktur bangunan	35	100
			17. Tingkat kepadatan bangunan	30	
			18. Tingkat kesehatan dan bangunan	25	
			19. Tingkat penggunaan luas lantai	10	
4.	Kondisi Prasarana dan Sarana Dasar	30	20. Tingkat pelayanan air bersih	25	100
			21. Kondisi sanitasi lingkungan	25	
			22. Kondisi persampahan	20	
			23. Kondisi saluran air hujan	10	
			24. Kondisi jalan	10	
			25. Besarnya ruang terbuka	10	
5	Kondisi Sosial Ekonomi	10	26. Tingkat kemiskinan	40	100
			27. Tingkat pendapatan	35	
			28. Tingkat pendidikan	15	
			29. Tingkat keamanan	10	

Sumber : Dirjen Perkim, 2003

3. Penilaian Tingkat kekumuhan

Format sebaran hasil penilaian seluruh indikator yang ada (29 indikator) dapat dilihat dalam table seperti dibawah.

Tabel I.4
Format Sebaran Hasil Penilaian Seluruh sub-Indikator

Indikator	Nilai					Bobot (%)
	Sangat Kumuh	Kumuh Berat	Kumuh Sedang	Kumuh Ringan	Tidak Kumuh	
1. Legalitas tanah	> 70%	51-70%	31-50%	11-30%	<10%	6
2. Status penguasaan bangunan	> 70%	51-70%	31-50%	11-30%	<10%	5
3. Frekuensi bencana kebakaran	> 7 kali /th	5-7 kali/th	3-4 kali/th	1-2 kali/th	0 kali/th	4
4. Frekuensi bencana banjir	> 7 kali /th	5-7 kali/th	3-4 kali/th	1-2 kali/th	0 kali/th	3

Indikator	Nilai					Bobot (%)
	Sangat Kumuh	Kumuh Berat	Kumuh Sedang	Kumuh Ringan	Tidak Kumuh	
5. Frekuensi bencana tanah longsor	> 7 kali /3th	5-7 kali/3th	3-4 kali/th	1-2 kali/th	0 kali/th	2
6. Tingkat kepadatan Pnddk	750	750-700	700-600	600-500	500-250	3
	500	500-450	450-350	350-250	250-150	
	150	150-100	100-75	75-50	50-25	
7. Rata-rata anggota rumah tangga	> 13 jiwa/KK	11-13 jiwa/KK	8-10 jiwa/KK	5-7 jiwa/KK	<5 jiwa/KK	1,5
8. Jumlah KK per rumah	>4KK/rmh	4 KK/rmh	3 KK/rmh	2 KK/ rmh	1 KK/rmh	2,25
9. Tingkat pertambahan Pddk	>2,5%	2,1-2,5%	1,6-2,0%	1,0-1,5%	<1,0%	1,5
10. Angka kematian kasar	> 40%	31-40%	21-30%	11-20%	<10%	1,5
11. Status gizi balita	>70%	51-70%	31-50%	11-30%	<10%	2,25
12. Angka kesakitan malaria	>20%	16-20%	11-15%	6-10%	<5%	0,75
13. Angka kesakitan diare	>70%	51-70%	31-50%	11-30%	<10%	0,75
14. Angka kesakitan demam berdarah	>20%	16-20%	11-15%	6-10%	< 50 u/Ha	0,75
15. Angka kesakitan ISPA	>70%	51-70%	31-50%	11-30%	<10%	8,75
16. Tingkat kualitas struktur bangunan	>70%	51-70%	31-50%	11-30%	<10%	7,5
17. Tingkat kepadatan bangunan	>200u/Ha	151-200u/ha	101-150u/Ha	51-100u/Ha	< 50u/Ha	7,5
18. Tingkat kesehatan dan kenyamanan bangunan	>70%	51-70%	31-50%	11-30%	<10%	6,25
19. Tingkat penggunaan luas lantai	< 4,5 m ² /org	4,6-6,5 m ² /org	6,6-8,5 2/org	8,6-10,5 m ² /org	>10,5 m ² /Org	2,5
20. Tingkat pelayanan air bersih	>70%	51-70%	31-50%	11-30%	<10%	7,5
21. Kondisi sanitasi lingkungan	>70%	51-70%	31-50%	11-30%	<10%	7,5
22. Kondisi persampahan	>70%	51-70%	31-50%	11-30%	<10%	6
23. Kondisi saluran air hujan	>70%	51-70%	31-50%	11-30%	<10%	3
24. Kondisi jalan	>70%	51-70%	31-50%	11-30%	<10%	3
25. Ruang terbuka	<2,5%	2,5-5,0%	5,0-7,5%	7,5-10%	<6%	3
26. Tingkat kemiskinan	>35%	26-35%	16-25%	6-15%	<6%	4
27. Tingkat pendidikan	>35%	26-35%	16-25%	6-15%	0%	1,5
28. Tingkat pendapatan	>15%	11-15%	6-10%	1-5%	0 kali/th	3,5
29. Tingkat keamanan	>6 Kali/th	5-6kali/th	1-3 kali/th	1-3 kali/th		1

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

Dari 29 indikator, masing-masing memiliki cara mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Berikut ini adalah rumus untuk mencari 29 indikator yang ada:

1. Legalitas Tanah

Status legalitas tanah adalah perbandingan jumlah rumah yang dibangun di atas tanah/lahan yang diperuntukkan bukan sebagai permukiman dibandingkan dengan yang dibangun pada tanah yang peruntukan bagi permukiman. Semakin luas suatu permukiman berada di atas tanah yang tidak diperuntukkan bagi permukiman, maka tingkat kekumuhannya semakin tinggi.

$$\frac{\text{Jumlah Luas Permukiman Pada Peruntukan Bukan Permukiman}}{\text{Jumlah Luas Wilayah}} \times 100 \%$$

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

2. Status Penguasaan Bangunan

Adalah status pemilikan dan penggunaan bangunan, semakin banyak penduduk di suatu lingkungan permukiman yang menguasai bangunan bukan milik sendiri, yaitu dengan cara sewa/kontrak, tingkat kekumuhan dari segi penguasaan bangunan rumah semakin tinggi.

$$\frac{\text{Jumlah KK yang menempati bangunan dengan cara menyewa/kontrak}}{\text{Jumlah KK}} \times 100 \%$$

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

3. Frekuensi Bencana Kebakaran

Adalah banyaknya kejadian kebakaran pada suatu lingkungan permukiman. Semakin sering terjadi bencana kebakaran pada suatu lingkungan permukiman, tingkat kerawanan bencana di lingkungan tersebut semakin tinggi.

$$\text{Jumlah Kejadian Kebakaran Dalam Satu Tahun}$$

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

4. Frekuensi Bencana Banjir

Adalah banyaknya kejadian bencana banjir pada suatu lingkungan permukiman, biasanya disebabkan tidak tersedianya atau kurang terpeliharanya prasarana drainase ataupun tempat pembuangan akhir. Semakin sering terjadinya bencana

banjir maka permukiman tersebut dapat dikatakan lebih kumuh dan rawan terhadap penyakit.

Jumlah Kejadian Banjir Dalam Satu Tahun

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

5. Frekuensi Bencana Tanah Longsor

Adalah banyaknya kejadian bencana tanah longsor pada suatu lingkungan permukiman, akibat penempatan bangunan pada daerah patahan atau daerah longsoran. Teknik penilaiannya adalah menghitung banyaknya kejadian selama tiga tahun.

Jumlah Kejadian Tanah Longsor Dalam Satu Tahun

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

6. Tingkat Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk menunjukkan suatu kualitas lingkungan permukiman, semakin padat penduduk pada suatu wilayah mengakibatkan semakin besar tekanan terhadap sumber daya dan daya dukung fisik lingkungan yang ada pada wilayah tersebut, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan prasarana dan sarana. Analisis tingkat kepadatan penduduk didasarkan pada perhitungan sebaai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk dalam Suatu Wilayah}}{\text{Luas Wilayah (ha)}} \times 100 \%$$

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

7. Rata-Rata Anggota Rumah Tangga

Rata-rata anggota rumah tangga atau besarnya anggota rumah tangga (family size) adalah rata-rata banyaknya anggota keluarga pada tiap-tiap kepala keluarga (KK). Family size menunjukkan banyaknya anggota keluarga yang menjadi tanggungan KK tersebut. Jumlah anggota keluarga yang besar sudah barang tentu membutuhkan luas lantai yang lebih besar, termasuk pula dalam konsumsi barang dan jasa.

$$\frac{\text{Jumlah Seluruh Penduduk dalam Satu Wilayah (jiwa)}}{\text{Jumlah Seluruh KK}}$$

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

8. Jumlah Kepala Keluarga (KK) per rumah/Bangunan

Jumlah KK per rumah adalah perbandingan antara jumlah KK pada suatu wilayah dengan jumlah bangunan rumah. Semakin tinggi angka perbandingan KK dengan bangunan rumah ini menunjukkan semakin banyak jumlah anggota keluarga, yang pada gilirannya berpengaruh pada kebutuhan sarana pelayanan yang semakin besar.

$$\frac{\text{Banyaknya KK dalam suatu Wilayah}}{\text{Jumlah Bangunan Rumah}}$$

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

9. Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk adalah penambahan penduduk tiap tahun pada satu wilayah yang dilihat dari jumlah penduduk pada awal tahun dan akhir tahun tiap 100 penduduk. Semakin tinggi angka pertumbuhan penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan prasarana dan sarana fisik lingkungan yang harus dipenuhi

menurut berkembang waktu.

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Akhir Tahun} - \text{Jumlah Penduduk Awal tahun}}{\text{Jumlah Jumlah Penduduk Awal Tahun}} \times 100$$

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

10. Angka Kematian Kasar

Tingkat Kematian Kasar adalah jumlah kematian pada tahun tertentu tiap 1.000 penduduk pada satu wilayah. Semakin tinggi angka kematian kasar, mengindikasikan rendahnya kualitas lingkungan yang berhubungan dengan masalah kesehatan suatu permukiman. Penilaiannya dengan membandingkan banyaknya jumlah kematian yang terjadi pada tahun tertentu dengan penduduk awal pertengahan tahun tersebut dikalikan 1000.

$$\frac{\text{Jumlah Kematian Selama Satu Tahun}}{\text{Jumlah Pertengahan tahun yang sama}} \times 1000$$

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

11. Status Gizi Balita

Status Gizi Balita adalah keadaan yang menggambarkan baik-buruknya gizi anak, balita pada satu wilayah. Status gizi balita dapat dilihat dari perkembangan berat badan anak balita yang ditunjukkan oleh garis merah pada grafik KMS (Kartu Menuju Sehat). Semakin banyak anak-anak yang berada pada Bawah Garis Merah (BGM) menunjukkan bahwa status gizinya rendah.

$$\frac{\text{Jumlah Balita di Bawah Garis Merah}}{\text{Jumlah Balita}} \times 100 \%$$

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

12. Angka Kesakitan Malaria

Angka Kesakitan Malaria adalah jumlah penduduk yang menderita penyakit malaria pada suatu wilayah dalam satu tahun. Semakin tinggi angka kesakitan malaria, mengindikasikan buruknya kualitas lingkungan bagi kesehatan penduduknya. Teknik penilaiannya adalah membandingkan jumlah penderita malaria dengan jumlah seluruh penduduk dalam satu wilayah dalam setahun dikalikan 1000

$$\frac{\text{Jumlah Penderita Malaria dalam Setahun}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$$

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

13. Angka Kesakitan Diare

Angka Kesakitan Diare adalah jumlah penduduk yang menderita penyakit diare pada suatu wilayah dalam satu tahun. Tingginya angka kesakitan diare mencerminkan kondisi lingkungan yang tidak sehat, drainase dan sanitasi yang buruk.

$$\frac{\text{Jumlah Penderita Diare dalam Setahun}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$$

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

14. Angka Kesakitan Demam Berdarah

Angka kesakitan demam berdarah adalah jumlah penduduk yang menderita penyakit demam berdarah pada suatu wilayah dalam satu tahun. Kondisi lingkungan yang kumuh, tercermin dari tingginya angka kesakitan demam berdarah pada suatu lingkungan permukiman.

$$\frac{\text{Jumlah Penderita Demam Berdarah dalam Setahun}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$$

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

15. Angka Kesakitan ISPA

Angka kesakitan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan bagian Atas) adalah jumlah penduduk yang menderita ISPA pada suatu lingkungan permukiman dalam satu tahun.

Pada umumnya angka kesakitan ISPA ini dipengaruhi oleh tingkat kesehatan dan kenyamanan bangunan, khususnya pencahayaan, penghawaan serta suhu udara dan kelembaban dalam ruangan. Pencahayaan dan penghawaan yang buruk, suhu udara dan kelembaban udara yang buruk akan mempengaruhi kesegaran penghuni.

$$\frac{\text{Jumlah Penderita ISPA dalam Setahun}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$$

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

16. Tingkat Kualitas Struktur Bangunan

Kualitas struktur bangunan terkait dengan kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan bangunan, khususnya rumah tinggal. Tingkat kualitas struktur bangunan dinilai berdasarkan persentase banyaknya bangunan rumah yang tidak memenuhi persyaratan pondasi, dinding, atap, serta lantai suatu bangunan rumah tinggal yang sehat. Semakin banyak rumah dalam lingkungan permukiman yang tidak memenuhi kriteria kebutuhan minimal keselamatan dan keamanan mengindikasikan lingkungan permukiman semakin kumuh.

$$\frac{\text{Jumlah Bangunan Rumah dg Struktur Tidak Layak}}{\text{Jumlah Keseluruhan Bangunan Rumah}} \times 100 \%$$

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

17. Tingkat Kepadatan Bangunan²

Tingkat kepadatan bangunan adalah jumlah unit rumah per satuan luas (ha) dalam suatu lingkungan permukiman. Semakin tinggi tingkat kepadatan bangunan maka lingkungan permukiman akan semakin kumuh akibat keterbatasan lahan yang tersedia.

$$\frac{\text{Jumlah Bangunan Rumah}}{\text{Luas Wilayah (ha)}}$$

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

18. Tingkat Kesehatan dan Kenyamanan Bangunan

Tingkat kesehatan dan kenyamanan bangunan tempat tinggal akan terkait dengan 3 aspek, yaitu pencahayaan, penghawaan, serta suhu udara dan kelembaban dalam ruangan dalam suatu lingkungan permukiman. Penilaian tingkat kesehatan dan kenyamanan bangunan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Bangunan Rumah Tidak Sehat dan Aman}}{\text{Jumlah Keseluruhan Rumah}} \times 100 \%$$

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

19. Tingkat Penggunaan Luas Lantai Bangunan

Tingkat penggunaan luas lantai bangunan adalah luas ruang yang dipergunakan untuk melakukan aktifitas sosial, ekonomi dan budaya setiap orang. Mengacu pada pedoman rumah sehat, bahwa rumah kumuh mempunyai luas lantai kurang dari 9

meter persegi tiap orang. Oleh karena itu, semakin kecil penggunaan luas bangunannya maka mengindikasikan lingkungan permukiman tersebut semakin kumuh. Teknik penilaiannya adalah membandingkan luas bangunan rumah dengan jumlah penghuni rumah.

$$\frac{\text{Jumlah Bangunan Rumah}}{\text{Jumlah Penghuni Rumah}}$$

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

20. Tingkat Pelayanan Air Bersih

Tingkat Pelayanan Air Bersih adalah persentase jumlah KK yang tidak mendapat pelayanan air bersih baik yang disuplai oleh PDAM maupun berasal dari sumber air lain, termasuk sumber air setempat (sumur dangkal maupun sumur dalam) atau berasal dari sumber lain di luar lingkungan yang diperjual belikan melalui penjual air bersih (*water vendor*). Lingkungan permukiman dengan pelayanan air bersih atau akses terhadap air bersih yang terbatas mengindikasikan buruknya kualitas lingkungan permukiman tersebut, Teknik penilaiannya adalah membandingkan jumlah kepala keluarga yang tidak mendapatkan pelayanan air bersih dengan jumlah keseluruhan KK dikalikan 100 %.

$$\frac{\text{Jumlah KK yang tidak Mendapat Pelayanan Air Bersih}}{\text{Jumlah KK Keseluruhan}} \times 100 \%$$

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

21. Kondisi Sanitasi Lingkungan

Kondisi Sanitasi Lingkungan dilihat dari persentase jumlah KK yang tidak menggunakan fasilitas jamban keluarga atau jamban umum yang memenuhi syarat

teknis on-site sanitation (septic-tank) dalam satu wilayah. Lingkungan permukiman dengan tingkat penggunaan septic-tank setiap rumah rendah mengindikasikan buruknya kondisi sanitasi lingkungan itu.

$$\frac{\text{Jumlah KK yang tidak menggunakan Jamban Umum}}{\text{Jumlah KK Keseluruhan}} \times 100 \%$$

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

22. Kondisi Persampahan

Kondisi Persampahan dilihat dari persentase jumlah KK yang tidak mendapat pelayanan pengangkutan sampah oleh pemerintah daerah, swasta atau swadaya (terkoordinir) sehingga masyarakat membuang sampah ke sembarang tempat, misalnya sungai, selokan atau tempat terbuka lain dalam suatu wilayah. Semakin banyak penduduk yang membuang sampah ke tempat yang tidak diperuntukan secara khusus bagi pembuangan sampah, mengindikasikan kondisi lingkungan permukiman yang buruk.

$$\frac{\text{Jumlah KK yang membuang sampah ke tempat yang bukan peruntukannya}}{\text{Jumlah KK Keseluruhan}} \times 100 \%$$

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

23. Kondisi Saluran Air Hujan (Drainase)

Kondisi Saluran Air Hujan dilihat dari persentase derajat kelancaran saluran air/drainase dalam suatu wilayah. Derajat kelancaran air pada saluran air/drainase dikategorikan dalam kondisi lancar, tidak lancar, tergenang dan tidak ada saluran. Semakin banyak saluran yang tidak lancar, tergenang bahkan tidak ada saluran drainasenya, mencerminkan buruknya suatu lingkungan fisik permukiman

$$\frac{\text{Panjang Saluran Drainase yang tidak Lancar, tergenang}}{\text{Jumlah Total Panjang Saluran Drainase}} \times 100 \%$$

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

24. Kondisi Jalan

Kondisi jalan di suatu lingkungan permukiman tercermin dari segi kualitas permukaan jalan. Kondisi jalan menurut kualitas permukaannya dikategorikan dalam: baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Kondisi jalan di permukiman kumuh pada umumnya tidak memadai dari segi kualitas permukaan, sehingga menghambat pergerakan manusia, kendaraan dan barang. Teknik penilaiannya adalah membandingkan panjang jalan dalam kategori sedang, rusak dan rusak berat dengan panjang jalan seluruhnya dalam suatu wilayah dikalikan 100%.

$$\frac{\text{Panjang Jalan yang sedang, rusak dan rusak berat}}{\text{Jumlah Total Panjang Jalan}} \times 100 \%$$

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

25. Besarnya Ruang Terbuka

Keberadaan ruang terbuka di suatu lingkungan permukiman kumuh pada umumnya tidak memadai. Semakin banyak proporsi ruang terbuka pada suatu lingkungan permukiman maka lingkungan tersebut semakin baik.

$$\frac{\text{Luas Ruang Terbuka (dalam Ha)}}{\text{Luas Seluruh Wilayah Permukiman (dalam Ha)}} \times 100 \%$$

Sumber : Dirjen Perumahan dan Permukiman, 2002

26. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dilihat dari persentase jumlah keluarga miskin dalam kategori : pra-sejahtera dan keluarga I (KS I) karena alasan ekonomi dalam suatu lingkungan permukiman. Semakin banyak jumlah keluarga pra-sejahtera dan KS I, mengindikasikan kurangnya kemampuan masyarakat untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukimannya, yang pada gilirannya akan mengakibatkan masalah kecumuhan.

$$\frac{\text{Jumlah KK Pra-sejahtera dan KS 1 karena alasan Ekonomi}}{\text{Jumlah KK Keseluruhan}} \times 100 \%$$

Sumber : Digen Perumahan dan Permukiman, 2002

27. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan dilihat dari besarnya pendapatan penduduk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu lingkungan permukiman. Dalam hal ini kriteria dasar yang digunakan adalah Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMP/UMK). Lemahnya sumber daya masyarakat juga dapat diindikasikan dari banyaknya penduduk dengan penghasilan di bawah UMP/UMK. Tingkat pendapatan penduduk dalam suatu lingkungan permukiman dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk dengan penghasilan di bawah UMP/UMK dengan jumlah penduduk keseluruhan dikalikan 100%.

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk berpenghasilan di bawah UMP/UMK}}{\text{Jumlah Keseluruhan Penduduk}} \times 100 \%$$

Sumber : Digen Perumahan dan Permukiman, 2002

Hasil penilaian 29 indikator tersebut kemudian dimasukkan dalam kriteria yang sudah ada di atas, setelah itu didapatkan bobot masing-masing indikator yang ada. Sedang penggolongan terhadap tingkat kecukupan dapat diraitkan sebagai berikut:

Sumber : *Dijen Perumahan dan Permukiman, 2002*

Jumlah Kejadian Tindak Kriminal Dalam Satu Tahun
--

29. Tingkat Kerawanan Keamanan
 Tingkat kerawanan keamanan dilihat dari banyaknya jumlah kejadian tindak kriminal dalam suatu lingkungan permukiman yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun. Tingkat keamanan yang ditunjukkan oleh banyak sedikitnya kejadian kriminalitas mempengaruhi kenyamanan bertempat tinggal. Teknik penilaiannya adalah angka atau jumlah kejadian dalam satu tahun.

Sumber : *Dijen Perumahan dan Permukiman, 2002*

$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang tidak Tamat Pendidikan Dasar 9 tahun}}{\text{Jumlah Keseluruhan Penduduk}} \times 100 \%$

28. Tingkat Pendidikan.
 Tingkat pendidikan dilihat dari persentase jumlah penduduk berdasar pendidikan terakhir yang ditempuh. Dalam hal ini yang ingin diketahui adalah tingkat pendidikan dalam kategori tidak tamat pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun (tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama). Semakin banyak penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, dapat mencerminkan kurangnya kemampuan penduduk untuk mengakses berbagai sumber daya bagi peningkatan kualitas suatu lingkungan permukiman

1.8.3.2 Analisis Manfaat Penataan Kawasan Kumuh Menurut Masyarakat

- ❖ Sangat Kumuh dengan Hasil Penilaian antara 93,6 – 117
- ❖ Kumuh Berat dengan Hasil Penilaian antara 70,2 – 93,6
- ❖ Kumuh Sedang dengan Hasil Penilaian antara 46,8 – 70,2
- ❖ Kumuh Ringan dengan Hasil Penilaian antara 23,4 – 46,8
- ❖ Tidak Kumuh dengan Hasil Penilaian antara 0 – 23,4

Teknik analisis yang digunakan dengan deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur penelitian masalah yang diselidiki dengan mengamarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan sifat-sifat populasi di wilayah studi. Usaha-usaha mendeskripsikan fakta-fakta tersebut, pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan dan kondisinya.

Penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti wawancara, catatan lapangan, gambar foto, dan lain-lain. Pendekatan kualitatif mendasarkan pada kekuatan narasi. Pendekatan kualitatif mencoba mengerti/mahakan pandangan-pandangan dasar interpretif dan fenomenologis.

Metode pendekatan ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi karakteristik, potensi dan kendala di kawasan studi. Metode ini digunakan untuk menganalisis program-program penataan permukiman yang sudah pernah dilakukan di Bandung, persepsi masyarakat terhadap manfaat penataan kawasan berdasarkan pendapat masyarakat kawasan nelayan Bandengan Kendal.

1.8.3.3 Analisis Hubungan Antara Perubahan Tingkat Kekumuhan dengan Manfaat yang Diperoleh Masyarakat Bandengan

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis Korelasi (*Correlation*). Analisis ini dipergunakan untuk menganalisis sasaran penelitian yaitu mengukur hubungan antara perubahan tingkat kekumuhan dengan manfaat yang diperoleh masyarakat bandengan.

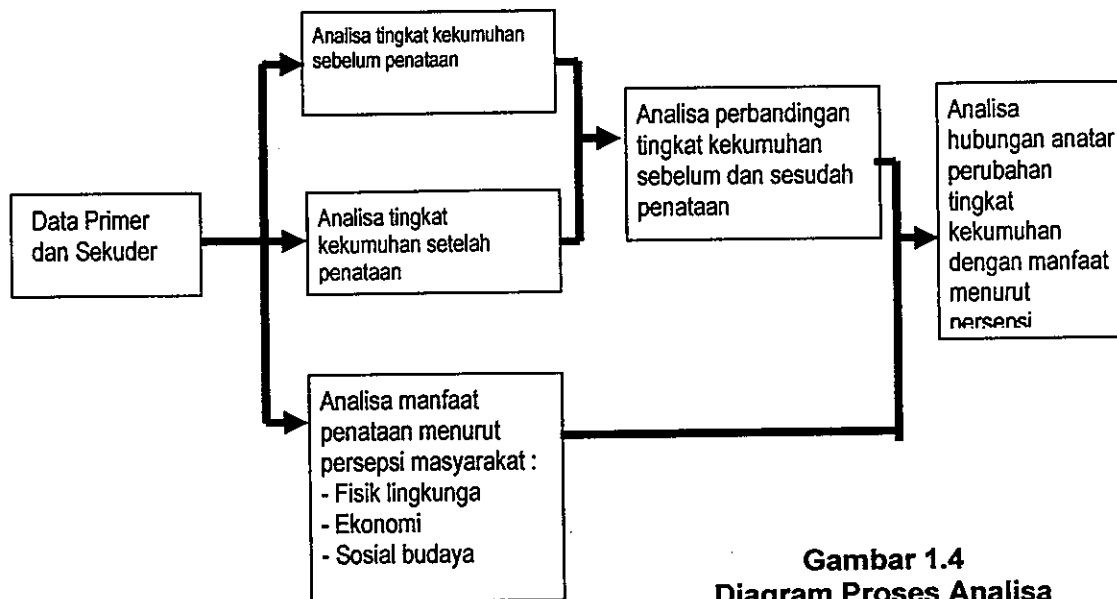
Untuk menentukan indeks hubungan atau korelasi (*r*) antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan formulasi :

$$r = \frac{N \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)} \sqrt{(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Besarnya korelasi dinyatakan sebagai “koefisien korelasi” antar variabel “Y” dalam hal penelitian ini sebagai *dependent variable* dengan variabel “X” yang berfungsi sebagai *independent variable*. Adapun variabel Y dan variabel X yang digunakan, yaitu variabel Y sebagai komponen kualitas fisik lingkungan permukiman dan variabel X sebagai komponen perbaikan permukiman kumuh.

Besarnya nilai “r” berkisar antara – (minus) 1 hingga + (positif) 1. Jika nilai r = 0 atau mendekati harga 0 (nol) berarti hubungan antara kedua variabel dinyatakan “sangat lemah” atau tidak terdapat hubungan sama sekali. Kalau nilai r = 1 atau mendekati 1, korelasi antara dua variabel dikatakan positif dan sangat kuat, sebaliknya kalau nilai r = (-) atau mendekati (-), maka korelasi antara kedua variabel sangat kuat namun negatif.

Tahapan prosesnya analisa tersebut diatas dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.4
Diagram Proses Analisa

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam thesis ini dibagi menjadi beberapa bab yaitu:

- Bab I memuat latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang memberikan gambaran perlunya dilaksanakan penelitian penataan permukiman nelayan Bandengan.
- Bab II menguraikan teori-teori, konsep-konsep atau pendapat para ahli yang dijadikan landasan teori dalam penelitian sehingga dari rumusan masalah (*question research*) diuraikan dalam Bab I, sebagian dapat terjawab walaupun masih bersifat kajian teoritis. Dalam kajian ini diuraikan juga alat analisis yang dipakai untuk memecahkan masalah yang diangkat. Dalam Bab II juga diuraikan pernyataan sebagai jawaban sementara, dalam bentuk hipotesis dari masalah yang diangkat.

- Bab III menguraikan tentang gambaran umum Kabupaten Kendal secara umum dan gambaran permukiman nelayan Bandengan yang telah ditetapkan sebagai wilayah studi. Gambaran umum pada bab III ini dilihat dari kondisi fisik, sosial ekonomi, sarana prasarana dan kondisi perumahan dan permukiman.
- Bab IV merupakan uraian analisis data-data yang telah diolah menggunakan berbagai alat analisis dan bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap penataan permukiman kumuh nelayan Bandengan Kabupaten Kendal.
- Bab V merupakan bab kesimpulan yang bertujuan untuk mengulas bab-bab sebelumnya yang dijadikan penutup dari pembahasan tesis ini.

BAB II

KAJIAN PENATAAN KAWASAN KUMUH

2.1 Permukiman

2.1.1 Pengertian Permukiman

Permukiman menurut Undang-undang Perumahan dan Permukiman tahun 1992 dapat diartikan menjadi tiga yaitu:

- Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (Kamus Tata Ruang, 1993: 81);
- Kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan, dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna (Kamus Tata Ruang, 1998: 81);
- Tempat atau daerah untuk bertempat tinggal, tempat untuk menetap (Kamus Tata Ruang, 1998: 87);
- Menurut Soedarsono permukiman adalah suatu kawasan perumahan lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana umum, dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan (Mohammad Agung Ridlo, 1990: 15);

- C. A. Doxiadis (1974) mendefinisikan permukiman adalah penataan kawasan yang dibuat oleh manusia, dan tujuannya adalah untuk bertahan hidup sebagai manusia, agar dapat hidup dan lebih baik (terutama pada masa kanak-kanak), memberi rasa bahagia dan rasa aman dan mengandung kesempatan untuk pembangunan manusia seutuhnya (Mohammad Agung Ridlo, 1990: 15).

Apabila dirumuskan definisi tersebut maka pengertian permukiman adalah lingkungan kawasan kota atau desa yang didomisili sebagai lingkungan hunian untuk bertempat tinggal dengan sarana dan prasarana yang lengkap sehingga bermanfaat untuk memberikan rasa aman dan bahagia.

Tempat permukiman merupakan lingkungan langsung bagi kehidupan pada hampir seluruh umat manusia. Demikian halnya bagi kehidupan penduduk dalam masyarakat kita, tempat pemukiman itu merupakan wadah dimana mereka pada umumnya hidup sehari-hari; ada yang semata-mata hanya untuk sebagai lingkungan tempat tinggalnya sehabis bekerja serta kegiatan-kegiatan lainnya, dan ada pula yang langsung juga sebagai tempat berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-harinya.

Sesungguhnya perumahan dan fasilitas lingkungan perumahan beserta fasilitas lingkungan kegiatan manusia satu sama lainnya membentuk pola permukiman, mempunyai ciri-ciri kehidupan yang beraneka ragam antara satu negara dengan negara lainnya antara satu daerah dengan daerah lainnya maupun antara pedesaan dan perkotaan.

Hubungan ini jika ditinjau dari proses pembentukan permukiman dan penyebaran penduduk, secara garis besarnya pertama-tama dipengaruhi ekologis dari daerah yang bersangkutan. Disamping itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah pengaruh dari adanya sarana perhubungan dan komunikasi yang bersangkutan dengan

hubungan antar daerah dan antar kota. Penyebaran penduduk dan permukiman akan terkelompok dan mengarah kepada segi-segi yang menguntungkan dari aspek-aspek yang dikemukakan diatas (Rustian Kamaludin, 1983: 58).

Permukiman dapat dikatakan sebagai suatu *settlement* pada dasarnya merupakan suatu bagian wilayah tempat dimana penduduk (pemukim) tinggal, berkiprah dalam kegiatan kerja dan kegiatan usaha, berhubungan sesama pemukim sebagai suatu masyarakat serta memenuhi berbagai kegiatan kehidupan.

Keberadaan permukiman kota yaitu yang pertumbuhan dan perkembangannya dipengaruhi dan ditentukan oleh faktor-faktor pengembangan kota, serta permukiman bukan kota seperti di pedesaan yang tumbuh dan berkembang di dalam pengaruh dan ditentukan oleh faktor-faktor bukan kota. Secara umum permukiman dapat dibatasi sebagai berikut (Djoko Sujarto, 1991) :

- Secara demografis, merupakan pemusatan penduduk yang tinggi dengan tingkat kepadatan yang tinggi dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Dari segi statistik ketentuan kota ini beragam diberbagai negara. Demikian pula di Indonesia selalu mengalami perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat suatu sensus dilakukan;
- Secara sosiologis, selalu dikaitkan dengan batasan adanya sifat heterogen dari penduduknya serta budaya urban yang telah mengurangi budaya desa;
- Secara ekonomis, suatu kota dicirikan dengan proporsi lapangan kerja yang dominan disektor non pertanian seperti industri, pelayanan dan jasa, transportasi dan perdagangan;
- Secara fisik, suatu kota dicirikan dengan adanya dominasi wilayah terbangun dan struktur fisik binaan;

- Secara geografis, kota diartikan dengan suatu pusat kegiatan yang dikaitkan dengan suatu lokasi strategis;
- Secara administratif, pemerintah suatu kota dapat diartikan sebagai suatu wilayah wewenang yang dibatasi oleh suatu wilayah yuridiksi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

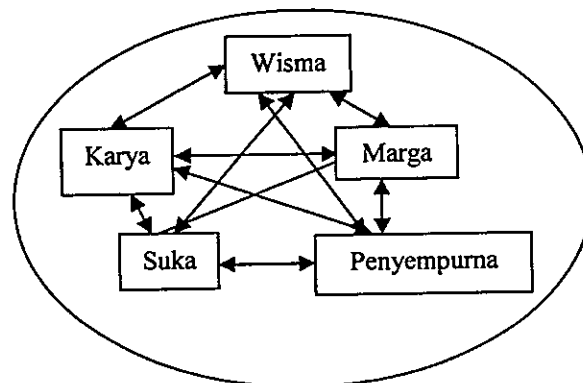
Suatu permukiman yang ideal dengan sendirinya apabila kebutuhan kehidupan masyarakatnya dapat dipenuhi selengkapya, artinya kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, tempat bekerja, alat dan sarana komunikasi, fasilitas sosial dan fisik serta kebutuhan rohaninya dapat dipenuhi.

Pada hakekatnya elemen lingkungan yang dibutuhkan di dalam kehidupan masyarakat dapat dijabarkan menjadi lima unsur komponen pokok yaitu wisma, karya, marga, suka, dan penyempurna. Kelima unsur pokok ini merupakan kerangka dasar di dalam pembentukan lingkungan kehidupan pada umumnya dan lingkungan desa khususnya. Komponen kegiatan tersebut tercakup dalam kelima komponen kegiatan (Djoko Sujarto, 1979: 10) :

1. Wisma atau rumah dimana penduduk bersama keluarganya dapat berindung;
2. Karya yaitu suatu lapangan kegiatan kerja dimana masyarakat desa mencari nafkahnya seperti persawahan, perikanan, industri rumah dan kegiatan jasa;
2. Marga yaitu jaringan jalan dan jembatan yang berfungsi menghubungkan satu desa dengan desa lainnya baik untuk manusia maupun barang. Marga ini akan meliputi jaringan jalan, lampu lokal (desa) dan regional atau antar regional, terminal desa dan jaringan telekomunikasi;
3. Suka yaitu komponen kegiatan untuk memenuhi kebutuhan penduduk desa akan hiburan, bersantai dan beristirahat;

4. Penyempurna yaitu komponen kegiatan yang penting untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin penduduk, yang tercakup dalam keempat komponen di atas. Termasuk dalam komponen penyempurna ini adalah fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, dan tanah perkuburan.

Uraian di atas jelas kiranya bahwa unsur pokok penduduk atau masyarakat dengan kerangka kebutuhannya yang terdiri dari kelima komponen kegiatan hidup tersebut (wisma, karya, marga, suka, dan penyempurna) merupakan kerangka dasar dari terbentuknya suatu lingkungan desa yang lengkap dan menyeluruh.



Gambar 2.1
Kerangka Dasar Pembentukan Lingkungan Fisik

Pada kehidupan dan kegiatan fungsional suatu lingkungan masyarakat kelima unsur pokok tersebut akan berkaitan dan saling bergantung satu sama lain. Hal tersebut dalam suatu desa akan tercermin pada penempatan lokasi dari berbagai kegiatan fungsional dari macam-macam kelompok unsur tersebut. Disadari atau pun tidak disadari penempatan lokasi dari unsur-unsur pokok dengan berbagai komponennya akan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan utama yang meliputi :

1. Pertimbangan efisiensi, optimasi dan efektivitas dari fungsi kegiatan tertentu;

2. Intensitas hubungan antara suatu kegiatan dengan kegiatan secara fungsional;
3. Orientasi dari kegiatan tertentu sehubungan dengan fungsinya;
4. Frekwensi dan kuantitas kebutuhan masyarakat akan kegiatan fungsional tertentu.

Keempat dasar pertimbangan tersebut di atas kemudian akan menjadi dasar di dalam penataan secara fisik (tata ruang).

2.1.2 Permukiman Kumuh

Definisi permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

- Permukiman kumuh adalah permukiman tidak layak huni atau dapat membahayakan kehidupan penghuni, karena keadaan keamanan dan kesehatan memprihatinkan, kenyamanan dan keandalan bangunan dan lingkungan tersebut tidak memadai, baik dilihat dari segi tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat rendah serta prasarana dan sarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat (Kamus Tata Ruang, 1997: 81);
- Kumuh dapat diartikan mengandung sifat-sifat keusangan, banyak ditujukan pada keadaan guna lahan atau zona atau kawasan yang sudah sulit diperbaiki, jadi yang lebih baik dibongkar, tapi juga dapat ditujukan pada keadaan yang secara fisik masih cukup baik, belum tua, tapi sudah tidak lagi memenuhi berbagai standar kelayakan (Kamus Tata Ruang, 1997: 57);
- Siswono Yudohusodo (1994) : membedakan bahwa permukiman kumuh tidak selalu liar dan hunian liar tidak selalu kumuh, pengertian hunian liar biasanya dikaitkan dengan status kepemilikan yaitu jika dibangun diatas tanah yang bukan haknya, dan hunian liar di perkotaan sebagian besar berdiri diatas tanah negara (Harun Sunarso, 1998: 34);

- JIIS (1991) Definisi permukiman kumuh adalah lingkungan permukiman dengan tingkat kepadatan lebih dari 600 jiwa per hektar, bentuk hunian tidak berstruktur, tidak berpola (letak rumah dan bentuk jalan tidak beraturan) tidak tersedianya fasilitas umum, sarana dan prasarana permukiman yang baik dan bentuk fisik bangunan yang tidak layak huni, yaitu yang secara reguler tiap tahun dilanda banjir (Harun Sunarso, 1998 : 34);
- Sunaryati Hartono (1991): permukiman kumuh adalah ditinjau dari aspek hukum dan non hukum. Beberapa aspek hukum permukiman kumuh adalah (Harun Sunarso, 1998: 34):

- a. Status tanah rumah-rumah;
- b. Sejarah terjadinya daerah permukiman kumuh;
- c. Tujuan/peruntukan peremajaan permukiman;
- d. Ganti rugi yang pantas dan adil.

Sedangkan non hukum permukiman kumuh adalah:

- a. Daerah yang padat jumlah penduduknya dan mudah menimbulkan perikehidupan yang kurang harmonis antar tetangga sebab mudah sekali timbul sengketa, seperti penguasaan lahan, perumahan, sumber air, kebisingan, keterbatasan fasilitas umum, dan fasilitas sosial sarana pendidikan anak dan lain-lain;
 - b. Daerah yang padat terdapat social kontrol yang kuat, antara lain gosip/sebaliknya sikap tidak peduli;
 - c. Daerah permukiman kumuh merupakan daerah yang penduduknya relatif berpendapatan rendah/miskin.
- Departemen Kesehatan (1992): memberikan batasan tentang karakteristik daerah

kumuh adalah kawasan/area permukiman yang mempunyai resiko tinggi terhadap penularan penyakit dan pencemaran lingkungan, baik di perkotaan maupun di pedesaan, yaitu (Harun Sunarso, 1998: 34):

- a. Padat penduduk jarak rumah sangat berdekatan, kondisi rumah serta lingkungan yang tidak sehat;
 - b. Sarana sanitasi dasar yang tidak memadai;
 - c. Rawan penyakit dan pencemaran;
 - d. Penghasilan penduduk relatif rendah dan pekerjaan disektor informal;
 - e. Perilaku masyarakat, seperti gotong royong tinggi, senasib dan mudah; digerakkan serta kurangnya pengetahuan tentang hidup sehat;
 - f. Jangkauan pelayanan kesehatan dari pemerintah lebih.
- Bergel merumuskan daerah kumuh atau *slum area* yaitu: daerah kumuh sebagai suatu kawasan permukiman yang di atasnya terletak bangunan-bangunan berkondisi substandar, yang dihuni oleh penduduk miskin yang padat (Mumu Suherlan, 1996: 33);
- Suprijanto Riyadi (1993) : mengemukakan batasan arti daerah kumuh, yaitu daerah dengan jumlah penduduk yang padat, dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah, keberhasilan lingkungan yang buruk (jalan, sumber air bersih, saluran pembuangan) (Mumu Suherlan, 1996: 33);
- Ari Indrayana Mahar (1993) mengemukakan bahwa: permukiman kumuh adalah suatu istilah yang mengacu kepada suatu istilah yang mengacu pada suatu permukiman dengan fasilitas dan penataan serta penggunaan ruang-ruangnya yang mengungkapkan kondisi kurang mampu atau miskin dari penghuninya yang mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi

Definisi yang ada di atas tersebut dapat dirumuskan bahwa permukiman kumuh dan liar adalah sejumlah perumahan yang disebut kumuh apabila keadaannya tidak tertata dengan baik, kemudian terdapat jumlah penduduk yang padat, dan bentuk fisik bangunannya tidak sesuai untuk syarat bertempat tinggal sehingga lingkungan permukiman terkesan kumuh karena tidak memenuhi standar untuk bertempat tinggal ditunjang pula oleh tingginya resiko terhadap penularan penyakit dan pencemaran lingkungan. Disebut permukiman liar karena menempatkan bangunan tempat tinggalnya/rumahnya berada pada tanah negara/milik orang lain yang bulan hak miliknya.

Menurut A. A. Laquaian, mengemukakan beberapa karakteristik daerah kumuh, yaitu (Mumu Suherlan, 1996: 33) :

1. Permukiman tersebut dihuni oleh penduduk yang padat dan berjubel; karena adanya pertumbuhan penduduk alamiah maupun migrasi yang tinggi dari pedesaan;
2. Perkampungan tersebut dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah atau memproduksi subsistem yang hidup di bawah garis kemiskinan;
3. Perumahan di permukiman tersebut berkualitas rendah atau masuk dalam kategori kondisi rumah darurat (*sub standart housing conditions*), yaitu bangunan rumah yang terbuat dari bahan-bahan tradisional, seperti bambu, kayu, alang-alang, dan bahan-bahan cepat hancur lainnya;
4. Kondisi kesehatan dan sanitasi yang rendah; perkampungan miskin memang selalu ditandai oleh tersebarnya penyakit menular dan lingkungan fisik yang jorok;
5. Langkanya pelayanan kota , seperti air minum, fasilitas mandi cuci kakus, listrik, sistem pembuangan kotoran dan sampah, serta perlindungan kebakaran;

6. Pertumbuhannya tidak terencana sehingga penampilan fisiknya tidak teratur dan terurus, dalam hal bangunan, halaman, dan jalan-jalan; sempitnya ruang antar bangunan, dan tidak ada ruang terbuka sama sekali;
7. Penghuni permukiman miskin ini mempunyai gaya hidup pedesaan karena sebagian besar penghuninya merupakan migran dari pedesaan yang masih mempertahankan pola kehidupan tradisional, seperti hubungan-hubungan yang bersifat pribadi, (bersuasana seperti di desa) dan gotong royong;
8. Munculnya perilaku menyimpang seperti pencurian, pelacuran, kenakalan, perjudian dan kebiasaan minum-minuman keras sebagai ciri lainnya perkampungan miskin tersebut. Tetapi karena permukiman lapisan masyarakat lainnya juga terjadi pola-pola perilaku menyimpang tersebut, maka kurang tepat kiranya bila hal itu dijadikan sebagai ciri khas permukiman miskin.

Suharno Saroyo (1991; juga mengemukakan karakteristik daerah kumuh adalah sebagai berikut (Mumu Suherlan, 1996: 35) :

- a. Penduduknya sangat padat;
- b. Mata pencaharian penduduknya tidak tetap;
- c. Tata letak perumahannya sempit dan pada umumnya tidak layak huni;
- d. Kondisi ekonomi penduduknya rendah sehingga tingkat kesehatan dan pendidikan pada umumnya juga rendah;
- e. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari kurang lancar karena kurangnya fasilitas yang mendukung termasuk penyediaan air bersih, penerangan, mandi cuci kakus, tempat pembuangan sampah, dan sebagainya;
- f. Jalan umum tidak teratur;
- g. Kondisi lingkungan yang kotor, sehingga banyak penyakit yang bersumber

dari keadaan lingkungan yang tidak sehat;

- h. Rawan dan cenderung menimbulkan berbagai masalah sosial, sehingga cenderung mengganggu ketahanan nasional.

Faktor-faktor penyebab adanya daerah/lingkungan menjadi kumuh yaitu seperti yang dijelaskan oleh Bunyamin Ranto, mengemukakan setidaknya ada enam faktor yang terkait dengan tumbuhnya daerah/lingkungan kumuh (Mumu Suherlan, 1996: 37) :

- a. Lokasi lingkungan kumuh;
- b. Terbatasnya pendapatan;
- c. Kurang kemampuan;
- d. Kurang layak pekerjaan;
- e. Tidak sesuai pendidikan atau ketrampilan;
- f. Masalah sosial budaya lainnya.

2.1.3 Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh

Penyebab utama tumbuhnya lingkungan kumuh antara lain terjadinya migrasi yang tinggi terutama bagi sekelompok masyarakat tertentu dan berpenghasilan rendah, yang biasanya berada didekat tempat bekerjanya. Mereka biasanya sudah betah tinggal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan permukiman.

Permukiman kumuh di perkotaan biasanya terdapat diatas tanah negara bekas tanah partikelir, tanah milik pemerintah kota yang sudah dikukuhkan dengan hak pengelolaan ataupun yang belum dikukuhkan, tanah bantaran sungai, tanah instansi pemerintah tanah milik PT. Kereta Api Indonesia dan sebagainya. kondisi lingkungan pada permukiman kumuh di atas tanah negara tanpa hak ini umumnya jauh lebih

buruk dibandingkan dengan yang terjadi pada tanah hak.

Sesuai dengan status tanah permukiman kumuh ini, maka sebagian besar penggarapannya dilakukan secara liar. Wilayah permukiman ini sama sekali tidak atau belum tersentuh oleh pembangunan fasilitas perkotaan. Ketiadaan kepastian hukum mengenai hak atas tanahnya, termasuk kemampuan ekonomi penghuninya yang relatif rendah, menyebabkan tidak adanya usaha penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi permukiman dan lingkungannya ataupun pindah ke lokasi yang lebih baik.

Keterikatan penduduk dengan lingkungan hunian yang ditempati terutama karena jaraknya yang dekat dengan tempat bekerjanya. Penghuni wilayah permukiman kumuh ini sebagian besar bekerja pada sektor informal, sehingga untuk dipindahkan ke lokasi lain, alasan keberatannya karena akan makin jauh antara tempat tinggal dengan tempat bekerjanya.

Meskipun para penghuninya menggarap atau menggunakan tanah negara secara tidak sah, ada beberapa diantara penahuni tersebut yang sudah begitu lama tinggal di tempat itu sehinga ada diantaranya yang sudah menjadi generasi berikutnya. Maka upaya pembebasan tanah terhadap penghuni liar pada wilayah-wilayah semacam itu umumnya mengalami banyak kesulitan. Upaya untuk melakukan penataan terhadap wilayah tersebut adalah sangat mendesak dan membutuhkan perhatian yang lebih serius. Selain itu perlu dilakukan upaya pencegahan secara dini agar tidak terjadi penggunaan tanah negara secara ilegal yang akan menjadi penyebab utama tumbuhnya daerah-daerah kumuh baru.

2.1.4 Karakteristik dan Tipologi Permukiman Kumuh

Lebih lanjut akan dijabarkan mengenai karakteristik dan tipologi permukiman kumuh.

2.1.4.1 Karakteristik Permukiman Kumuh

Ciri lingkungan permukiman kumuh secara umum ditandai oleh ketidakjelasan status lahan dan rendahnya kualitas sarana dan prasarana permukiman, antara lain:

- a. Tanah,
- b. Penghuni,
- c. Bangunan rumah,
- d. Sarana lingkungan
- e. Prasarana lingkungan,
- f. Sistem penghuni.

Bila dijabarkan lebih lanjut dengan meninjau perumusan yang dikeluarkan dalam Sidang BKN No. IV 1998/1990 tanggal 15 Februari 1990 menyatakan bahwa ciri-ciri lingkungan permukiman kumuh adalah sebagai berikut (Christina, 1999: 27):

- a. Tanah tempat berdirinya lingkungan permukiman kumuh dapat berupa tanah negara, tanah instansi, tanah perorangan atau Badan Hukum dan Yayasan.
- b. Penghuni lingkungan kumuh dapat terdiri dari pemilik tanah dan bangunan, pemilik bangunan di atas tanah sewa, penyewa bangunan tanpa termasuk tanahnya, atau pemilik/penyewa bangunan yang didirikan tanpa seijin pemegang hak atas tanahnya.
- c. Penggunaan bangunannya dapat untuk tempat hunian, tempat usaha atau campuran.
- d. Peruntukan penggunaan tanahnya menurut rencana kota dapat untuk perumahan, jalur pengaman atau untuk keperluan lain.
- e. Prasarana lingkungan biasanya kurang dan tidak memenuhi persyaratan teknis

dan kesehatan.

- f. Prasarana lingkungan biasanya tidak ada atau tidak lengkap memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan dengan tata letak yang tidak teratur.

Sedangkan menurut Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, tiga kondisi kekumuhan dapat dilihat dari status tanahnya, antara lain:

- a. Kawasan/lingkungan kumuh di atas tanah ilegal dengan kondisi tingkat kekumuhan dan kepadatan tinggi.
- b. Kawasan/lingkungan kumuh di atas tanah ilegal dengan tingkat kepadatan tinggi.
- c. Kawasan/lingkungan, kumuh di atas tanah legal (tidak terlalu kumuh/ padat).

Permukiman kumuh menurut M. Agung Ridlo (2001:24), merupakan wujud fisik yang erat kaitannya dengan kemiskinan di perkotaan yang memiliki karakteristik/ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kampung tumbuh dan berkembang secara organik (*Organic Pattern*) dengan kondisi perumahan di bawah standard. Kondisi fisik lingkungan dan bangunan yang sangat buruk dan tidak teratur, tidak memenuhi persyaratan teknis kesehatan, pelayanan sarana dan prasarana lingkungan serba kurang (air bersih, saluran air limbah dan air hujan, pembuangan sampah, dan lain-lain).
- b. Lingkungan permukiman kumuh merupakan lingkungan permukiman yang absah, legal dan permanen tetapi kondisi fisik lingkungannya semakin memburuk karena kurang pemeliharaan, umur bangunan yang menua, ketidak acuhan, atau karena terbagi-bagi menjadi unit pekarangan rumah atau kamar yang semakin kecil.
- c. Pada umumnya penduduknya mempunyai status sosial dan ekonomi rendah atau berpenghasilan di bawah standar.

- d. Kepadatan dan kerapatan bangunan yang lebih besar dari yang diijinkan dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi.
- e. Penduduk masih membawa sifat dan perilaku kehidupan perdesaan yang terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat.
- f. Kebanyakan penduduknya berpendidikan rendah, berstatus rendah dan mempunyai struktur keluarga yang tidak menguntungkan,
- g. Bahan-bahan bangunan yang digunakan adalah bahan bangunan yang bersifat semi permanen.
- h. Merupakan suatu kawasan yang mempunyai fungsi kota yang bercampur dan tidak beraturan yang merupakan kantong-kantong kemiskinan perkotaan yang rawan terhadap banjir.

2.1.4.2 Tipologi Permukiman Kumuh

Terdapat beberapa tipologi permukiman kumuh yang antara lain (Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002:7):

1. *Permukiman Kumuh Nelayan*, yaitu permukiman yang terletak di luar area antara garis pasang tertinggi dan terendah. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah nelayan dan atau yang terkait dengan nelayan. Alternatif pemecahannya berupa program rehabilitasi, renovasi, revitalisasi dan preservasi.

Komponen kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain:

- a. Perbaikan sarana dan prasarana.
- b. Pembangunan talud pencegah rob.
- c. Penanaman mangrove.

- d. Pengembangan alternative usaha.
 - e. Pengembangan lembaga keuangan komunitas.
 - f. Perbaikan rumah tinggal, pengembangan rumah produksi, dll.
2. *Permukiman Kumuh Dekat Pusat Kegiatan Sosial Ekonomi*, yaitu permukiman yang terletak di sekitar pusat-pusat aktivitas pelayanan sosial ekonomi, seperti halnya lingkungan industri, lingkungan pusat pelayanan ekonomi, lingkungan pendidikan atau kampus. Jenis mata pencaharian masyarakatnya terkait erat dengan domain kegiatan pusat sosial ekonomi terkait. Alternative pemecahannya adalah melalui program peremajaan, rehabilitasi dan renovasi. Kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain :
- a. Perbaikan sarana dan prasarana.
 - b. Pengembangan rumah susun sederhana (rusuna), rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
 - c. Perbaikan rumah sewa melalui dana bergulir.
3. *Permukiman Kumuh di Pusat Kota*, yaitu permukiman yang terletak di tengah kota (*urban core*) yang merupakan permukiman lama/kuno yang diindikasikan mempunyai warisan budaya tinggi dalam konfigurasi kota lama (*old city*). Jenis mata pencaharian masyarakatnya beragam, diantaranya adalah buruh, pedagang kecil, wiraswasta, industri rumah tangga, jasa transportasi dan lain-lain. Alternatif pemecahan dapat melalui program rehabilitasi, renovasi, rekonstruksi, restorasi dan preservasi . Adapun komponen kegiatan meliputi:
- a. Perbaikan sarana dan prasarana.
 - b. Pengembangan dana bergulir perbaikan rumah tinggal.
 - c. Perbaikan kegiatan usaha.

- d. Pelatihan pelestarian bangunan dan lingkungan bersejarah.
4. *Permukiman Kumuh di Pinggiran kota*, yaitu permukiman yang terletak di luar pusat kota (*urban fringe*), yang umumnya merupakan permukiman yang tumbuh dan berkembang sebagai konsekuensi dari perkembangan kota, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Jenis mata pencaharian masyarakatnya buruh, pedagang kecil, wiraswasta, industri rumah tangga, jasa transportasi dan lain-lain. Alternatif pemecahannya antara lain melalui program rehabilitasi dan renovasi. Adapun komponen kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain meliputi:
- a. Perbaiki sarana dan prasarana.
 - b. Pengembangan dana bergulir perbaikan rumah tinggal.
 - c. Perbaiki kegiatan usaha.
5. *Permukiman kumuh di Daerah Pasang Surut*, yaitu permukiman yang terletak di area antara garis pasang tertinggi dan terendah yang secara berkala selalu terendam air pasang. Sebagian tipe bangunan yang ada adalah tipe panggung dengan jalan titian sebagai penghubung antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lainnya. Sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah nelayan atau yang terkait dengan nelayan, namun kegiatan yang tidak terkait langsung dengan penangkapan ikan dilakukan di luar kawasan. Alternatif pemecahannya antara lain melalui program rehabilitasi, renovasi, revitalisasi dan preservasi. Adapun komponen kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain meliputi :
- a. Perbaiki pembangunan sarana dan prasarana dengan teknologi khusus.
 - b. Pengembangan alternatif usaha.
 - c. Pengembangan lembaga keuangan komunitas.
 - d. Perbaiki rumah tinggal, pembangunan rumah produksi, dll.

6. *Permukiman Kumuh di Daerah Rawan Bencana*, yaitu permukiman yang terletak di area rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir. Alternatif pemecahannya antara lain melalui program resettlement, rehabilitasi dan renovasi. Adapun komponen kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain meliputi:

- a. Perbaikan pembangunan sarana dan prasarana dengan teknologi khusus.
- b. Pengembangan alternatif usaha.
- c. Pengembangan lembaga keuangan komunitas.
- d. Perbaikan rumah tinggal, dll.

7. *Permukiman Kumuh Di Tepi Sungai*, yang meliputi dua tipe, yaitu:

a. Tipe pertama, yaitu permukiman kumuh yang terletak di luar garis sempadan sungai baik yang bertanggung maupun tidak. Alternatif pemecahannya berupa program perumahan. Adapun komponen kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah:

- Perbaikan pembangunan sarana dan prasarana
- Penataan kembali bangunan dan lingkungan
- Pembangunan alternatif usaha
- Pengembangan lembaga keuangan komunitas.
- Perbaikan rumah tinggal, dll.

b. Tipe Kedua, yaitu permukiman kumuh lama yang secara historis berada di area badan sungai bagian tepi sampai dengan tepi sungai karena menempatkan sungai sebagai sarana transportasi vital. Tipe bangunan yang ada adalah rakit, panggung dan bidang lantai langsung berhubungan dengan tanah. Alternatif pemecahannya antara lain melalui program rehabilitasi renovasi, rekonstruksi,

restorasi dan preservasi. Adapun komponen kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain meliputi:

- Perbaikan pembangunan sarana dan prasarana dengan teknologi khusus
- Pengembangan dana bergulir perbaikan rumah tinggal
- Pelestarian dan pemanfaatan kembali bangunan bersejarah untuk fungsi baru
- Perbaikan kegiatan usaha
- Pelatihan pelestarian bangunan dan lingkungan bersejarah.

2.1.4.3 Klasifikasi Permukiman Kumuh

Untuk mengidentifikasi jenis/tipe kawasan permukiman kumuh maka dilakukan penggolongan atau klasifikasi, hal ini digunakan sebagai langkah dalam penanganan selanjutnya pada kawasan tersebut agar mudah mengenali dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi di kawasan permukiman kumuh.

Prof. Eko Budihardjo mengklasifikasikan permukiman kumuh berdasarkan pada karakter fisik dan aspek legalitasnya, ada dua jenis permukiman kumuh yaitu :

- Kategori *Slum*, yaitu kawasan kumuh tetapi diakui sah sebagai daerah permukiman;
- Kategori *Squatter Settlement*, yaitu: pemukiman kumuh liar, yang menempati lahan yang tidak ditetapkan untuk kawasan hunian, misalnya: di sepanjang pinggir rel kereta api, di pinggir kali, di kolong jembatan, di pasar, di kuburan, di tempat pembuangan sampah, dan lainnya. Dari segi legalitasnya, kategori permukiman liar (*squatter*) ini umumnya menempati lahan yang bukan dalam hak penguasaannya misalnya pada lahan kosong yang ditinggal pemiliknya atau pada lahan kosong milik negara.

Dalam hal yang sama Taylor (dalam Suparlan, 1995: hal 92-95) juga melakukan penggolongan terhadap wajah dari masing-masing perkampungan melarat dan kelompok gubuk-gubuk liar di perkotaan ke dalam sekurang-kurangnya 4 (empat) tipe, yaitu :

- Kampung-kampung perumahan di tengah kota
- Daerah penghuni gubuk-gubuk liar di tengah kota
- Daerah-daerah penghuni gubuk liar di pinggiran kota
- Tempat-tempat penghuni liar yang terapung

Nampaknya Taylor melakukan penggolongan terhadap permukiman liar berdasarkan lokasinya dimana mereka berada dalam suatu kota, di pusat kota atau di pinggiran (*periphery*), namun tidak kesemua penggolongan yang dibuatnya (ke-empat golongan) secara lengkap dijumpai dalam sebuah kota. Taylor juga tidak membedakan dari aspek legalitasnya, hal ini penting terutama bagi pemerintah di dalam menangani masalah permukiman atau perumahan di bawah standar di kota.

Sementara Siswono dalam bukunya membagi 3 (tiga) tipe perumahan yang tidak teratur di perkotaan, yaitu Tipe Kampung, Tipe Perumahan Liar dan Tipe Permukiman Kumuh (yang berupa kampung dan perumahan liar).

- *Tipe Kampung*, berbeda dengan tipe perumahan liar, yaitu pada status pembangunan rumahnya. Rumah-rumah kampung dibangun di atas tanah yang telah dimiliki, disewa, atau dipinjam dari pemiliknya. Pembangunan rumah di kampung dilakukan dengan setahu dan seijin pemilik tanahnya, sedangkan rumah-rumah di perumahan liar dibangun secara ilegal, tanpa setahu dan seijin pemilik tanahnya. Rumah-rumah di kampung ada yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adapula yang tidak. Kampung merupakan lingkungan

masyarakat yang sudah mapan, yang terdiri dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, yang pada umumnya kondisi sarana dan prasarannya kurang memadai.

- *Tipe Perumahan Liar*, biasanya tumbuh agak jauh dari jalan kendaraan, terletak di pinggir-pinggir sungai, bantaran sungai, di sepanjang jalan kereta api, di sekitar pasar, di sekitar stasiun kereta api, dan di daerah rendah yang sering banjir. Daerah-daerah tersebut pada umumnya berupa tanah yang belum dipergunakan, ditinggalkan, atau tidak diawasi lagi oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Penghuni merupakan pendatang dari pedesaan dan kota-kota lainnya dan berpenghasilan rendah sekali. Mereka tinggal dengan gubuk-gubuk, tetapi kadang ada pula yang dibangun secara permanen.
- *Tipe Permukiman Kumuh*, berupa kampung dan perumahan liar yang ditempati oleh masyarakat berpenghasilan rendah bahkan sangat rendah, dengan kepadatan penduduk dan bangunan yang sangat tinggi (beberapa ratus hingga ribu orang perhektar), dengan kondisi rumah dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan maupun persyaratan teknis, dengan pola yang tidak teratur karena tidak direncanakan lebih dahulu, dan besarnya kota sangat berpengaruh terhadap kepadatan permukiman kumuh tersebut. Lokasi permukiman kumuh semakin dekat dengan pusat kota semakin tinggi kepadatan penduduknya. Ciri yang cukup menonjol dari permukiman kumuh ini adalah fungsinya sebagai daerah transisi antara kehidupan pedesaan dengan kehidupan kota, atau sebagai pusat proses terjadinya urbanisasi.

Dari klasifikasi perumahan tidak teratur yang dibuat Siswono et.al. ternyata terdapat kesulitan dalam membedakan istilah “kampung” karena pemakaian kata

kampung juga berlaku baik di perkotaan maupun di pedesaan, sementara kondisi fisik dan aspek legalitas keduanya juga dijumpai pada kawasan perkampungan.

Berdasarkan lokasinya, lingkungan permukiman kumuh ini dibagi ke dalam 5 (lima) kelompok menurut Siswono, yaitu :

- *Pertama*, yang berada pada lokasi yang sangat strategis dalam mendukung fungsi kota yang menurut rencana kota dapat dibangun untuk komersial atau pelayanan masyarakat kota yang baik;
- *Kedua*, yang lokasinya kurang strategis dalam mendukung fungsi kota dan memberi pelayanan kepada masyarakat kota. Meskipun dalam rencana kota untuk dijadikan kawasan komersial namun kurang memiliki berpotensi;
- *Ketiga*, lokasinya tidak strategis dan menurut rencana kota hanya boleh dibangun untuk perumahan;
- *Keempat*, permukiman kumuh yang berada pada lokasi yang menurut rencana kota tidak diperuntukkan bagi perumahan,
- *Kelima*, permukiman kumuh yang berada pada lokasi yang berbahaya, yang menurut rencana kota disediakan untuk jalur pengaman, seperti bantaran sungai, jalur jalan kereta api, dan jalur tegangan listrik.

Dari beberapa klasifikasi permukiman kumuh tersebut di atas ternyata yang cukup mudah diidentifikasi perbedaannya terhadap kondisi permukiman kumuh di perkotaan adalah menurut klasifikasi Budiharjo (1997) yang membedakan ke dalam dua kelompok kategori permukiman yaitu permukiman yang slum dan squatter. Hal yang sama juga ditandakan oleh Mc Gee dalam bukunya mengenai Kota Asia Tenggara (dalam Suparlan, 1995: 92) bahwa perlu dibedakan ke dalam dua kelompok antara kampung dengan kelompok penghunian liar sebagai jenis yang nyata dari

daerah-daerah perumahan di bawah standar di kota. Memang tepat bila kelompok gubuk-gubuk liar tersebut dicap sebagai “kampung” (meskipun tidak selalu demikian), tetapi karena tempat-tempat itu umumnya terdiri dari gubuk-gubuk lapuk tanpa fasilitas prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai, seperti, listrik, air bersih, sanitasi dan jalan lingkungan yang wajar, maka dapatlah mereka dibedakan dengan kampung-kampung yang kumuh (*slum*) yang sangat padat penduduknya namun mempunyai “hak milik berdasarkan hukum”. Secara teknis, penghuni-penghuni liar (*squatter*) telah begitu saja menyerobot tanah dan mendirikan tempat tinggal secara melanggar hukum serta melanggar hak-hak atas tanah milik, suatu fakta yang merupakan masalah sulit bagi pemerintah kota.

Memang, semua kampung tidak dilengkapi dengan prasarana atau sarana yang memadai, lebih-lebih dengan makin dipadatnya kampung itu oleh para pendatang, mengakibatkan keadaan lingkungan kampung menjadi makin merosot. Menurut Herlianto (Kompas, 1981) keadaan penduduk makin berjubel dan bangunan-bangunan makin padat; keadaan jalan umumnya makin parah dan tidak lagi mencukupi; selokan-selokan sudah tidak lagi mampu berfungsi sehingga mudah mengakibatkan banjir; keadaan tempat mandi cuci maupun kakus (MCK) makin gawat, dengan makin banyaknya orang; kurangnya sumber air minum makin dirasakan, masalah pembangunan sampah dan kesehatan lingkungan menjadi gawat.

2.2 Permukiman Nelayan

Masyarakat nelayan mempunyai ciri-ciri yang spesifik. Sebagai komunitas yang mempunyai orientasi ke laut, corak kehidupan sosial ekonominya dan pranata-pranata sosial yang terlembagakan dengan sendirinya telah mengalami proses adaptasi ke laut. Bentuk institusi dari masyarakat nelayan dengan sendirinya berbeda

dengan masyarakat petani dengan orientasinya yang ke darat misalnya (Masyhuri, 1998: 51).

Pada studi pengembangan penataan kawasan permukiman nelayan kota dan desa yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dijelaskan bahwa tentang petunjuk teknis pembangunan perumahan nelayan, batasan-batasan perumahan nelayan adalah sebagai berikut (Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, 2001: 90):

- Perumahan nelayan merupakan kelompok rumah pada suatu kawasan, dengan luasan tertentu yang dihuni oleh masyarakat yang sebagian besar mempunyai mata pencaharian menangkap ikan, minimal 60 % dari jumlah penduduk yang ada;
- Permukiman nelayan tersusun atas satuan-satuan lingkungan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman serta biaya bangunan dapat dijangkau masyarakat.

Apabila dirumuskan permukiman nelayan adalah suatu lingkungan dimana masyarakat yang tinggal pada permukiman tersebut mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dan permukiman tersebut cenderung berorientasi mendekati pesisir laut.

Adaptasi atau penyesuaian diri pada lingkungan merupakan suatu tindakan yang strategis dalam upaya memaksimalkan kesempatan hidup. Perilaku adaptif tersebut dalam rentang waktu yang cukup lama menggejala, yang pada tahap berikutnya mentradisi dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan. Pranata sosial dari masyarakat nelayan terbentuk berlandaskan dari tradisi-tradisi tersebut, dengan demikian lingkungan yang spesifik seperti halnya lingkungan laut untuk

masyarakat nelayan (Masyhuri, 1998: 61).

Nelayan adalah suatu individu atau sekelompok orang yang bermata pencaharian pokok menangkap ikan di laut, di danau, atau di sungai. Dilihat dari geografi menunjukkan bahwa desa-desa nelayan merupakan daerah-daerah mempunyai potensi hasil ikan yang cukup tinggi. Adapun kegiatan menangkap ikan tersebut dipasarkan untuk konsumen lokal dan juga dipasarkan keluar daerah dan apabila dilihat dari strategis, desa nelayan merupakan daerah-daerah rawa dan pertanian bahkan tambak (pembibitan ikan).

Adapun kondisi lingkungannya mempunyai pola tertentu, dengan unsur-unsur utama berupa:

- Tempat penjemuran hasil tangkapan ikan;
- Tempat menambat perahu;
- Tempat penjualan ikan atau pelelangan ikan;
- Tempat permukiman atau perumahan masyarakat nelayan.

Kondisi tersebut masing-masing berbeda, hal ini berkaitan dengan pembinaan pada suatu daerah. Di samping potensi tersebut juga terdapat areal untuk tambak, untuk peternakan ikan. Namun demikian perlu diketahui bahwa nelayan atau petani ikan dalam melakukan kegiatan sehari-hari masih tradisional yang dimaksud disini adalah masih tergantung sekali pada alam sehingga dampaknya terlihat pada siklus kehidupannya yang khas bagi masyarakat nelayan.

Mengingat pola berfikir nelayan yang masih sederhana serta rendahnya tingkat pendapatan keluarga nelayan pada umumnya dan ketrampilan untuk melaksanakan pemugaran rumah dan lingkungannya agak kurang. Hal ini dikarenakan sulitnya memperoleh bahan bangunan lokal yang dapat dimanfaatkan

untuk pemugaran rumah dan lingkungan, sehingga mengakibatkan kondisi permukiman nelayan tidak sehat dan tidak teratur letaknya.

Kebijaksanaan dan program pembinaan perumahan nelayan didasarkan atas tiga kelompok tipologi desa sebagai berikut :

- Kelompok desa nelayan yang terbelakang atau kritis, kondisi sosial, ekonomi masyarakat nelayan ini pada umumnya adalah rendah sekali dan keadaan fisik perumahan dan lingkungannya tidak memenuhi syarat baik teknik maupun kesehatan disamping itu partisipasi masyarakat untuk pembangunan sangat rendah atau tidak memungkinkan sama sekali. Desa nelayan atau krisis ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :
 1. Ladang perikanannya tidak memungkinkan dikembangkan. Dalam hal ini maka pembinaan rumahnya perlu dikaitkan dengan program transmigrasi atau program permukiman kembali (*resettlement*) pada daerah-daerah yang sumber perikanannya dapat meningkatkan taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik;
 2. Ladang perikanannya masih baik, dan dapat dikembangkan. Untuk itu pembinaan perumahan dapat dikembangkan dan diarahkan pada program perbaikan prasarana lingkungan (*kampoong improvement program*).
- Kelompok desa sedang atau menengah atau transisi kondisi sosial, ekonomi dan fisik lingkungan desa lebih baik dari pada kondisi terbelakang atau kritis, kondisi perumahan, prasarana lingkungannya dan fasilitas lingkungan pada umumnya telah ada akan tetapi keadaannya masih diperbaiki. Partisipasi masyarakat pada tipologi desa ini, dinilai cukup baik, baik dari segi tenaga, biaya ataupun yang lainnya oleh karena itu dalam rangka penataan rumah nelayan di desa diusulkan

berupa program perbaikan sarana lingkungan;

- Kelompok desa maju kondisi sosial, ekonomi dan fisik lingkungan desa ini cukup baik, tetapi dalam perkembangan masih perlu diarahkan dan dikembangkan. Dan untuk pembinaan desa maju perlu percontohan rumah dan prasarana lingkungan sehat ataupun pembangunan rumah-rumah baru (rumah inti dan sub-inti) (Christina Yulianti, 1999: 26).

Karakteristik permukiman nelayan merupakan gambaran keadaan yang ada pada permukiman tersebut. Pada studi pengembangan penataan kawasan permukiman nelayan kota dan desa yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, dijelaskan bahwa menurut keputusan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, permukiman nelayan berdasarkan karakteristiknya disimpulkan parameternya sebagai berikut (Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, 2001: 41- 47):

Tabel II.1
Karakteristik Pemukiman Nelayan

NO	PARAMETER	KARAKTERISTIK
1.	Umum	Merupakan permukiman yang terdiri atas satuan-satuan perumahan, yang memiliki berbagai sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan dan penghidupan penghuninya.
2.	Lokasi Geografis	Berdekatan atau berbatasan langsung dengan perairan, dan memiliki akses yang tinggi terhadap kawasan perairan.
3.	Pekerjaan penduduk	60 % dari jumlah penduduk merupakan nelayan, dan pekerjaan lainnya yang terkait dengan pengolahan dan penjualan ikan
4.	Sarana	Memiliki berbagai sarana yang mendukung kehidupan dan penghidupan penduduknya sebagai nelayan, khususnya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan eksplorasi ikan dan pengolahan ikan.
5.	Prasarana	Memiliki berbagai prasarana yang mendukung penghidupan penduduknya sebagai nelayan, khususnya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan eksplorasi ikan dan pengolahan ikan.

*Sumber : Studi Pengembangan Penataan Kawasan Permukiman Nelayan Kota Dan Desa
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, 2000.*

2.3 Peremajaan Perumahan dan Permukiman

Peremajaan menurut Undang-Undang No. 10/1992 tentang Perumahan dan Permukiman, merupakan kegiatan dengan perombakan mendasar bersifat menyeluruh dan memerlukan peran serta masyarakat secara menyeluruh pula.

Peremajaan kota mempunyai arti yang sama dengan *urban redevelopment* dan *Urban Renewal*, tetapi mempunyai pengertian berbeda. *Urban Redevelopment* adalah lebih menekankan pada aspek usaha-usaha peningkatan, sedangkan *urban renewal* mengarah pada usaha pembaharuan yang lingkungannya lebih luas serta menyangkut berbagai segi kehidupan masyarakat (Sujarto, 2001:2).

Menurut Djoko Sujarto, pengertian Peremajaan Kota dapat dilihat dalam 3 (tiga) lingkup, yaitu:

- a. Peremajaan kota sebagai suatu proses, merupakan pengembangan kembali bagian wilayah kota yang telah terbangun, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta kegunaan bagian wilayah kota yang telah terbangun.
- b. Peremajaan kota sebagai suatu fungsi, merupakan kegiatan untuk menguasai, menata, dan merehabilitasi atau membangun kembali suatu bagian kota yang telah bobrok untuk dapat menampung kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan rencana kota yang telah ada.
- c. Peremajaan kota sebagai suatu program, merupakan bagian dari suatu kegiatan pelaksanaan pembangunan kota yang terkoordinir dan terpadu.

Peremajaan kota tidak hanya dimaksudkan sebagai cara untuk mengembalikan stabilitas nilai tanah dan bangunan, meskipun memang hal ini akan terjadi. Peremajaan kota juga tidak dimaksudkan untuk mencegah investasi dalam tanah karena sebagian besar dari kota-kota yang menua memberikan deviden kepada

pemiliknya yang entah peremajaan kota juga tidak dimaksudkan untuk memperoleh kembali kerugian spekulatif, karena beban kerusakan telah menimpa tanah dan bangunan mereka yang tidak mampu untuk ikut memperkuat birokrasi pemerintah, dan juga tidak dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja (Gallion, 1992:150).

Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan rusak merupakan dasar untuk peremajaan. Upaya menghilangkan kerusakan dan mencegahnya merupakan alasan bagi penggunaan prinsip *eminent domain* untuk mengambil alih dan menyatukan lokasi-lokasi bagi perkembangan swasta, untuk pengeluaran dana pemerintah termasuk dana-dana yang dihasilkan dari pajak dan bagi penerapan pengendalian dalam kawasan proyek (Gallion, 1992:133).

Kerusakan suatu kawasan yang diremajakan meliputi (Gallion, 1992:134):

1. Kerusakan struktural

Kerusakan struktural ini dikenakan pada bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk tempat tinggal perdagangan, industri, atau penggunaan lain yang tidak sesuai atau tidak aman untuk ditempati dan dapat menyebabkan penyebaran penyakit, kematian anak, kenakalan remaja dan kejahatan, karena salah satu atau kombinasi dari faktor-faktor berikut:

- Rancangan dan karakter konstruksi fisik yang buruk;
- Pengaturan ruang dalam dan ruang luar yang salah;
- Kepadatan penduduk yang tinggi dan terlalu padat;
- Kurangnya penyediaan ventilasi, cahaya, sanitasi, ruang terbuka, dan fasilitas rekreasi;
- Umur, keusangan kemunduran, percampuran, sifat atau pergantian penggunaan.

2. Kerusakan ekonomi

Kerusakan ekonomi merupakan hak milik yang menderita pergeseran lokasi ekonomi, kemunduran atau tidak dipergunakan karena salah satu atau lebih faktor-faktor berikut:

- Pergeseran lokasi ekonomi, kerusakan, atau tidak dipergunakan karena perencanaan yang salah.
- Subsidi kawasan dan penjualan persil yang tidak teratur dan luas yang tidak cukup untuk penggunaan dan pengembangan yang baik.
- Peletakan persil tanpa mengindahkan garis ketinggian dan karakteristik topografi atau fisik lainnya dari lahan tersebut dan kondisi sekitarnya.
- Kekurangan prasarana, fasilitas umum, ruang terbuka dan utilitas yang tidak dapat diperbaiki oleh tindakan-tindakan swasta maupun pemerintah tanpa peremajaan.
- Penurunan nilai, investasi yang tidak memadai, serta ketidaksesuaian sosial ekonomi.
- Keberadaan persil-persil atau kawasan-kawasan lain yang terkena bahaya banjir, sedangkan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya seharusnya dilestarikan.

2.3.1 Jenis-jenis Peremajaan Kota

Peremajaan kota pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan vitalitas, nilai sosial ekonomis, kemampuan, nilai produktivitas serta kualitas fisik suatu atau beberapa bagian wilayah kota atau kawasan fungsional kota dari suatu kota. Untuk upaya ini maka jenis-jenis peremajaan kota meliputi (Djoko Sujarto 2001:9-10):

- *Rehabilitasi* yaitu suatu perbaikan melalui suatu pembangunan kembali secara menyeluruh menyangkut unsur-unsur fisik maupun fungsional suatu bagian atau

kawasan fungsional kota. Suatu rehabilitasi fungsi pada umumnya yang dikembangkan merupakan peningkatan dari fungsi yang sama sebagaimana sebelumnya, tetapi di dalam rehabilitasi juga akan terjadi peningkatan prasarana dan sarana baru yang dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi yang telah ada tersebut. Contohnya adalah perbaikan kampung, perbaikan prasarana lingkungan, perbaikan sungai-sungai, perbaikan suatu pusat perbelanjaan, perbaikan perumahan kota.

- *Renovasi* yaitu perbaikan struktural dari suatu bagian wilayah kota atau kawasan fungsional kota dengan tetap memelihara struktur fisik asal untuk menghilangkan kekumuhan atau degradasi fungsional dan fisiknya. Pada renovasi pada umumnya hanya terbatas kepada peningkatan struktur dan kualitas fisik sehingga tampilannya dapat dikatakan tetap. Contohnya adalah perbaikan bangunan-bangunan yang telah ada.
- *Preservasi* yaitu pelestarian suatu bagian wilayah kota atau kawasan fungsional kota dari nilai-nilai asal karena memiliki fungsi tertentu yang bernilai sosial budaya, sosial ekonomis, sosial politik atau fisik. Pada preservasi pada dasarnya hanya meningkatkan pelestarian struktural yang telah ada dengan cara pemeliharaan dan pengamanan struktural. Contohnya adalah pelestarian wilayah, kawasan atau bangunan bernilai sejarah atau bernilai arsitektur.
- *Konservasi* yaitu suatu perlindungan suatu bagian wilayah atau kawasan fungsional kota sehingga dapat terjaga dari kemungkinan degradasi serta gangguan alam maupun artifisial yang dapat membahayakan atau merusak nilainya secara sosial budaya, sosial ekonomis, sosial politik maupun fisik. Pada konservasi dimungkinkan untuk menghilangkan suatu struktur tertentu atau menambah

struktur baru demi menjaga keamanan, kelanggengan dan kelestarian suatu bagian wilayah atau kawasan fungsional tertentu dari kemungkinan gangguan lingkungan alam atau upaya manusia. Contoh pengamanan tebing-tebing dalam kota, normalisasi dan pengamanan sungai-sungai, pencegahan longsor dan penghutan kota.

- Jentifikasi yaitu, peningkatan fungsi dari suatu bagian wilayah kota atau kawasan fungsional kota tertentu sebagai kompensasi atau pengganti bagi suatu bagian wilayah kota atau kawasan fungsional kota tertentu lainnya yang telah mengalami degradasi atau menjadi kumuh.

2.3.2 Peremajaan Permukiman Kumuh

Peremajaan permukiman kumuh adalah pembongkaran sebagian atau seluruh permukiman kumuh yang sebagian besar atau seluruh permukiman berada di atas tanah negara dan kemudian di tempat yang sama dibangun prasarana dan fasilitas lingkungan rumah serta bangunan-bangunan lainnya sesuai dengan rencana tata ruang kota yang bersangkutan (Instruksi Presiden RI No.5 Th.1990).

Peremajaan permukiman kota adalah segala upaya dan kegiatan pembangunan yang terencana untuk mengubah atau memperbaharui suatu kawasan terbangun di kota yang fungsinya sudah merosot atau tidak sesuai dengan perkembangan kota (Kantor Menteri Perumahan Rakyat, 1990), sehingga kawasan tersebut dapat meningkat kembali fungsinya dan menjadi sesuai dengan perkembangan kota. Peningkatan fungsi dalam peremajaan kota dimaksudkan untuk memperbaiki tatanan sosial ekonomi di kawasan bersangkutan agar lebih mampu menunjang kehidupan kota secara lebih luas.

Peremajaan harus dapat memecahkan kekumuhan secara mendasar, karenanya tidak hanya memberi alternatif pengganti lain yang pada kenyataannya dapat menimbulkan kekumuhan di tempat lain dan menjadikan beban baru bagi masyarakat.

Peremajaan harus tanpa menggusur dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Sehingga peremajaan yang antara lain dengan perbaikan fisik dipakai sebagai suatu alat untuk peningkatan taraf hidup, yang sekaligus mampu memperbaiki pula kondisi fisik kota sejalan dengan program nasional penanggulangan kemiskinan.

Kondisi ini menuntut adanya keterlibatan semua pihak dalam proses peremajaan. Tanpa adanya proses *self help* dalam peremajaan, bantuan pemerintah kurang dapat memecahkan persoalan kekumuhan secara mendasar. Proses *self help* mengarahkan pada partisipasi, dimana partisipasi merupakan kunci keberhasilan program pembangunan. Pembinaan organisasi komunitas hendaknya diarahkan pada pengembangan sifat-sifat kooperatif terhadap permukiman dan kesiapan untuk tinggal dalam kehidupan perkotaan khususnya *inner city*. Pengorganisasian ini diarahkan sejak proses perumusan masalah, perencanaan, *design engineering*, sampai dengan implementasinya secara berkelanjutan.

2.4 Program Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh

Program perbaikan lingkungan dan peremajaan kota melalui pemukiman kembali, peningkatan prasarana dan sarana lingkungan, pembangunan rumah susun, pembangunan rumah sewa, pembangunan pondok boro, merupakan upaya-upaya untuk memecahkan masalah permukiman kumuh. Pertanyaannya adalah seberapa

besar pemerintah campur tangan dalam penyediaan perumahan dan permukiman bagi golongan miskin?. Di satu pihak, pemerintah dituduh tidak terlalu banyak berbuat dan mengabaikan orang miskin. Di pihak lain pemerintah diserang karena campur tangannya yang keliru, akibat biaya hidup meningkat dan prakarsa penduduk dihancurkan, mengakibatkan *slum of despair* (Jellinek, 1994: 172). Namun dengan adanya perubahan paradigma keberpihakan pemerintah pada masyarakat kelas bawah, membangkitkan kembali ekonomi kerakyatan, sektor informal, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menjadikan kawasan kumuh itu mempunyai potensi sebagai suatu daerah yang penuh harapan, dikatakan sebagai *slum of hope*.

Untuk itu upaya yang cukup strategis adalah dengan melibatkan masyarakat berpartisipasi dalam mengatasi masalah permukimannya dan mengikutsertakan badan-badan sosial, organisasi-organisasi masyarakat *non profit* dan para developer dalam usaha perbaikan lingkungan permukiman kumuh, dengan keberpihakan pada masyarakat golongan berpenghasilan rendah.

Konsep pelaksanaan program perbaikan permukiman melalui Kampung Improvement Program (KIP) yang ditangani pemerintah pada awalnya cukup sederhana (Panuju, 1999: 187). Untuk meningkatkan kondisi fisik lingkungan perumahan kumuh yang sarannya adalah :

- a. Mengurangi genangan air di waktu hujan atau pasang surut (rob), dengan cara memperbaiki sistim saluran drainase dan pengerasan jalan-jalan dalam kampung;
- b. Meningkatkan pengadaan air bersih, dengan cara pemasangan kran-kran umum di beberapa tempat;
- c. Mengurangi gangguan sampah, dengan memperbaiki sistem pewardahan dan pembuangan sampah melalui pengadaan gerobak, tong, dan bak sampah.

- d. Meningkatkan kondisi sanitasi lingkungan, dengan cara pembangunan fasilitas mandi, cuci dan kakus.

Dalam penanganan penataan permukiman kumuh yang dilakukan Pemerintah (di antaranya oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah) tidak semua kampung dapat diperbaiki. Untuk itu perlu disusun kriteria untuk menentukan prioritas kawasan yang akan ditangani dengan mempertimbangkan pedoman umum sebagai berikut :

1. Lokasinya bisa berada atau tidak berada pada peruntukan perumahan dalam Rencana Umum Tata Ruang /Rencana Detail Tata Ruang Kota atau Kabupaten. Dalam hal tidak pada peruntukan perumahan, perlu dilakukan review terhadap rencana tata ruang atau rencana turunannya.
2. Kondisi lingkungan permukimannya sangat kumuh (langka prasarana/sarana dasar, sering kali tidak terdapat jaringan jalan lokal ataupun saluran pembuangan)
3. Kepadatan nyata diatas 500 jiwa/ha untuk kota besar dan sedang, dan diatas 750 jiwa/ha untuk kota metro.
4. Lebih dari 60 % rumah tidak/kurang layak huni, dengan angka penyakit akibat buruknya lingkungan permukiman cukup tinggi (infeksi saluran pernapasan atas, diare, penyakit kulit dan lain-lain).
5. Intensitas permasalahan sosial kemasyarakatan cukup tinggi (*urban crime*, keresahan serta kesenjangan yang tajam, dan lain-lain).

Kondisi yang ada di kawasan ini memenuhi kriteria tersebut di atas untuk segera ditangani sehingga prioritasnya sangat *urgent* untuk diatasi. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah upaya untuk mempertahankan keberlanjutan hasil penataan permukiman di kawasan tersebut dalam arti tetap menumbuhkan sikap partisipatif

terhadap keberlanjutan penanganan program penataan permukiman kumuh di perkotaan.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penataan permukiman kumuh ini adalah harus dikaitkannya dengan usaha mengatasi kelemahan mereka sebagai kelompok sosial dengan tujuan memperkuat eksistensi masyarakat kampung, yaitu dengan memberi peran yang lebih esensi dalam kehidupan kota yang akan memberi manfaat ganda. **Pertama**, meningkatkan ketahanan penduduk miskin kota terhadap krisis. **Kedua**, menyelesaikan problem sosial di lingkungan masyarakat kota.

2.4.1 Penataan Permukiman Kumuh dengan Konsep Tridaya

Program penataan lingkungan permukiman didefinisikan sebagai “kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan harkat masyarakat berpenghasilan rendah, yang dilakukan melalui penataan dan perbaikan kualitas yang lebih menyeluruh terhadap kawasan hunian yang sangat kumuh”.

Melalui kegiatan tersebut masyarakat difasilitasi dan distimulasi untuk secara bersama memperbaiki kehidupan dan penghidupannya. Untuk itu penataan kembali keseluruhan kawasan hunian kumuh tersebut diberikan sebagai kegiatan fasilitasi dan stimulasi, yang dilaksanakan berazaskan :

- **Tridaya** sebagai satu kesatuan upaya, artinya setiap paket bantuan program kegiatannya mencakup 3 (tiga) fokus garapan manusia dengan memperhatikan tatanan sosial kemasyarakatan, penataan lingkungan fisik dan kualitas hunian, serta pengembangan kegiatan usaha ekonominya.
- Pemberdayaan artinya setiap kegiatan yang dilakukan, diarahkan pada suatu

proses pemampuan, penggalian sumber daya lokal serta pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk berperan sebagai pelaku utama.

- Perhatian dan keberpihakan dengan menempatkan aspirasi, kepentingan serta keputusan masyarakat sebagai acuan penyusunan program dan kegiatan. Salah satu kunci dalam upaya meremajakan kawasan permukiman kumuh ini adalah penyediaan lahan yang dapat menjamin keberadaan masyarakat untuk tetap dekat dengan lingkungan/sumber pendapatannya.
- Percepatan proses memukimkan masyarakat yang memerlukan, pada rumah yang lebih layak dan lingkungan yang lebih tertata dan prospektif dengan cara yang berkelanjutan. Proses mana ditempuh melalui cara yang terjangkau dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, antara lain fasilitasi penyediaan rumah sewa, penyediaan bantuan bergulir untuk memugar rumah. Melalui Keputusan Presiden nomor 05/92 Pemerintah memfasilitasi proses pemukiman kembali masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh diatas tanah negara.
- Sebaiknya dilaksanakan sebagai kegiatan '*multi years*', artinya kegiatan ini akan lebih sempurna apabila dilaksanakan secara sekuensial, diawali dengan persiapan sosial kemasyarakatan yang matang, dipandu oleh adanya rencana tindak komunitas (*community action plan*) berjangka menengah atau 5 tahun.

2.4.1.1 Maksud Program Tridaya

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perkampungan di daerah perkotaan, melalui penataan kembali lingkungan perumahan,
- Mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih memberikan perhatian terhadap

upaya peningkatan kualitas permukiman, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang tinggal di kawasan permukiman kumuh, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

2.4.1.2 Tujuan Program Tridaya

- Mewujudkan kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan yang lebih tertib, tertata dan terencana, sebagai bagian dari kawasan perkotaan atau perdesaan.
- Mendorong percepatan peningkatan kemampuan perangkat pelaksana pembangunan serta kemampuan swadaya masyarakat.
- Memberikan kepastian hukum dalam bermukim (*security of tenure*) melalui penataan dan penggunaan lahan permukiman secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

2.4.1.3 Sasaran Program Tridaya

- FUNGSIONAL adalah tercapainya masyarakat yang mandiri memenuhi kebutuhannya akan rumah layak dalam lingkungan sehat, tertib dan terencana, dan melembaganya pembangunan perumahan dan permukiman menjadi gerakan yang mengakar pada karsa masyarakat.
- SASARAN OPERASIONAL adalah Peningkatan kembali kondisi dan fungsi kawasan perkotaan yang menurun produktifitas maupun kualitas pemanfaatannya karena berbagai sebab, penghapusan atau pengurangan kawasan permukiman kumuh di perkotaan maupun perdesaan secara rasional dan konsepsional,

- SASARAN LOKASI adalah lingkungan permukiman kumuh di perkotaan dan perdesaan, baik yang berlokasi pada peruntukan perumahan dalam RUTR, pada tanah/lahan illegal, atau pada daerah bantaran banjir.

2.4.1.4 Pengembangan Program Tridaya

Penekanan kegiatan pendampingan masyarakat dalam pembangunan prasarana lingkungan permukiman adalah melalui model (Dinas Permukiman dan Tata Ruang Proinsi Jawa Tengah, 2001; Pendampingan Masyarakat Pelaksanaan Tridaya) :

- Pemberdayaan masyarakat dalam program dan pendanaan didukung oleh pemerintah terutama dalam pembiayaan pembangunan.
- Perbaiki lingkungan dan permukiman dengan partisipasi aktif masyarakat.
- Memampukan masyarakat merupakan pilihan awal dan penting untuk memulai proses “melibatkan” masyarakat dalam proses pembangunan.
- Masyarakat sebagai peran utama adalah lebih tepat daripada masyarakat sebagai penonton.
- Masyarakat lebih efektif bila diberi contoh dari pada diminta untuk berbuat.

Kegiatan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman yang memadukan aspek TRIDAYA mencakup aspek manusia, aspek lingkungan dan aspek ekonomi, adalah sebagai berikut :

a. Pemberdayaan Manusia

- Memberikan dorongan percaya diri untuk dapat berkembang dan masyarakat mempunyai arti penting dalam pembangunan yang akan dan sedang dilakukan.

- Pembangunan sumber daya manusia melalui jenis kegiatan yang dapat dikembangkan secara sosial ekonomi.
- Masyarakat akan menyadari bahwa untuk dapat membangun dan bukan hanya menunggu bantuan, akan tetapi bagaimana menciptakan bantuan dan sekaligus berpartisipasi didalamnya.

b. Pemberdayaan Fisik Lingkungan

- Pengembangan sumber daya yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi lingkungan baik keluarga maupun masyarakat.
- Hasil yang dicapai dapat memecahkan permasalahan-permasalahan lingkungan perumahan dan permukiman.
- Kegiatan yang dilakukan dapat menciptakan suatu bentuk lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih baik.

c. Pemberdayaan Ekonomi/Usaha

- Kegiatan dapat memberikan dampak secara ekonomi bagi individu masyarakat, keluarga maupun masyarakat secara luas.
- Kegiatan yang dilakukan dapat berfungsi sebagai *income generating*.
- Kegiatan yang dilakukan dapat menjadi embrio bagi penciptaan lapangan kerja baru.

Aplikasi Tridaya telah distrukturkan dalam indikasi program pengembangan dalam 3 (tiga) dimensi pengembangan yaitu dimensi manusia (sosial budaya), ekonomi dan fisik lingkungan. Sesuai dengan harapan dari kegiatan pendampingan masyarakat dalam hal pengelolaan dan pengkoordinasian stakeholders yang terlibat, maka perlu disusun suatu bentuk kelembagaan yang mampu mengakomodasi pengembangan ketiga dimensi tersebut. Kelembagaan

ini yang juga akan menjadi wadah partisipasi dan kemitraan, yang secara khusus akan menyatukannya melalui institusi pengembangan bertumpu pada kelompok / komunitas. Secara khusus hal ini merupakan bagian dari *community-based institutional development*. Implementasi dari *community-based institutional development* ini diintegrasikan ke dalam pola kelembagaan yang sesuai dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat.

2.4.2 Rencana Induk Program Tridaya

Konsep penanganan yang diarahkan dalam kegiatan pengembangan tridaya adalah dalam bentuk rencana induk program yang dijabarkan untuk mendukung pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman yang bertumpu pada masyarakat. Muatan dalam rencana tersebut mencakup (Dinas Permukiman dan Tata Ruang Jawa Tengah, 2001 : Pendampingan Masyarakat Pelaksanaan Tridaya):

- Pengembangan masyarakat
- Pengembangan pola pengelolaan lingkungan pemukiman
- Pengembangan kegiatan usaha kelompok masyarakat
- Pengembangan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat
- Integrasi antara makro dan mikro

Secara khusus Indikasi Program Pengembangan lebih mencoba untuk menstrukturkan program secara substantif, yaitu :

- Pengembangan dalam dimensi ekonomi, yang juga mencakup penyediaan ruang dan kegiatan usaha kelompok masyarakat
- Pengembangan dalam dimensi sosial budaya, yang mencakup pengembangan masyarakat, kekerabatan dan psikologi masyarakat.

- Pengembangan dalam dimensi pembangunan fisik dan lingkungan, yang menjabarkan pengembangan pola pengelolaan lingkungan permukiman dan sebagainya.
- Pengembangan dalam dimensi institusi, yang menstrukturkan kelembagaan antara pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga terbina kemitraan yang kuat antar ketiganya.

2.5 Tingkat Kekumuhan

Pertumbuhan dan Perkembangan kota-kota di Indonesia menunjukkan kecenderungan terus menerus tumbuh dan berkembang sejalan dengan makin meningkatnya jumlah penduduk baik karena adanya tingkat migrasi yang tinggi ataupun perkembangan alamiah. Pertumbuhan dan perkembangan tersebut dapat dilihat antara lain dengan tumbuh dan berkembangnya kawasan-kawasan perumahan dan permukiman yang tersebar di berbagai bagian wilayah kota, baik yang direncanakan maupun tidak.

Kawasan permukiman yang direncanakan dengan baik (dalam skala kecil, menengah ataupun besar) pada umumnya dihuni oleh kelompok yang lebih mampu (menengah dan atas) dan difasilitasi dengan prasarana dan sarana lingkungan serta fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi yang memadai, sehingga dapat meningkatkan produktifitas perkotaan secara keseluruhan. Sedangkan kawasan perumahan dan permukiman yang tidak terencana dengan baik dalam bentuk kawasan hunian sub-standar, tidak layak huni, tidak teratur dan kumuh yang menempati lahan-lahan atau kantong-kantong permukiman baik yang legal maupun yang illegal, kawasan seperti ini pada umumnya dihuni oleh kelompok masyarakat yang kurang

mampu/miskin dan tidak difasilitasi dengan prasarana dan sarana serta fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas ekonomi yang tercukupi, sehingga cenderung bersifat *counter-produktif*, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak berupa penurunan kualitas lingkungan.

Berbagai rencana dan strategi dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan di daerah sudah dan masih dilakukan pemerintah secara terus menerus baik melalui berbagai program perbaikan maupun program peremajaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh, yaitu sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, pasal 27 ayat (2) bahwa upaya peningkatan kualitas permukiman dilaksanakan melalui perbaikan atau pemugaran, peremajaan serta pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan baik melalui program perbaikan maupun peremajaan, dana yang tersedia sangat terbatas sehingga perlu adanya skala prioritas guna mempermudah penanganan disuatu kawasan yang mendesak untuk ditangani.

Penyusun skala prioritas tersebut membutuhkan “**penilaian**” terhadap kawasan-kawasan yang akan ditangani dengan membuat suatu tingkatan kekumuhan, dimana masing-masing kawasan yang mempunyai tolak ukur atau kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tolak ukur atau kriteria penilaian kondisi permukiman kumuh tersebut terdiri dari indikator sebagai berikut :

- a. Aspek Kesesuaian Peruntukan (Tata Ruang) dan Luas Kawasan
- b. Aspek Status (Kepemilikan) Lahan
- c. Aspek Letak/Kedudukan Lokasi

d. Aspek Derajat Kekumuhan

1. Tingkat kepadatan penduduk
 2. Jumlah penduduk miskin
 3. Kegiatan usaha ekonomi penduduk di sektor informal
 4. Kepadatan rumah/bangunan
 5. Kondisi kelayakan hunian rumah (kualitas perumahan)
 6. Kondisi tata letak rumah/bangunan
 7. Kondisi sarana dan prasarana lingkungan
 8. Frekuensi timbulnya wabah penyakit (ISPA, diare, penyakit endemi, kematian bayi, dll)
 9. Bencana banjir/kebakaran yang terjadi di lokasi
 10. Kerawanan sosial (pencurian, pencopetan, perkelahian, pembunuhan, dll)
- Melalui indikator tersebut dicoba untuk disajikan tingkatan kekumuhan suatu wilayah, yang mendapat nilai tinggi berarti tingkat kekumuhannya besar, demikian pula sebaliknya.
 - Dari nilai di atas diperoleh hasil bagi antara total nilai dengan indikator. Untuk mengetahui tingkat kekumuhan digunakan nilai hasil bagi tersebut yaitu:
 - **Sangat Kumuh** dengan nilai antara 93,6 - 100
 - **Kumuh Berat** dengan nilai antara 70,2 - 93,6
 - **Kumuh Sedang** dengan nilai antara 46,8 - 70,2
 - **Kumuh Ringan** dengan nilai antara 23,4 - 46,8
 - **Tidak Kumuh** dengan nilai antara 0 - 23,4

2.6 Rangkuman Kajian Teori

Permukiman kumuh adalah permukiman tidak layak huni atau dapat membahayakan kehidupan penghuni, karena keadaan, keamanan, dan kesehatan memprihatinkan, kenyamanan dan keandalan bangunan di lingkungan tersebut tidak memadai, baik dilihat dari segi tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi, kualitas bangunan yang sangat rendah serta prasarana dan sarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat (Kamus Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya).

Permukiman kumuh berdasarkan pada karakter fisik dan aspek legalitasnya, ada dua jenis yaitu :

- a) *Slum Area*, yaitu kawasan kumuh tetapi diakui sah sebagai daerah permukiman;
- b) *Squatter Settlement Area*, yaitu: permukiman kumuh liar, yang menempati lahan yang tidak ditetapkan untuk kawasan hunian. Dari segi legalitasnya, kategori permukiman liar (*squatter*) ini umumnya menempati lahan yang bukan dalam hak penguasaannya.

Bentuk-bentuk program peremajaan permukiman kumuh antara lain:

- a) Program Perbaikan Kampung (*Kampoong Improvement Program /KIP*)
- b) Perbaikan Lingkungan Kawasan Pasar (*Market Infrastructure Improvement Program/MIIP*).
- c) Konsolidasi Lahan (Land Consolidation/LC)
- d) Pembangunan Perumahan

Program perbaikan lingkungan permukiman kumuh menggunakan azas Tridaya sebagai satu kesatuan upaya, artinya setiap paket bantuan program kegiatannya mencakup 3 (tiga) fokus garapan manusia dengan memperhatikan

tatanan sosial kemasyarakatan, penataan lingkungan fisik dan kualitas hunian, serta pengembangan kegiatan usaha ekonominya.

Dalam perbaikan lingkungan permukiman kumuh perlu adanya penyusunan skala prioritas terhadap kawasan-kawasan yang akan ditangani dengan menyusun tingkat kekumuhan di masing-masing kawasan tersebut baik sebelum dan sesudah penanganan, guna mengevaluasi hasil dari program tersebut.

Berdasarkan kajian teori di atas, maka dalam penelitian ini, variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel II.2
Variabel Penelitian

No.	Variabel	Parameter	Sumber
1	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kekumuhan sebelum dan sesudah penataan - Perubahan tingkat kekumuhan sebelum dan sesudah penataan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legalitas tanah 2. Status penguasaan bangunan 3. Frekuensi kebakaran 4. Frekuensi banjir 5. Tingkat kepadatan penduduk 6. Rata-rata anggota rumah tangga 7. Jumlah KK tiap rumah 8. Tingkat pertumbuhan penduduk 9. Angka kematian kasar 10. Status gizi balita 11. Angka kesakitan malaria 12. Angka kesakitan diare 13. Angka kesakitan demam berdarah. 14. Angka kesakitan ISPA 15. Tingkat kualitas struktur bangunan 16. Tingkat kepadatan bangunan 17. Tingkat kesehatan dan kenyamanan bangunan 18. Tingkat penggunaan luas lantai bangunan 19. Tingkat pelayanan air bersih 20. Kondisi sanitasi lingkungan 21. Kondisi persampahan 22. Kondisi saluran air hujan 23. Kondisi jalan 24. Besarnya ruang terbuka 25. Tingkat kemiskinan 26. Tingkat pendapatan 27. Tingkat pendidikan 	<p>Departemen Kesehatan, DPU Cipta Karya A.A. Laquaian, Sunaryati Hartono,</p>

No.	Variabel	Parameter	Sumber
		28. Tingkat kerawanan dan keamanan	
2	Manfaat Penataan Lingk Permukiman menurut masyarakat	1. Lingkungan yang aman dan nyaman (Fisik Lingkungan) 2. Sosial Budaya (Masyarakat) 3. Ekonomi	DPU Cipta Karya, Djoko Sujarto
3	Hubungan antara perubahan tingkat kekumuhan dengan manfaat yang diperoleh menurut masyarakat	1. Sarana Prasarana 2. Permukiman	Djoko Sujarto, Gallion, Panuju

Sumber : Hasil Rangkuman Teori, 2005

BAB III

GAMBARAN UMUM PERMUKIMAN KUMUH NELAYAN BANDENGAN

3.1 Gambaran Umum Makro Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal secara geografis berada pada 19⁰40'-110⁰18' Bujur Timur dan 6⁰32'-7⁰24' Lintang Selatan dengan batas administrasi sebagai berikut :

Utara : Laut Jawa

Timur : Kota Semarang

Selatan : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang

Barat : Kabupaten Batang

Topografi wilayah Kabupaten Kendal terbagi atas dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah yang membentang hampir 25 km memiliki ketinggian berkisar antara 0-25 m di atas permukaan laut. Dataran ini berada pada bagian utara, sedangkan bagian selatan yang berjarak sekitar 30 km memiliki ketinggian berkisar antara 25 - 2.579 m di atas permukaan air laut. Luas wilayah Kabupaten Kendal mencapai 1.002,23 km², terdiri dari 17 kecamatan. Bagian utara terdiri dari Kecamatan Kaliwungu, Brangsong, Kota Kendal, Patebon, Pegandon, Cepiring, Kangkung, Rowosari dan Weleri. Delapan Kecamatan lain, yaitu Kecamatan Gemuh, Boja, Singorojo, Patean, Paguruyung, Sukorejo, Plantungan dan Limbangan berada di bagian selatan yang bertopografi berbukit.

Kabupaten Kendal memiliki beberapa jenis tanah yaitu :

- Alluvial, meliputi 29% dari luas wilayah kabupaten dengan warna kelabu, coklat, dan hitam dengan penggunaan utama tanah pertanian dan pemukiman.

- Latosol, meliputi 55% dari luas wilayah, warna kuning, coklat sampai merah dengan penggunaan utama sebagai tanah pertanian yang baik.
- Andosol dan Regosol, meliputi 8% wilayah Kabupaten Kendal, warna putih coklat kekuningan, coklat, kelabu atau hitam, dengan penggunaan utama sebagai pertanian dan perkebunan.

Secara umum Kabupaten Kendal memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata dalam lima tahun terakhir sebanyak 2.100 mm/tahun dan hari hujan sebanyak 117 hari setiap tahunnya, dimana pada Oktober-Mei untuk musim penghujan dan Juni-September untuk musim kemarau.

3.2 Gambaran Umum Kelurahan Bandengan.

3.2.1 Kondisi Kependudukan.

Jumlah penduduk Kelurahan Bandengan yang bersumber dari data monografi kelurahan Bandengan Tahun 2002, sebesar 3.972 jiwa yang terdiri dari 2007 jiwa laki-laki dan 1968 jiwa perempuan, yang tersebar dalam 4 dukuh, 3 Rukun Warga, dan 11 Rukun Tetangga (monografi kelurahan Bandengan tahun 2002). Berdasarkan struktur umurnya, pendudukan Kelurahan Bandengan terdiri dari struktur usia sekolah (5 – 20 tahun) sebesar 36.03% dan penduduk usia kerja sebesar lebih (20 – 50 tahun) kurang 33.16% dan sisanya (kurang dari 5 dan lebih dari 50 tahun) 30.82% adalah penduduk usia non produktif. Sedangkan kepadatan netto di Kelurahan Bandengan adalah sebesar 49,53 jiwa/Ha. Kondisi ini cukup padat. Mengingat sebagian besar wilayah kelurahan Bandengan berupa sawah berpengairan teknis, informasi yang lebih jelas mengenai kondisi kependudukan di Kecamatan Bandengan, dapat dilihat, pada tabel di bawah ini.

Tabel III.1
Kepadatan Penduduk Kelurahan Bandengan
Tahun 2000 – 2002

Kelompok Umur	Luas Daerah (Ha)	Tahun 2000				Tahun 2001				Tahun 2002			
		Laki-laki	Peremp.	Jumlah	Kpdt.	Laki-laki	Peremp.	Jumlah	Kpdt.	Laki-laki	Peremp.	Jumlah	Kpdt.
0 - 4	196873	364	331	695	283,27	386	252	738	266,77	416	373	709	277,68
5 - 9	196873	284	305	589	334,25	284	311	595	330,88	282	310	592	332,56
10 - 14	196873	248	243	491	400,96	253	245	497	396,12	23	246	448	439,45
15 - 19	196873	182	162	344	572,31	181	163	344	572,31	100	162	392	502,23
20 - 24	196873	169	159	328	600,22	168	161	329	598,40	167	181	328	600,22
25 - 29	196873	161	202	363	542,35	160	203	363	542,35	104	262	261	754,30
30 - 39	196873	226	229	455	432,69	218	226	444	443,41	216	226	442	445,41
40 - 49	196873	140	149	289	681,22	139	168	257	766,04	140	147	287	685,97
50 - 59	196873	150	116	266	740,12	147	112	259	760,13	143	109	252	781,24
60	196873	65	43	108	1822,90	60	37	97	2029,62	51	33	84	2343,73
Jumlah	196873	1989	1939	3928	50,12	1996	1958	3954	49,79	2007	1968	3975	1990

Sumber monografi kelurahan Bandengan tahun 2002

Pertumbuhan penduduk di Kelurahan Bandengan relatif stagnan, hal ini dapat dilihat dari angka pertumbuhan penduduknya yang relatif kecil, Pertumbuhan penduduk selama 3 tahun terakhir (2000 – 2002), menunjukkan pertumbuhan yang relatif kecil. Hal tersebut diantaranya dipengaruhi oleh keberhasilan program KB di samping banyaknya migrasi keluar dari Kelurahan Bandengan.

3.2.2 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Sebagai kondisi geografis, Kelurahan Bandengan yang terletak. Pada pantai utara Kabupaten Kendal, tipologi masyarakat adalah masyarakat nelayan. Penduduk Kelurahan Bandengan sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan dan buruh industri, hal ini karena letak kelurahan Bandengan yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa di bagian utara dan berdekatan dengan kawasan industri di Kabupaten Kendal.

3.2.3 Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk kelurahan Bandengan sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan sebesar 28,33% , hal ini dapat dilihat dari monografi kelurahan Bandengan tahun 2002. sektor yang lain kurang begitu berkembang karena wilayah Bandengan merupakan kawasan pantai atau pesisir.

Tabel III.2
Penduduk Bandengan Menurut Mata Pencaharian
Tahun 2000 - 2002

No	Jenis Pekerjaan	Tahun 2000		Tahun 2001		Tahun 2002	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Petani sendiri	55	2,05	55	2,05	55	2,05
2	Buruh tani	165	6,15	165	6,15	165	6,15
3	Nelayan	760	28,35	760	28,33	760	28,33
4	Pengusaha	15	0,56	15	0,56	15	0,56
5	Buruh industri	153	5,71	152	5,67	152	5,67
6	Buruh Bangunan	124	4,63	124	4,62	124	4,62
7	Pedagang	52	1,94	52	1,94	52	1,94
8	Pengangkutan	17	0,63	17	0,63	17	0,63
9	Pegawai negeri (sipil & ABRI)	25	0,93	25	0,93	25	0,93
10	Pensiunan	11	0,41	12	0,45	12	0,45
11	Lain Lain	1304	48,64	1306	48,68	1306	48,68
	Jumlah	2681	100,00	2683	100,00	2683	100,00

Sumber monografi kelurahan Bandengan tahun 2000 – 2002

3.2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

Struktur penduduk Kelurahan Bandengan menurut tingkat pendidikan menunjukkan kondisi yang kurang menggembirakan, karena hampir separuh dari penduduk Kelurahan Bandengan hanya mengenyam pendidikan dasar, dan bahkan pada tahun 2002 terdapat 21.64 % dari seluruh penduduk Kelurahan Bandengan tidak mampu menamatkan pendidikan dasar. Dan yang mampu menamatkan SLTP hanya 10.59 %

Tabel III.3
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2000 – 2002

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2000		Tahun 2001		Tahun 2002	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Tamat Akademi / PT	7	0,22	7	0,22	7	0,22
2	Tamat SLTA	158	4,88	182	5,70	182	5,70
3	Tamat SLTP	321	9,92	338	10,59	338	10,59
4	Tamat SD	892	27,57	934	29,25	934	29,25
5	Tidak Tamat SD	705	21,79	691	21,64	691	21,64
6	Belum Tamat SD	521	16,11	521	16,32	531	16,63
7	Tidak Sekolah	631	19,51	520	16,29	510	15,97
	Jumlah	3235	100,00	3193	100,00	3193	100,00

Sumber monografi kelurahan Bandengan tahun 2000 – 2002

3.2.5 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat

Kondisi penggunaan lahan di kelurahan Bandengan pada tahun 2002 meliputi jenis penggunaan lahan yang terbesar adalah tambak dengan luas 87.664 Ha atau (48,35 %) dari luas keseluruhan kelurahan tersebut. Hal ini sesuai dengan mayoritas mata pencaharian penduduk setempat yaitu sebagai petani tambak, yang memanfaatkan lahan yang ada di lingkungan mereka serta ditunjang oleh kemampuan masyarakat sebagai nelayan.

Memperhatikan pada kondisi sosial budaya masyarakat Kelurahan Bandengan seperti diuraikan diatas, diperlukan upaya mengatasi penurunan kualitas lingkungan permukiman, melalui pogram penataan permukiman nelayan. Program ini kiranya perlu mendapat kesepakatan diantara warga melalui “ rembug desa” sebelum dilaksanakannya, dan terdapat pioner atau pemrakarsa yang bersumber dari unsur eksekutif.

Perubahan penggunaan lahan di Kelurahan Bandengan relatif tidak ada perubahan, hal ini dilihat pada data penggunaan lahan pada tahun-tahun sebelumnya yang relatif tidak berubah, baik secara besaran ruang maupun besaran aktivitasnya.

Tabel III.4
Penggunaan Lahan di kelurahan Bandengan
Tahun 2002

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase
I	TANAH SAWAH		
a.	Irigasi Teknis	63.730	35,15
b.	Irigasi 1/2 Teknis	-	-
c.	Sederhana	-	-
d.	Tadah Hujan	-	-
II.	TANAH KERING		
a.	Pekarangan Bangunan dan Lain -	17.990	9,92
b.	Tegalan	1.456	0,80
c.	Padang Gembala	-	-
d.	Tambak	87.664	48,35
e.	Rawa	-	-
III	HUTAN NEGARA	-	-
IV	PERKEBUNAN	-	-
V	LAIN - LAIN (Sungai, jalan dll.)	10.476	5,78
	Jumlah	181.316	100,00

Sumber monografi kelurahan Bandengan tahun 2002

3.2.6 Kondisi Lingkungan Permukiman

Karakteristik kehidupan nelayan di kelurahan Bandengan yang cukup menonjol adalah sifat gotong royong mereka yang kental. Selama ada yang menggerakkan usaha bersama yang telah mereka sepakati bersama akan mengarah pada peningkatan kesejahteraan bersama selalu mendapatkan dukungan yang positif dari masyarakat.

Mengacu pada karakteristik masyarakat nelayan kelurahan Bandengan , Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal berupaya untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi serta pelaksanaannya didasarkan pada rembug desa yang telah disepakati, maka program ini dapat dipastikan mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat.

Tabel III.5
Kondisi Perumahan di Kelurahan Bandengan
Tahun 2001 – 2002

No.	Uraian	Tahun 1998	Tahun 1999	Tahun 2000	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
1	Permanen	521	528	527	540	552	550	540
2	Tidak permanen	130	137	148	157	175	197	230

Sumber survei kelurahan 2005

Melihat fenomena di atas ,tampak bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di kelurahan Bandengan dapat di golongan masih rendah , apabila dilihat dengan tolok ukur yang ada yaitu kualitas bangunan sebagai tempat tinggal. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah Kabupaten Kendal , mengingat potensi yang dimiliki Kelurahan Bandengan sebagai daerah pesisir yang mempunyai potensi ekonomi yang sangat prospektif di masa mendatang , namun kondisi lingkungan permukiman masih sangat memprihatinkan. Keadaan yang disebutkan diatas pada tahun 2001 dan 2002 diperburuk lagi dengan munculnya rumah – rumah non permanen yang dibangun oleh pendatang di bantaran Sungai Kendal yang melintang di tengah – tengah Kelurahan Bandengan.

3.2.7 Kondisi Fasilitas dan Utilitas Lingkungan

Untuk fasilitas pendidikan pada kelurahan ini hanya terdapat jenis fasilitas sekolah yaitu SD, TK, dan Madrasah Ibtidaiyah. Untuk SD berjumlah 3 sekolah dengan jumlah murid 600 orang, sedangkan untuk TK berjumlah 1 sekolah dengan jumlah murid 40 orang, dan untuk Madrasah Ibtidaiyah berjumlah 1 buah dengan murid 250 siswa. Untuk fasilitas sekolah SLTP dan SLTA belum dijumpai kerahan ini. Fasilitas dan utilitas kesehatan yang ada di Kelurahan Bandengan terdiri dari Puskesmas Pembantu, Perawat , dan bidan yang masing – masing terdiri dari satu

buah , sedangkan untuk dukun bayi sebanyak 2 orang. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi lingkungan , dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.6
Kondisi Sarana Di Kelurahan Bandengan Pada Tahun 2002

No	Jenis Fasilitas Lingkungan	Jumlah	Jumlah Murid
I.	SEKOLAH		
1	Taman Kanak-kanak	1	40
2	Sekolah Dasar	3	600
3	Sekolah Lanjutan Pertama	0	0
4	Sekolah Lanjutan Atas	0	0
5	Madrasah Ibtidaiyah	1	250
II.	KESEHATAN		
1	Puskesmas	1	-
2	Perawat	1	-
3	Bidan	1	-
4	Dukun Bayi	2	-
III.	TEMPAT IBADAH		
1.	Masjid	2	-
2.	Greja	-	-
3.	Kuil	-	-
4.	Mushola	6	-

Sumber : Monografi kelurahan Bandengan tahun 2002

Untuk utilitas lingkungan yang mencakup, jaringan jalan, air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi karena keterbatasan data, maka dalam laporan, dibatasi pada tiga komponen yang ada yaitu jalan , air bersih dan sanitasi.

1. Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia agar dapat melangsungkan kehidupannya. Sebagai salah satu komponen prasarana dasar pekerjaan umum, maka penyediaan air bersih yang memenuhi standar baku mutlak diperlukan. Kondisi pelayanan air bersih di kelurahan Bandengan, dapat dikatakan sudah baik dari sisi jangkauan pelayanannya. Sumber-sumber air bersih di kelurahan Bandengan terdiri dari air tanah dalam dan air tanah dangkal. Pelayanan air bersih juga disediakan oleh PDAM, dengan penyediaan jaringan air minum pada

kelurahan Bandengan. Dewasa ini jumlah pelanggan air bersih di kelurahan Bandengan berkisar 250 pelanggan dan ini perlu terus ditingkatkan oleh PDAM kabupaten Kendal. Kondisi prasarana air bersih yang tersedia di kelurahan Bandengan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.7
Kondisi Prasarana Air Bersih Di Kelurahan Bandengan 2002

No	Jenis Sumber Air Bersih	Jumlah Pengguna
1	PDAM	250
2	Sumur Gali	46
3	Artetis	4

Sumber : Kecamatan Kota Kendal Dalam Angka 2002

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kebutuhan air bersih di Kelurahan Bandengan sampai saat ini masih tercukupi / memadai.

2. Jalan

Kondisi jalan lingkungan di kelurahan Bandengan berupa jalan dengan lebar antara 1 meter hingga 3 meter dengan panjang sebelum tahun 2002 sepanjang 5,5 km dan terjadi penambahan jalan sesudah tahun 2002 menjadi 8 km. Kondisi jalan di kelurahan pada tahun 2001, 4 km berkondisi baik, 3 km berkondisi rusak sedang hingga rusak berat. Setelah terjadi penambahan panjang jalan di tahun 2003 jalan rusak berkurang menjadi 2 km. Hal ini menunjukkan bahwa, keadaan jalan di kelurahan Bandengan belum memadai karena terdapat jalan rusak yang memerlukan perbaikan. Untuk kelas jalan di kelurahan Bandengan terdiri dari berbagai kelas dan yang terpanjang adalah jalan kelas 5 dengan panjang 56,3 km, dan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.8
Kondisi Jalan Lingkungan Di Kelurahan Bandengan
Tahun 1998 – 2002

No.	Uraian	Tahun 1998	Tahun 1999	Tahun 2000	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
1	Panjang Jalan	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	8,0	8,0
2	Kondisi rusak	3,0	3,0	3,0	3,0	1,5	2,0	1,5

Sumber : Survei kelurahan 2005

3. Sanitasi Lingkungan

Sistem sanitasi yang ada di kelurahan Bandengan saat ini adalah sistem *on site* yang berupa jamban umum dan jamban keluarga jumlah 120 jamban (survei kelurahan Bandengan tahun 2005). Keberadaan sistem sanitasi lingkungan merupakan hal yang sangat kritis dimasa yang akan datang mengingat kondisi porositas tanah pada kelurahan bandengan yang sangat tinggi, sehingga apabila sistem sanitasi lingkungan tidak dikendalikan dikawatirkan dapat mencemari kondisi air tanah dikelurahan Bandengan.

3.3 Tinjauan Proses Penataan Permukiman Nelayan Bandengan

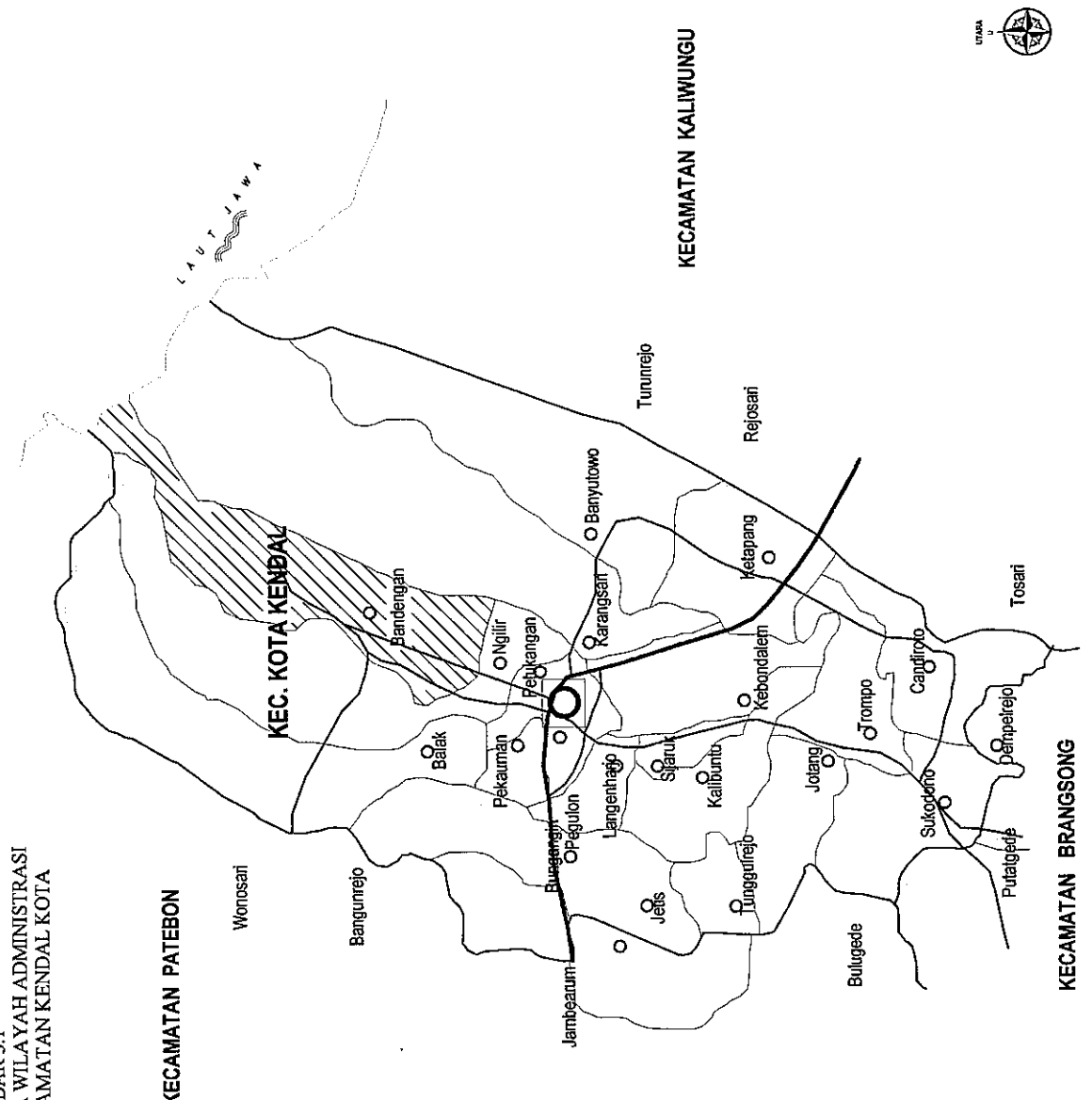
Penataan Permukiman Nelayan Kelurahan Bandengan Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal ini termasuk program prioritas Pemerintah Kabupaten Kendal yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :

- Memukiman kembali (*resettlement*) sebagai akibat permukiman lama menempati bantaran Sungai Kendal. Kegiatan permukiman ini perlu dilaksanakan secara integritas. Pendekatannya dilaksanakan dengan terpadu dan seimbang antara faktor-faktor teknis, sosial budaya dan ekonomi.
- Menata pemukiman legal yang berada pada koridor pusat kegiatan perekonomian

berupa Tempat Pelelangan Ikan

Pelaksanaan penataan permukiman nelayan Bandengan dimulai pada tahun 2001 yang terbagi menjadi tiga tahapan. Tahap pertama adalah studi kelayakan penataan permukiman nelayan, selanjutnya tahap kedua membahas tentang *Detail Engineering Design* penataan dan yang terakhir pelaksanaan pembangunan.

GAMBAR 3.1
PETA WILAYAH ADMINISTRASI
KECAMATAN KENDAL KOTA



MAGISTER TEKNIK PERBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

MANFAAT PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH
TERHADAP MASYARAKAT NELAYAN
KAWASAN BANDENGAN KABUPATEN KENDAL

PETA :
WILAYAH ADMINISTRASI
KECAMATAN KOTA KENDAL

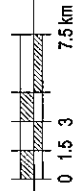
LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kabupaten
- Ibu kota Kabupaten
- Desa
- Sungai
- ▨ Wilayah Studi

Sumber :
LAPORAN STUDI KELAYAKAN, 2001
BAPEDA KENDAL



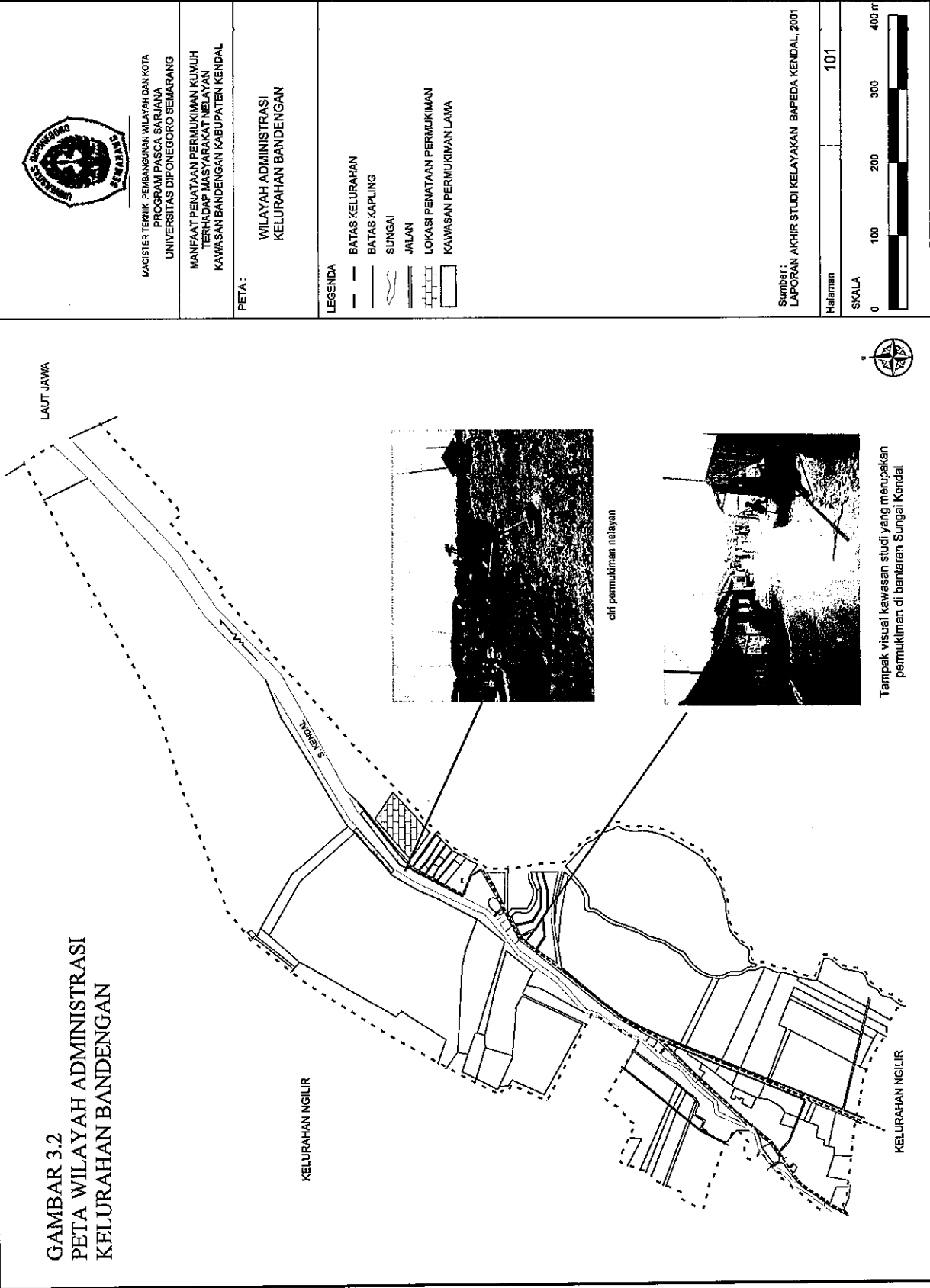
SKALA



HAJUTAN

1:200

GAMBAR 3.2
PETA WILAYAH ADMINISTRASI
KELURAHAN BANDENGAN



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
 PROGRAM PASCA SARJANA
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

MANFAAT PENYATAAN PERMUKIMAN KUMUH
 TERHADAP MASYARAKAT NELAYAN
 KAWASAN BANDENGAN KABUPATEN KENDAL

PETA :
 WILAYAH ADMINISTRASI
 KELURAHAN BANDENGAN

LEGENDA

- BATAS KELURAHAN
- BATAS KAPLING
- ~ SUNGAI
- == JALAN
- ▨ LOKASI PENATAAN PERMUKIMAN
- ▭ KAWASAN PERMUKIMAN LAMA

Sumber :
 LAPORAN AKHIR STUDI KELAYAKAN BAPEDA KENDAL, 2001

Halaman 101

SKALA

0 100 200 300 400 m



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

MANFAAT PENYATAAN PERMUKIMAN KUMUH
TERHADAP MASYARAKAT NELAYAN
KAWASAN BANDENGAN KABUPATEN KENDAL

PETA :

TATA GUNA LAHAN

LEGENDA

- BATAS KELURAHAN
- BATAS KAPLING
- ~ SUNGAI
- JALAN
- ▤ TAMBAK
- ▬ PERMUKIMAN LAMA
- RUMAH
- Ci = 1 m

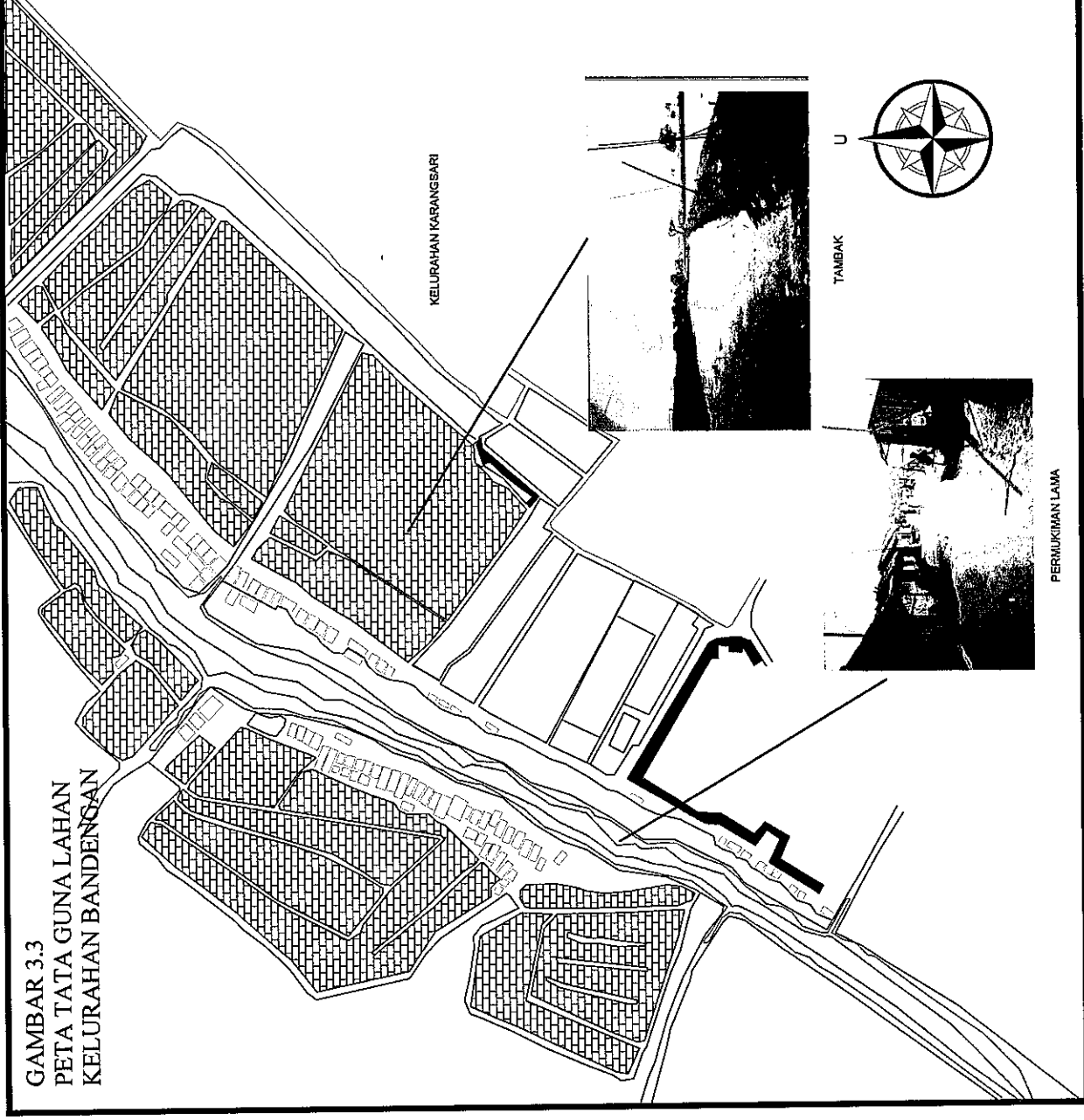
Sumber :
LAPORAN DETAIL ENGINEERING BAPEDA KENDAL, 2001

Halaman

102

SKALA

0 50 100 150 200 m



GAMBAR 3.3
PETA TATA GUNA LAHAN
KELURAHAN BANDENGAN



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
 PROGRAM PASCA SARJANA
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
 MANFAAT PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH
 TERHADAP MASYARAKAT NELAYAN
 KAWASAN BANDENGAN KABUPATEN KENDAL

PETA :

PETA PENATAAN PERMUKIMAN

LEGENDA

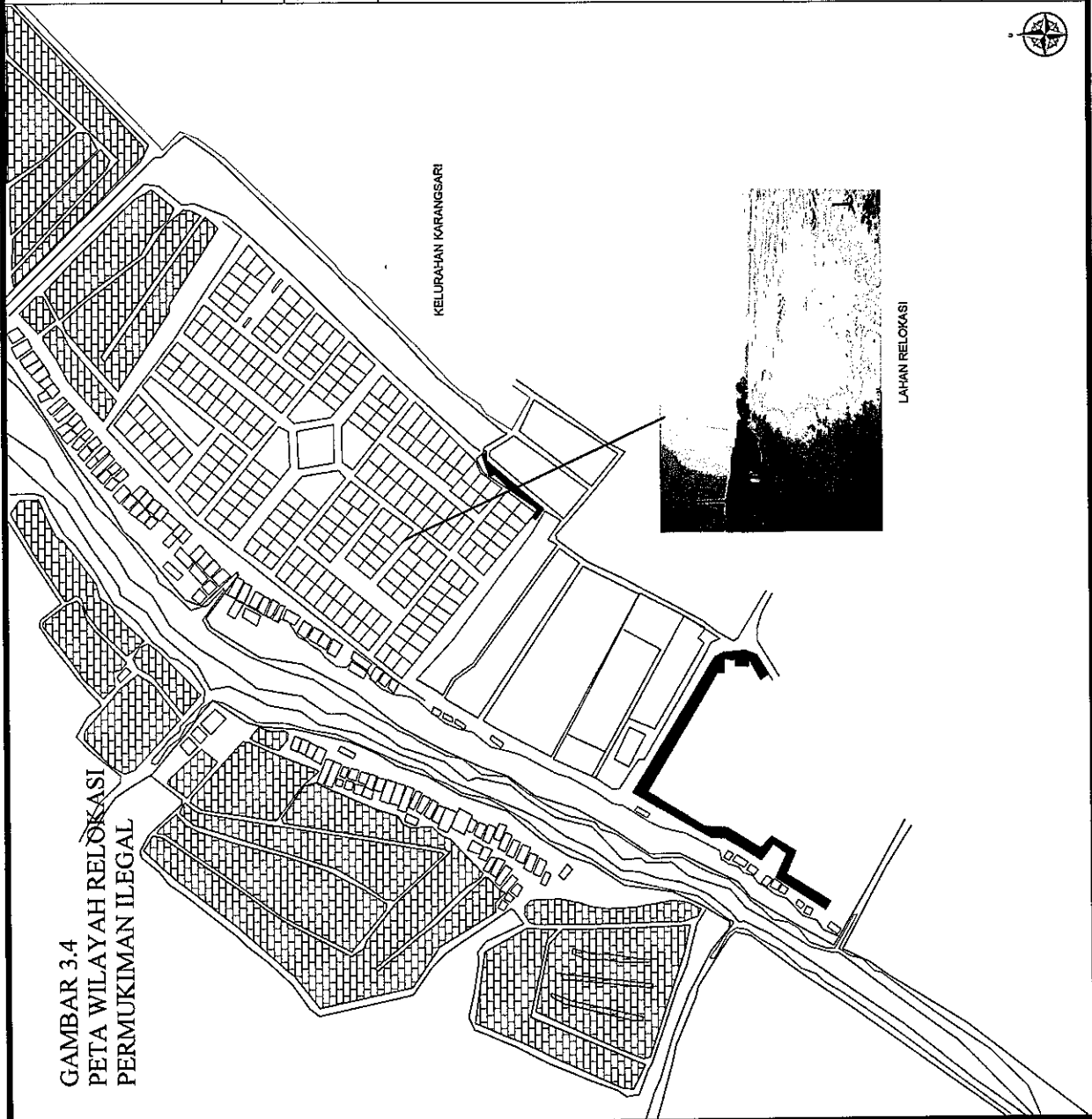
- BATAS KELURAHAN
- BATAS KAPLING
- SUNGAI
- JALAN
- TAMBAK
- PERMUKIMAN LAMA
- RUMAH
- Ci = 1 m
- RENCANA TAPAK

Sumber :
 LAPORAN DETAIL ENGINEERING BAPEDA KENDAL, 2001

Halaman 103



GAMBAR 3.4
 PETA WILAYAH RELOKASI
 PERMUKIMAN ILEGAL



BAB IV

ANALISIS PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN NELAYAN BANDENGAN KABUPATEN KENDAL

4.1 Analisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Nelayan Bandengan Sebelum Penataan

Karakteristik permukiman nelayan Bandengan sebelum penataan yaitu lingkungan kawasan permukiman berada di pinggiran Kota Kendal dihuni oleh mayoritas masyarakat nelayan. Kehidupan masyarakat nelayan Bandengan yang telah membentuk suatu kegiatan, dimana penduduk melaksanakan kelangsungan hidupnya di permukiman tersebut.

Dari hasil survey dan pengolahan data terhadap 29 indikator yang ada sebelum penataan lingkungan permukiman kumuh, maka didapatkan nilai masing-masing indikator seperti tersaji dalam tabel IV.1 :

TABEL IV.1
Nilai masing-masing indikator sebelum penataan

No	Indikator	Data Tahun 1998	Kriteria Penilaian	Hasil Penilaian Indikator
1.	Legalitas tanah - Luas wilayah (ha) - Luas permukiman pada lahan bukan perumahan (ha)	196,87 17,50	$\frac{\text{Luas perkim pd lahan bukan perumahan}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$	8,89
2.	Status penguasaan bangunan - Jumlah KK yg menempati bangunan dg cara menyewa/mengontrak - Jumlah KK	124 842	$\frac{\Sigma \text{ KK menyewa/mengontrak}}{\Sigma \text{ KK}} \times 100\%$	14,73
3.	Frekuensi bencana kebakaran	1	Jumlah kejadian kebakaran dalam satu tahun	1
4.	Frekuensi bencana banjir	1	Jumlah kejadian banjir dalam satu tahun	1
5.	Frekuensi bencana tanah longsor	0	Jumlah kejadian tanah longsor satu tahun	0
6.	Tingkat Kepadatan Penduduk - Jumlah penduduk (jiwa) - Luas Wilayah (ha)	3.827 196,87	$\frac{\Sigma \text{ penduduk}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$	1.943,92
7.	Rata-rata anggota rumah tangga - Jumlah penduduk (jiwa)	3.827	$\frac{\Sigma \text{ penduduk}}{\Sigma \text{ KK}}$	4,54

No	Indikator	Data Tahun 1998	Kriteria Penilaian	Hasil Penilaian Indikator
	- Jumlah KK	842		
8.	Jumlah Kepala Keluarga (KK) per rumah/Bangunan - Banyaknya KK dlm satu wil - Jumlah bangunan rumah	842 651	$\frac{\text{Banyak KK}}{\Sigma \text{ bangunan rumah}}$	1,29
9.	Tingkat pertumbuhan penduduk - Jumlah penduduk akhir tahun - Jumlah penduduk awal tahun	3870 3827	$\frac{\Sigma \text{ penduduk akhir th} - \Sigma \text{ penduduk awal th}}{\text{penduduk awal tahun}} \times 100\%$	1,12
10.	Angka kematian kasar - Jumlah kematian	50	$\frac{\Sigma \text{ kematian selama 1 tahun}}{\Sigma \text{ penduduk}} \times 1000$	13,15
11.	Status gizi balita - Jumlah balita di bawah garis merah - Jumlah balita	10 27	$\frac{\Sigma \text{ balita di bawah garis merah}}{\Sigma \text{ balita}} \times 100\%$	37,04
12.	Angka kesakitan malaria - Jumlah penderita malaria dlm 1 tahun	0	$\frac{\Sigma \text{ penderita malaria}}{\Sigma \text{ penduduk}} \times 1000$	0
13.	Angka kesakitan diare - Jumlah penderita diare	61	$\frac{\Sigma \text{ penderita diare}}{\Sigma \text{ penduduk}} \times 1000$	15,94
14.	Angka kesakitan demam berdarah - Jumlah penderita	0	$\frac{\Sigma \text{ penderita demam berdarah}}{\Sigma \text{ penduduk}} \times 1000$	0
15.	Angka kesakitan ISPA - Jumlah penderita	0	$\frac{\Sigma \text{ penderita ISPA}}{\Sigma \text{ penduduk}} \times 1000$	0
16.	Tingkat kualitas struktur bangunan - Jumlah rumah tidak permanen	130	$\frac{\Sigma \text{ bangunan rumah tidak permanen}}{\Sigma \text{ jumlah keseluruhan bang rumah}} \times 100\%$	130
17.	Tingkat kepadatan bangunan		$\frac{\Sigma \text{ bangunan rumah}}{\text{Luas wilayah}}$	3,31
18.	Tingkat bangunan rumah tdk layak huni/sehat - Jumlah rumah tidak sehat	213	$\frac{\Sigma \text{ bangunan rumah tidak sehat}}{\Sigma \text{ keseluruhan bang rumah}} \times 100\%$	32,72
19.	Tingkat penggunaan luas lantai bangunan rumah		$\frac{\Sigma \text{ bangunan rumah}}{\Sigma \text{ rata-rata anggota rumah tangga}}$	6,34
20.	Tingkat pelayanan air bersih - Jumlah KK yg tidak mendapat pelayanan air bersih	600	$\frac{\Sigma \text{ KK yg tidak mendapat pelayanan AB}}{\Sigma \text{ Kepala keluarga}} \times 100\%$	71,26

No	Indikator	Data Tahun 1998	Kriteria Penilaian	Hasil Penilaian Indikator
21.	Kondisi sanitasi lingkungan - Jumlah KK yg tidak menggunakan jamban	757	$\frac{\Sigma \text{KK yg tidak menggunakan jamban}}{\Sigma \text{Kepala keluarga}} \times 100\%$	89,9
22.	Kondisi Persampahan - Jumlah KK yang membuang sampah ke tempat yg bukan peruntukannya	842	$\frac{\Sigma \text{KK yg membuang sampah tdk pd tempatnya}}{\Sigma \text{Kepala keluarga}} \times 100\%$	100
23.	Kondisi saluran air hujan/drainase - Panjang sal drainase tdk lancar - Panjang total sal drainase	1,95 3,26	$\frac{\text{Panjang sal drainase tdk lancar}}{\text{panjang total sal drainase}} \times 100\%$	59,81
24.	Kondisi jalan - Panjang jalan rusak/rusak berat - Panjang total jalan lingkungan	9,77 21,7	$\frac{\text{Panjang jalan rusak/rusak berat}}{\text{panjang total jalan}} \times 100\%$	45,02
25.	Besarnya ruang terbuka - Luas ruang terbuka	0,5	$\frac{\text{Luas ruang terbuka}}{\text{Luas wilayah permukiman}} \times 100\%$	2,63
26.	Tingkat kemiskinan - Jumlah KK pra KS dan KS 1	385	$\frac{\Sigma \text{KK pra KS dan KS 1}}{\Sigma \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$	45,72
27.	Tingkat Pendapatan - Jumlah penduduk berpenghasilan di bawah UMK	450	$\frac{\Sigma \text{Kpenduduk berpenghasilan < UMK}}{\Sigma \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$	53,44
28.	Tingkat pendidikan - Jumlah penddk tidak tamat pendidikan dasar 9 th	705	$\frac{\Sigma \text{Kpenduduk berpenghasilan < UMK}}{\Sigma \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$	18,42
29.	Tingkat kerawanan keamanan - Jumlah kejadian tindak kriminal dalam 1 tahun	1	$\Sigma \text{Kejadian tindak kriminal dlm 1 tahun}$	1

Sumber: Hasil Analisa, 2005

Dari hasil perhitungan masing-masing indikator tersebut di atas, kemudian dimasukkan ke dalam kriteria sebagaimana disebutkan pada Tabel I.4 **Format Sebaran Hasil Penilaian Seluruh sub-Indikator** pada Bab. I, yang kemudian dituangkan pada Tabel IV.2 Hasil Perhitungan Sebelum Penataan Lingkungan sebagai berikut :

Tabel IV.2
Hasil Perhitungan Sebelum Penataan Lingkungan

Indikator	Nilai	Nilai Indikator (Nn)	Bobot (Bn)	Penilaian (Nn x Bn)	Bobot Persentase (%)	Hasil Penilaian ((Nn x Bn) x %)
1. Legalitas tanah	8,89	1	6	6		
2. Status penguasaan bangunan	14,73	2	5	10		
3. Frekuensi bencana kebakaran	1	2	4	8		
4. Frekuensi bencana banjir	1	2	3	6		
5. Frekuensi bencana tanah longsor	0	1	2	2		
JUMLAH SCORE				32	20	6,4
6. Tingkat kepadatan Pnddk	1943,89	5	3	15		
7. Rata-rata anggota rumah tangga	4,54	1	1,5	1.5		
8. Jumlah KK per rumah	1,29	2	2,25	4.5		
9. Tingkat pertambahan Penduduk	1,12	2	1,5	3		
10. Angka kematian kasar	13,15	2	1,5	3		
11. Status gizi balita	37.04	3	2,25	6.75		
12. Angka kesakitan malaria	0	1	0,75	0.75		
13. Angka kesakitan diare	15,94	2	0,75	1.5		
14. Angka kesakitan demam berdarah	0	1	0,75	0.75		
15. Angka kesakitan ISPA	0	1	8,75	8.75		
JUMLAH SCORE				45,5	15	6,8
16. Tingkat kualitas struktur bangunan	32,72	3	7,5	22.5		
17. Tingkat kepadatan bangunan	3,31	1	7,5	7.5		
18. Tingkat kesehatan dan kenyamanan bangunan	32,72	3	6,25	18.75		
19. Tingkat penggunaan luas lantai	6,34	4	2,5	10		
JUMLAH SCORE				48,8	25	15
20. Tingkat pelayanan air bersih	71,26	5	7,5	37.5		
21. Kondisi sanitasi lingkungan	89,9	5	7,5	37.5		
22. Kondisi persampahan	100	5	6	30		

Indikator	Nilai	Nilai Indikator (Nn)	Bobot (Bn)	Penilaian (Nn x Bn)	Bobot Persentase (%)	Hasil Penilaian ((Nn x Bn) x %)
23. Kondisi saluran air hujan	59,81	4	3	12		
24. Kondisi jalan	45,02	4	3	12		
25. Ruang terbuka	2,63	4	3	12		
JUMLAH SCORE				141	30	42
26. Tingkat kemiskinan	45,72	5	4	20		
27. Tingkat pendidikan	18,42	5	1,5	7,5		
28. Tingkat pendapatan	53,44	5	3,5	17,5		
29. Tingkat keamanan	1	2	1	2		
JUMLAH SCORE				47	10	4,7
JUMLAH TOTAL SCORE					100	75

Sumber: Hasil Analisa, 2005

Sesuai pengolahan data, didapat kawasan nelayan Bandengan sebelum adanya penataan memiliki Nilai Score tingkat kekumuhan adalah “75” ini berarti termasuk ke dalam kriteria “Kumuh Berat” yang memiliki nilai kekumuhan antara 70,2 – 93,6 (sesuai bab I).

Dari tingkat kekumuhan di atas diketahui bahwa lokasi yang diidentifikasi sebagai kawasan permukiman kumuh nelayan di Kabupaten Kendal mempunyai tingkat kekumuhan tinggi. Tingginya tingkat kekumuhan di kawasan tersebut dipengaruhi oleh salah satunya kondisi sarana dan prasarana yang tidak layak.

Kondisi permukiman nelayan Bandengan merupakan permukiman kelompok kumuh yang artinya pada permukiman ini perlu adanya perbaikan prasarana dan sarana yang ada, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kendal sudah sesuai karena permukiman tersebut perlu untuk dipindahkan. Jenis permukiman nelayan Bandengan berupa kawasan yang berada di pinggiran sungai, yaitu kawasan permukiman nelayan yang terletak pada suatu kawasan perbatasan daerah aliran

sungai, yang dalam hal ini adalah Sungai Kendal.



Gambar 4.1
Permukiman Nelayan Bandengan

Tempat tinggal masyarakat nelayan Bandengan berupa rumah-rumah yang didirikan masyarakat pada bantaran sungai yang selanjutnya akan ditata pada lokasi tersebut dengan program penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kendal

Apabila dilihat dari kondisinya karakteristik pola hidup masyarakatnya, pada permukiman nelayan Bandengan ini merupakan jenis permukiman nelayan perkotaan, karena lokasinya berdekatan dengan Kota Kendal. Perilaku masyarakat nelayan Bandengan mamiliki ciri yang tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Uang dari hasil yang telah didapat dari mencari ikan di laut cepat habis.

Permasalahan pada permukiman nelayan Bandengan terdapat pada kondisi nelayan Bandengan yang tampak kumuh dapat diketahui melalui keadaan lingkungan fisik permukimannya yang berupa bangunan rumah yang temporer serta berada pada sepadan sungai Kendal.

Permukiman nelayan tersebut tidak tertata karena didirikan secara berdekatan tidak ada jarak antar bangunan, selain itu juga berada pada tanah milik negara sehingga permukiman tersebut selain kumuh juga dapat dikatakan liar karena

perumahannya dibangun di atas tanah milik negara.

Keadaan sarana dan prasarana yang tidak memadai tersebut diakibatkan dari perekonomian masyarakat nelayan Bandengan yang tergolong masyarakat miskin sehingga tidak mampu membangun lingkungan fisik permukimannya. Kemiskinan masyarakat karena masyarakat nelayan Bandengan hidup dengan ekonomi yang lemah, karena penghasilan sebagai nelayan yang tidak menentu mengakibatkan masyarakat nelayan Bandengan tidak dapat meningkatkan perekonomiannya.

Sebagai kesimpulan dari analisa tingkat kekumuhan sebelum penataan kawasan diuraikan sebagai berikut ;

a. Aspek Lokasi,

Pada saat sebelum penataan pada aspek ini mempunyai nilai 6,4 % (lihat tabel IV.2 Hasil perhitungan sebelum penataan lingkungan) yang artinya dipandang dari indikator legalitas tanah, status penguasaan bangunan, frekuensi bencana banjir, kebakaran dan tanah longsor dapat diindikasikan sebagai kawasan yang cukup baik.

b. Aspek Kependudukan

Dalam penilaian analisis mempunyai nilai 6,8% (lihat tabel IV.2 Hasil perhitungan sebelum penataan lingkungan), dimana pada aspek ini yang dinilai adalah tingkat kependudukan, rata-rata anggota rumah tangga, jumlah kepala keluarga per rumah, tingkat pertumbuhan penduduk, angka kematian kasar, status gizi balita, angka kesakitan malaria, diare, demam berdarah serta infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dapat dikategorikan cukup rawan.

c. Aspek Bangunan

Sebagaimana lazim pada daerah nelayan pada aspek ini rawan terhadap

kekumuhan hal ini dapat dilihat dari hasil nilai sebesar 15% dari 25% (lihat tabel IV.2, Hasil perhitungan sebelum penataan lingkungan) yang diindikasikan sangat rawan.

d. Aspek Sarana dan Prasarana Dasar.

Penilaian hasil analisis pada aspek ini sebesar 42% (lihat tabel IV.2 Hasil perhitungan sebelum penataan lingkungan) atau dapat dikategorikan sangat kumuh/kumuh berat

e. Aspek Sosial Ekonomi.

Sebenarnya kawasan nelayan Bandengan ditinjau dari aspek ini merupakan daerah yang cukup rawan mengingat nilai dari indikasi kemiskinan, pendidikan, pendapatan dan keamanan mempunyai kategori cukup rawan.

Namun secara keseluruhan kawasan nelayan Bandengan dikategorikan sebagai suatu kawasan yang dipandang dari sudut kekumuhan adalah **KUMUH BERAT**.

4.2 Analisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Nelayan Bandengan Setelah Penataan

Penataan permukiman nelayan Bandengan berawal dari keinginan masyarakat untuk memperbaiki permukiman sejak tahun 1993 yang diawali oleh LKMD Kelurahan Bandengan. Keinginan masyarakat agar permukiman yang berada di bantaran Sungai Kendal tersebut ditata karena selama ini permukiman tersebut terlihat kumuh karena kondisi perumahan yang ditempati masyarakat nelayan tersebut tidak memenuhi syarat kelayakan.

Dari hasil survey dan pengolahan data terhadap 29 indikator yang ada sebelum penataan lingkungan permukiman kumuh, maka didapatkan nilai masing-

masing indikator seperti tersaji dalam tabel IV.3 – Nilai masing-masing indikator setelah penataan sebagai berikut :

TABEL IV.3
Nilai Masing-masing Indikator Setelah Penataan

No	Indikator	Data Tahun 2004	Kriteria Penilaian	Hasil Penilaian Indikator
1.	Legalitas tanah - Luas wilayah (ha) - Luas permukiman pada lahan bukan perumahan (ha)	196,87 20,75	$\frac{\text{Luas perkim pd lahan bukan perumahan}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$	10,54
2.	Status penguasaan bangunan - Jumlah KK yg menempati bangunan dg cara Sewa/kontrak	40	$\frac{\Sigma \text{ KK menyewa/mengontrak}}{\Sigma \text{ KK}} \times 100\%$	4,04
	- Jumlah KK	991		
3.	Frekuensi bencana kebakaran	2	Jumlah kejadian kebakaran dalam satu tahun	2
4.	Frekuensi bencana banjir	1	Jumlah kejadian banjir dalam satu tahun	1
5.	Frekuensi bencana tanah longsor	0	Jumlah kejadian tanah longsor satu tahun	0
6.	Tingkat Kepadatan Penduduk - Jumlah penduduk (jiwa) - Luas Wilayah (ha)	3.997 196,87	$\frac{\Sigma \text{ penduduk}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$	2.030,24
7.	Rata-rata anggota rumah tangga - Jumlah penduduk (jiwa) - Jumlah KK	3.997 991	$\frac{\Sigma \text{ penduduk}}{\Sigma \text{ KK}}$	4,03
8.	Jumlah Kepala Keluarga (KK) per rumah/Bangunan - Banyaknya KK dlm satu wil - Jumlah bangunan rumah	991 770	$\frac{\text{Banyak KK}}{\Sigma \text{ bangunan rumah}}$	1,29
9.	Tingkat pertumbuhan penduduk - Jumlah penduduk akhir tahun - Jumlah penduduk awal tahun	3.966 3.997	$\frac{\Sigma \text{ penduduk akhir tahun} - \Sigma \text{ penduduk awal tahun}}{\Sigma \text{ tahun penduduk awal tahun}} \times 100\%$	0,78
10.	Angka kematian kasar - Jumlah kematian	23	$\frac{\Sigma \text{ kematian selama 1 tahun}}{\Sigma \text{ penduduk}} \times 1000$	5,77
11.	Status gizi balita - Jumlah balita di bawah garis merah - Jumlah balita	8 30	$\frac{\Sigma \text{ balita di bawah garis merah}}{\Sigma \text{ balita}} \times 100\%$	26,67
12.	Angka kesakitan malaria - Jumlah penderita malaria dlm 1 th	0	$\frac{\Sigma \text{ penderita malaria}}{\Sigma \text{ penduduk}} \times 1000$	0
13.	Angka kesakitan diare - Jumlah penderita diare	132	$\frac{\Sigma \text{ penderita diare}}{\Sigma \text{ penduduk}} \times 1000$	33,03
14.	Angka kesakitan demam berdarah - Jumlah penderita	0	$\frac{\Sigma \text{ penderita demam berdarah}}{\Sigma \text{ penduduk}} \times 1000$	0

No	Indikator	Data Tahun 2004	Kriteria Penilaian	Hasil Penilaian Indikator
15.	Angka kesakitan ISPA - Jumlah penderita	0	$\frac{\Sigma \text{ penderita ISPA}}{\Sigma \text{ penduduk}} \times 100\%$	0
16.	Tingkat kualitas struktur bangunan - Jumlah rumah tidak permanen	230	$\frac{\Sigma \text{ bangunan rumah tidak permanen}}{\Sigma \text{ jumlah keseluruhan bang rumah}} \times 100\%$	29,87
17.	Tingkat kepadatan bangunan		$\frac{\Sigma \text{ bangunan rumah}}{\text{Luas wilayah}}$	3,911
18.	Tingkat bangunan rumah tdk layak huni/sehat - Jumlah rumah tidak sehat	232	$\frac{\Sigma \text{ bangunan rumah tidak sehat}}{\Sigma \text{ keseluruhan bang rumah}} \times 100\%$	30,13
19.	Tingkat penggunaan luas lantai bangunan rumah		$\frac{\Sigma \text{ bangunan rumah}}{\Sigma \text{ rata-rata anggota rumah tangga}}$	8,68
20.	Tingkat pelayanan air bersih - Jumlah KK yg tidak mendapat pelayanan air bersih	642	$\frac{\Sigma \text{ KK yg tidak mendapat pelayanan AB}}{\Sigma \text{ Kepala keluarga}} \times 100\%$	64,78
21.	Kondisi sanitasi lingkungan - Jumlah KK yg tidak menggunakan jamban	829	$\frac{\Sigma \text{ KK yg tidak menggunakan jamban}}{\Sigma \text{ Kepala keluarga}} \times 100\%$	83,65
22.	Kondisi Persampahan - Jumlah KK yang membuang sampah ke tempat yg bukan peruntukannya	36	$\frac{\Sigma \text{ KK yg membuang sampah tdk pd tempatnya}}{\Sigma \text{ Kepala keluarga}} \times 100\%$	3,63
23.	Kondisi saluran air hujan/drainase - Panjang sal drainase tdk lancar - Panjang total sal drainase	0,5 4,01	$\frac{\text{Panjang sal drainase tdk lancar}}{\text{panjang total sal drainase}} \times 100\%$	12,47
24.	Kondisi jalan - Panjang jalan rusak/rusak berat - Panjang total jalan lingkungan	1,29 25,80	$\frac{\text{Panjang jalan rusak/rusak berat}}{\text{panjang total jalan}} \times 100\%$	5,00
25.	Besarnya ruang terbuka - Luas ruang terbuka	1	$\frac{\text{Luas ruang terbuka}}{\text{Luas wilayah permukiman}} \times 100\%$	4,82
26.	Tingkat kemiskinan - Jumlah KK pra KS dan KS 1	375	$\frac{\Sigma \text{ KK pra KS dan KS 1}}{\Sigma \text{ KK keseluruhan}} \times 100\%$	37,84
27.	Tingkat Pendapatan - Jumlah penduduk berpenghasilan di bawah UMK	402	$\frac{\Sigma \text{ Kpendudk berpenghasilan < UMK}}{\Sigma \text{ KK keseluruhan}} \times 100\%$	40,56

No	Indikator	Data Tahun 2004	Kriteria Penilaian	Hasil Penilaian Indikator
28.	Tingkat pendidikan - Jumlah penddk tidak tamat pendidikan dasar 9 th	791	$\frac{\Sigma \text{Kpendudk berpenghasilan} < \text{UMK}}{\Sigma \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$	19,78
29.	Tingkat kerawanan keamanan - Jumlah kejadian tindak kriminal dalam 1 tahun	0	Σ Kejadian tindak kriminal dlm 1 tahun	0

Sumber: Hasil Analisa, 2005

Dari hasil perhitungan masing-masing indikator tersebut di atas, kemudian dimasukkan ke dalam kriteria yang sudah ada, seperti dalam Tabel IV.4 Hasil Perhitungan Setelah Penataan Lingkungan.

Tabel IV.4
Hasil Perhitungan Setelah Penataan Lingkungan

Indikator	Nilai	Nilai Indikator (Nn)	Bobot (Bn)	Hasil Penilaian (Nn x Bn)	Bobot Persentase (%)	Hasil Penilaian ((Nn x Bn) x %)
1. Legalitas tanah	10.54	2	6	12		
2. Status penguasaan bangunan	4.04	1	5	5		
3. Frekuensi bencana kebakaran	2	2	4	8		
4. Frekuensi bencana banjir	1	2	3	6		
5. Frekuensi bencana tanah longsor	0	1	2	2		
JUMLAH SCORE				33	20	6,6
6. Tingkat kepadatan Pnddk	2.030.24	5	3	15		
7. Rata-rata anggota rumah tangga	4.03	1	1,5	1.5		
8. Jumlah KK per rumah	1.29	1	2,25	2.25		
9. Tingkat pertambahan Penduduk	0.78	1	1,5	1.5		
10. Angka kematian kasar	5.77	1	1,5	1.5		
11. Status gizi balita	26.67	2	2,25	4.5		
12. Angka kesakitan malaria	0	1	0,75	0.75		
13. Angka kesakitan diare	33.03	3	0,75	2.25		
14. Angka kesakitan demam	0	1	0,75	0.75		

Indikator	Nilai	Nilai Indikator (Nn)	Bobot (Bn)	Hasil Penilaian (Nn x Bn)	Bobot Persentase (%)	Hasil Penilaian ((Nn x Bn) x %)
berdarah						
15. Angka kesakitan ISPA	0	1	8,75	8.75		
JUMLAH SCORE				38,75	15	5,81
16 Tingkat kualitas struktur bangunan	30.13	3	7,5	22.5		
17 Tingkat kepadatan bangunan	3.9	1	7,5	7.5		
18. Tingkat kesehatan dan kenyamanan bangunan	30.13	3	6,25	18.75		
19. Tingkat penggunaan luas lantai	8.68	2	2,5	5		
JUMLAH SCORE				53,75	25	13,44
20. Tingkat pelayanan air bersih	64.78	4	7,5	30		
21. Kondisi sanitasi lingkungan	83.65	5	7,5	37.5		
22. Kondisi persampahan	3.63	1	6	6		
23. Kondisi saluran air hujan	12.47	2	3	6		
24. Kondisi jalan	5	1	3	3		
25. Ruang terbuka	4.82	4	3	12		
JUMLAH SCORE				94,5	30	28,35
26. Tingkat kemiskinan	37.84	5	4	20		
27. Tingkat pendapatan	40.56	5	3,5	7.5		
28. Tingkat pendidikan	19.78	5	1,5	17.5		
29. Tingkat keamanan	0	1	1	1		
JUMLAH SCORE				46	10	4,6
JUMLAH TOTAL SCORE					100	58,8

Sumber : Hasil Analisa, 2005

Dari hasil survey dan pengolahan data, didapat kawasan nelayan Bandengan Setelah adanya penataan memiliki Nilai Score tingkat kekumuhan adalah "58,8" ini berarti termasuk ke dalam kriteria "Kumuh Sedang" yang memiliki nilai kekumuhan antara 46,8 –70,2.

Upaya penataan yang akhirnya di wujudkan oleh Pemerintah Kendal melalui

proyek penataan permukiman nelayan Bandengan. Penataan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki dan memindahkan permukiman yang berada pada bantaran Sungai Kendal ke lokasi yang baru yaitu pada tambak milik dinas perikanan yang berada dekat permukiman nelayan.

Kesimpulan analisa tingkat kekumuhan setelah penataan kawasan diuraikan sebagai berikut ;

a. Aspek Lokasi,

Setelah penataan aspek ini mempunyai nilai 6,6 % (lihat tabel IV.4) yang artinya dipandang dari indikator legalitas tanah, status penguasaan bangunan, frekuensi bencana banjir, kebakaran dan tanah longsor dapat diindikasikan sebagai kawasan yang cukup baik.

b. Aspek Kependudukan

Dalam penilaian analisis mempunyai nilai 5,81% (lihat tabel IV.4), dimana pada aspek ini yang dinilai adalah tingkat kependudukan, rata-rata anggota rumah tangga, jumlah kepala keluarga per rumah, tingkat pertumbuhan penduduk, angka kematian kasar, status gizi balita, angka kesakitan malaria, diare, demam berdarah serta infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dapat dikategorikan cukup rawan.

c. Aspek Bangunan

Sebagai mana lazim pada daerah nelayan pada aspek ini rawan terhadap kekumuhan hal ini dapat dilihat dari hasil nilai sebesar 13,44% dari 25% (lihat tabel IV.4) yang diindikasikan cukup rawan.

d. Aspek Sarana dan Prasarana Dasar.

Penilaian hasil analisis pada aspek ini sebesar 28,35% (lihat tabel IV.4) atau dapat dikategorikan kumuh ringan, hal ini mengingat setelah penataan banyak dialokasi

dana baik dari pemerintah daerah maupun pendanaan lainnya sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan.

e. Aspek Sosial Ekonomi.

Kawasan nelayan Bandengan setelah penataan ditinjau dari aspek ini merupakan daerah yang cukup rawan didasarkan dari analisis indikator kemiskinan, pendidikan, pendapatan dan keamanan, hal ini tidak jauh berbeda saat sebelum penataan.

Namun secara keseluruhan kawasan nelayan Bandengan setelah penataan terjadi peningkatan status menjadi **KUMUH SEDANG**.

4.3 Analisis Perubahan Tingkat Kekumuhan Sebelum Penataan dan Setelah Penataan.

Setelah adanya penataan permukiman Kawasan Nelayan Bandengan, kawasan ini mulai tumbuh dan berkembang. Dari hasil survey yang dilakukan kepada masyarakat Bandengan mereka menilai bahwa dengan adanya penataan permukiman nelayan Bandengan ini kehidupan mereka lebih baik dari segi sarana prasarana permukiman.

Sebelum dan setelah adanya penataan terjadi perubahan tingkat kekumuhan dari kumuh berat menjadi kumuh sedang, hal ini disebabkan adanya perbaikan sarana prasarana yang ada, perbaikan permukiman dan penyediaan utilitas permukiman.

Berikut ini disajikan analisa perbandingan tingkat kekumuhan sebelum dan sesudah penataan seperti di jelaskan pada tabel IV.5 berikut ini:

Tabel IV.5
Perbandingan tingkat kekumuhan sebelum dan sesudah penataan

No	Indikator	Sebelum Penataan		Setelah Penataan		Tingkat Perubahan	
		Nilai Indikator	Hasil*) Penilaian	Nilai Indikator	Hasil*) Penilaian	Nilai Indikator	(%)
I	KRITERIA BERDASARKAN LOKASI						
1.	Legalitas tanah	8,89		10,54		(1,65)	(18,56)
2.	Status penguasaan bangunan	14,73		4,04		10,69	75,57
3.	Frekuensi bencana kebakaran	1		2		(1)	(100)
4.	Frekuensi bencana banjir	1		1		0	0
5.	Frekuensi bencana tanah longsor	0		0		0	0
JUMLAH SCORE			6,4		6,6		
II	KRITERIA BERDASARKAN KEPENDUDUKAN						
6.	Tingkat kepadatan penduduk	1.943,89		2.030,24		(86,35)	(4,44)
7.	Rata-rata anggota rumah tangga	4,54		4,03		0,51	11,23
8.	Jumlah KK per rumah	1,29		1,29		0	30,38
9.	Tingkat penambahan Penduduk	1,12		0,78		0,38	33,39
10.	Angka kematian kasar	13,15		5,77		7,38	56,12
11.	Status gizi balita	37,04		26,67		10,37	28,00
12.	Angka kesakitan malaria	0		0		0	0
13.	Angka kesakitan diare	15,94		33,03		17,09	107,21
14.	Angka kesakitan demam berdarah	0		0		0	0
15.	Angka kesakitan ISPA	0		0		0	0
JUMLAH SCORE			6,8		5,81		
III	KRITERIA BERDASARKAN KONDISI BANGUNAN						
16.	Tingkat kualitas struktur bangunan	32,72		30,13		2,59	7,90
17.	Tingkat kepadatan bangunan	3,31		3,90		(0,59)	(17,82)
18.	Tingkat kesehatan dan kenyamanan bangunan	32,72		30,13		2,59	7,90
19.	Tingkat penggunaan luas lantai	6,34		8,68		(2,34)	(36,91)
JUMLAH SCORE			15		13,44		
IV	KRITERIA BERDASARKAN PRASARANA DASAR						
20.	Tingkat pelayanan air bersih	71,26		64,78		6,48	9,09
21.	Kondisi sanitasi lingkungan	89,9		83,65		6,25	6,95
22.	Kondisi persampahan	100,00		3,63		96,37	96,37
23.	Kondisi saluran air hujan	59,81		12,47		47,34	79,15
24.	Kondisi jalan	45,02		5,00		40,02	88,89
25.	Ruang terbuka	2,63		4,82		(2,19)	(83,27)
JUMLAH SCORE			42		28,35		
V	KRITERIA BERDASARKAN KONDISI SOSIAL EKONOMI						
26.	Tingkat kemiskinan	45,72		37,84		7,88	17,23
27.	Tingkat pendapatan	18,42		40,56		(22,14)	(120,19)

No	Indikator	Sebelum Penataan		Setelah Penataan		Tingkat Perubahan	
		Nilai Indikator	Hasil*) Penilaian	Nilai Indikator	Hasil*) Penilaian	Nilai Indikator	(%)
28	Tingkat pendidikan	53,44		19,78		33,66	62,99
29.	Tingkat keamanan	1		0		1	100
JUMLAH SCORE			4,7		4,6		
JUMLAH TOTAL SCORE			75		58,8		21,6

Angka dalam (-), menunjukan terjadinya penurunan kualitas

*) lihat tabel IV.2 dan tabel IV.3

Sumber : hasil analisa 2005

Didasarkan pada analisa tersebut diatas, secara umum tingkat kekumuhan kawasan nelayan Bandengan berubah dari "kumuh berat" menjadi "kumuh sedang". Namun pada kriteria kondisi berdasarkan lokasi terjadi penurunan kualitas. Secara lebih rinci akan diuraikan perubahan antara kondisi sebelum penataan dan setelah penataan

a. Kriteria berdasarkan lokasi

Terjadi penurunan kualitas pada kriteria ini khususnya ini terlihat pada indikator "legalitas tanah" dari 8,89 pada tahun 1998 menjadi 10,54 pada tahun 2004 (lihat tabel IV.5) , hal ini disebabkan oleh 2 faktor yaitu ;

- Aktifitas penduduk.

Kawasan bandengan merupakan kawasan yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi sehingga banyak penduduk khususnya penduduk miskin dari luar wilayah bermigrasi ke kawasan ini, dengan menempati tanah-tanah negara ataupun ruang terbuka.

- Pertumbuhan dan perkembangan penduduk.

Disamping aktifitas penduduk penyebab lainnya juga disebabkan oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang terlihat pada meningkatnya kepadatan penduduk dari 1.943,89 pada tahun 1998 menjadi 2.030,24 pada tahun 2004 (lihat tabel IV.5).

b. Kriteria berdasarkan kondisi kependudukan.

Secara umum kondisi kriteria ini menjadi lebih baik, hanya pada indikator "tingkat kepadatan penduduk" dan "angka kesakitan diare" yang mempunyai kondisi lebih buruk dibanding kondisi serupa pada tahun 1998.

c. Kriteria berdasarkan kondisi bangunan.

Pada kriteria ini juga terjadi peningkatan kualitas dibanding tahun 1998 berubah menjadi lebih baik, namun pada indikator "tingkat penggunaan luas lantai" terjadi penurunan sebesar 2,34% (lihat tabel IV.5) ini lebih disebabkan oleh terbatasnya lahan bagi peruntukan permukiman.

d. Kriteria berdasarkan kondisi prasarana dan sarana.

Menurut analisa tersebut diatas terjadi perubahan kondisi yang cukup menonjol, banyak prasarana dan sarana lebih baik dibanding tahun 1998, namun pada indikator "ruang terbuka" terjadi penurunan luas kawasan.

e. Kriteria berdasarkan kondisi sosial ekonomi.

Kondisi sosial ekonomi sejak tahun 1998 sampai tahun 2004 tidak terjadi perubahan yang cukup berarti, dari hasil penilaian sebesar 4,7 pada tahun 1998 hanya berubah menjadi 4,6 pada tahun 2004 (lihat tabel IV.5). Pada indikator "tingkat pendapat" terjadi penurunan tajam, hal ini lebih banyak terjadi karena krisis ekonomi yang cukup berkepanjangan khususnya sangat dirasakan oleh para nelayan.

4.4 Analisis Manfaat Penataan Kawasan Kumuh menurut Masyarakat.

Salah Satu program pemerintah dalam penanganan kawasan kumuh adalah penataan permukiman kumuh yang secara ideal diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan dan harkat masyarakat berpenghasilan rendah melalui penataan dan

perbaikan kualitas yang menyeluruh pada kawasan yang sangat kumuh. Melalui kegiatan tersebut masyarakat difasilitasi dan di-stimulasi untuk secara bersama memperbaiki kehidupan dan penghidupannya.

Untuk itu upaya yang dilakukan dengan pendekatan “Tridaya” yaitu suatu model pendekatan dari Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman sebagai pembaharuan pendekatan “Tribina” sebagai satu kesatuan upaya, artinya setiap paket bantuan program diusahakan mencakup tiga hal yaitu daya manusia, daya fisik lingkungan dan daya usaha ekonomi, sehingga hasil atau manfaat yang dicapai sesuai dengan konsep tridaya tersebut.

Analisis penataan dan manfaat perbaikan kawasan kumuh sesuai dengan variabel pada bab II yang menyebutkan variabel penataan adalah permukiman dan sarana prasarana, serta variabel manfaat adalah fisik lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi.

4.4.1 Fisik Lingkungan

Pada umumnya kondisi lingkungan permukiman nelayan di Bandengan yang berada di bantaran sungai Kendal terdiri dari rumah semi permanen dan temporer. Dengan adanya penataan permukiman ini masyarakat difasilitasi oleh pemerintah dengan direlokasi ke daerah yang lebih baik dan diberikan sebuah rumah tumbuh dengan harapan mereka akan mengembangkannya suatu saat nanti.

Dari hasil kuesioner sebanyak 51 responden menunjukkan bahwa penduduk yang masih menempati rumah permanen, semi permanen dan /sementara temporer dapat dijelasnya tabel di bawah berikut:

Tabel IV.6
Tipe Rumah Permukiman Kumuh Bandengan

No.	Jenis Rumah	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Permanen	13	25,5
2	Semi Permanen	28	54,9
3	Temporer/Sementara	10	19,6
Jumlah		51	100

Sumber : Survei Primer 2005

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 54,9% rumah yang ada di kawasan Bandengan merupakan rumah semi permanen, 25,5% rumah sudah permanen dan sisanya 19,6% adalah temporer. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar jenis rumah yang ada di kawasan tersebut masih semi permanen.

Dilihat dari segi aspek penataan bangunan kawasan permukiman nelayan Bandengan masih terlihat bahwa bangunannya kurang tertata, hal ini dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jarak terhadap jalan yang saling berhimpitan. Kemudian setelah adanya penataan dengan relokasi bangunan yang ada di tata dan diatur sedemikian rupa menyerupai suatu blok perumahan yang berbentuk grid.

Dari persepsi masyarakat, adanya penataan kawasan kumuh nelayan Bandengan memberikan manfaat terhadap aspek fisik lingkungan yang ada di Bandengan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil kuesioner yang menyatakan 84 % responden menganggap penataan telah memberikan manfaat terhadap perbaikan fisik lingkungan yang ada di Bandengan dan 16 % responden menyatakan adanya penataan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat.

Tabel IV.7
Manfaat Fisik Lingkungan Menurut Masyarakat

No.	Kriteria Fisik Lingkungan	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Ada manfaat penataan	43	84
2	Tidak ada manfaat penataan	8	16
Jumlah		51	100

Sumber : Survei Primer 2005

Secara fisik manfaat yang diperoleh setelah adanya penataan kawasan nelayan Bandengan adalah lebih baiknya sarana prasarana dari tahun ke tahun yang

mengalami perubahan dalam bentuk dan kualitasnya.

Prasarana jalan misalnya, dulu jalan-jalan yang berada di kawasan nelayan Bandengan hampir semuanya berupa tanah sekarang sudah meningkat menjadi jalan paving dan jalan aspal.

4.4.2 Ekonomi

Penduduk kawasan nelayan Bandengan dapat dikatakan mayoritas adalah nelayan dan buruh tani hal ini bisa dilihat dari persentase penduduk yang bekerja pada sektor tersebut.

Pada umumnya perilaku kehidupan nelayan di permukiman nelayan dari suatu lokasi ke lokasi adalah berbeda-beda. Meskipun demikian, terdapat kesamaan perilaku kehidupan mereka, yaitu dipengaruhi oleh kondisi bahwa sebagian dari kehidupan mereka berada di kawasan perairan, sehingga mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kehidupan di daratan.

Perekonomian masyarakat nelayan Bandengan tergolong rendah hal ini diketahui dari penghasilan mereka yang tidak menetap, karena mereka tergantung pada jumlah ikan yang didapat pada saat melaut. Harga solar yang mahal sebagai bahan bakar untuk kapal yang harganya semakin tinggi dan apabila solar tersebut dijual oleh pengecer yang berada di sekitar permukiman, maka harganya semakin tinggi, dan biasanya para nelayan menghutang lebih dahulu kepada penjual solar tersebut selanjutnya setelah menjual ikan baru mereka bisa membayar hutang. Hal lain yang mempengaruhi kemiskinan mereka seringkali para nelayan terikat dengan rentenir yang apabila meminjam uang maka bunga dari uang yang dipinjam sangat tinggi.

Secara aspek ekonomi, setelah penataan permukiman nelayan belum bisa terukur secara pasti karena tingkat ekonomi yang terlihat setelah adanya penataan dari tahun 2001 sampai tahun 2005 belum mengalami perubahan yang signifikan, hal ini tergantung dengan hasil tangkapan ikan yang ada di laut, kadang banyak sering juga pulang tanpa hasil yang mencukupi.

Tabel IV.8
Tingkat Pendapatan Nelayan Bandengan

No.	Pendapatan	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	< 400.000 (dibawah UMR)	31	60.78
2	400.000 – 500.000 (UMR)	17	33.33
3	> 500.000 (di atas UMR)	3	5.89
Jumlah		51	100

Sumber : Survei Primer 2005

Dari data di atas menunjukkan 60,78% responden memiliki pendapatan dibawah UMR, dan hanya 5,89% saja yang memiliki pendapatan diatas UMR, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Bandengan masih memiliki pendapatan yang rendah dan hal ini akan mempengaruhi kondisi lingkungan yang ada.

Dari tanggapan masyarakat, adanya penataan kawasan kumuh nelayan Bandengan belum memberikan manfaat terhadap peningkatan pendapatan nelayan yang ada di Bandengan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil kuesioner yang menyatakan 80 % responden menganggap penataan lingkungan belum memberikan manfaat terhadap perbaikan pendapatan yang ada di Bandengan dan 20 % responden menyatakan adanya penataan telah memberikan manfaat kepada masyarakat Bandengan.

Tabel IV.9
Manfaat Ekonomi Menurut Masyarakat

No.	Kriteria Ekonomi	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Ada manfaat penataan	41	80
2	Tidak ada manfaat penataan	10	20
Jumlah		51	100

Sumber : Survei Primer 2005

Dari hasil survey, masyarakat menganggap penataan permukiman ini tidak terlalu berpengaruh banyak terhadap hasil pendapatan yang diperoleh dari mencari ikan di laut, akan tetapi mereka merasa dengan adanya penataan permukiman ini hasil dari melaut yang biasanya habis digunakan untuk keperluan perbaikan rumah atau keperluan kesehatan keluarga sekarang dapat dialihkan untuk keperluan perbaikan jala atau perahu mereka sehingga produktifitas akan lebih baik dan pada akhirnya juga akan meningkatkan pendapatan keluarga.

4.4.3 Sosial Budaya

Kondisi masyarakat nelayan Bandengan merupakan masyarakat yang tergolong miskin. Hal ini dapat diketahui dari kondisi permukiman masyarakat yang kumuh dan liar berada di bantaran sungai Kendal. Mereka menempati rumah-rumah yang sebagian besar berdinding papan dan beratap genteng serta berlantai tanah, tetapi ada juga rumah yang sudah permanen.

Para nelayan ini pada awalnya merupakan masyarakat pendatang. Mereka menempati lokasi permukiman kurang lebih sejak 30 tahun yang lalu. Hingga pada saat ini pendatang tersebut semakin banyak. Masyarakat tersebut sebagian besar berasal dari Desa Balbalan Kabupaten Demak. Kehidupan mereka yang berada di laut mempengaruhi perilaku kehidupan sehari masyarakat. Di wilayah Kabupaten Kendal masyarakat nelayan terkenal sebagai masyarakat yang bersifat keras. Masyarakat nelayan Bandengan dalam kehidupan sehari-harinya bagi yang laki-laki hampir setiap hari berada di laut. Apabila nelayan berangkat pagi hari pulang pada saat sore hari. Ada juga nelayan yang berangkat pada sore hari dan pulang pada pagi hari.

Bagi para wanita sebagian besar waktunya banyak dihabiskan untuk mengurus rumah tangga. Kekurangan pada wanita di Bandengan mereka tidak memiliki usaha tambahan seperti wanita nelayan lainnya. Potensi usaha yang seharusnya dapat berkembang di kawasan ini, tidak dapat berkembang maju. Peluang yang banyak yang seharusnya dapat berkembang seperti industri rumah tangga, pengolahan hasil ikan, dan pengasapan ikan. Hal ini dikarenakan para wanita tersebut kurang memiliki ketrampilan dalam pengolahan hasil ikan, sehingga hasil ikan yang telah didapat oleh para nelayan langsung dijual karena hal ini dianggap cara yang paling mudah untuk menghasilkan uang.

Masyarakat nelayan Bandengan seluruhnya beragama Islam sehingga pada kehidupan mereka pada saat perayaan hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha masyarakat meramaikan untuk merayakan pada hari tersebut. Pada saat hari Jum'at mereka juga libur dalam mencari ikan dilaut karena pada hari ini masyarakat nelayan banyak melaksanakan sholat Jum'at. Pada hari Jum'at juga digunakan masyarakat untuk memperbaiki peralatan yang ada di kapal seperti memperbaiki jaring, kapal yang bocor, atau peralatan lainnya yang perlu diperbaiki.

Nelayan Bandengan terbagi menjadi nelayan pemilik kapal dan nelayan buruh. Nelayan pemilik kapal ini biasanya mereka memiliki peralatan untuk menangkap ikan, sedangkan nelayan buruh mereka menyewa peralatan tersebut kepada pemilik kapal kemudian mereka membayar sewa kapal tersebut.

Masyarakat nelayan Bandengan dalam kehidupan berkeluarga mereka biasanya pada satu rumah ditempati oleh beberapa keluarga. Anak yang sudah menikah tetapi belum mempunyai rumah mereka masih berkumpul dengan orang tuanya, bahkan pada satu rumah ada yang sampai tiga keluarga. Hal ini menunjukkan

bahwa masyarakat nelayan Bandengan hidup sangat sederhana. Kehidupan sosial masyarakat nelayan Bandengan yang sederhana menyebabkan perlu adanya perubahan pada perekonomian masyarakat sehingga kehidupan masyarakat akan lebih meningkat, karena apabila masyarakat tidak terlepas mereka tetap pada kondisi yang kumuh seperti sekarang.

Tabel IV.10
Tingkat Pendidikan Nelayan Bandengan

No.	Pendidikan	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	SD	26	50.98
2	SMP	14	27.45
3	SMA	10	19.61
4	Sarjana	1	1.96
Jumlah		51	100

Sumber : Survei Primer 2005

Dari data di atas menunjukkan 50,9% responden berpendidikan Sekolah Dasar dan 1,96% responden berpendidikan Sarjana. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Bandengan masih berpendidikan setingkat Sekolah Dasar atau masih berpendidikan rendah.

Tabel IV.11
Manfaat Sosial Budaya Menurut Masyarakat

No.	Kriteria Sosial Budaya	Jumlah Responden	Prosentase (%)
1	Ada manfaat penataan	29	57
2	Tidak ada manfaat penataan	22	43
Jumlah		51	100

Sumber : Survei Primer 2005

Dari persepsi masyarakat, adanya penataan kawasan kumuh nelayan Bandengan telah memberikan dampak positif terhadap aspek sosial budaya yang ada di Bandengan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil kuesioner yang menyatakan 57% responden menganggap penataan telah memberikan manfaat terhadap perbaikan perilaku masyarakat yang ada di Bandengan dan 43 % responden menyatakan adanya penataan tidak memberikan manfaat atau perubahan perilaku masyarakat Bandengan.

4.5 Analisis Hubungan Antara Perubahan Tingkat Kekumuhan dengan Manfaat yang Diperoleh

Permukiman sebagai wadah kehidupan manusia, bukan saja menyangkut masalah aspek fisik dan teknis saja, tetapi juga aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya dari para penghuninya. Tidak hanya menyangkut tempat hunian/rumah, tetapi juga tempat kerja, belanja, bersantai dan kepentingan-kepentingan lainnya. Karena alasan-alasan ekonomis tertentu dan alasan lainnya justru akhirnya daerah permukiman/bermukim tumbuh dan berkembang pesat tanpa terkendali. Hal ini mengakibatkan semakin menurunnya kualitas lingkungan permukiman.

Di wilayah permukiman nelayan Bandengan, sebagai suatu wilayah permukiman lingkungan kumuh dengan kepadatan penduduk yang cukup padat. Sebagian besar bangunan semi permanen dan tidak permanen. Keterbatasan lahan dan kepadatan bangunan yang tinggi menyebabkan taman atau ruang terbuka sangat kurang, serta lingkungan kotor dan buruk. Sebagian besar penduduk berpenghasilan rendah, dengan mata pencaharian sebagai nelayan dan buruh tani. Fasilitas dan infrastruktur kawasan buruk dan dalam kondisi rusak. Kakus dan jamban kurang memenuhi syarat kesehatan. Sumber air bersih dan sumur kurang memenuhi syarat kesehatan, saluran drainase dan air kotor tidak teratur. Kondisi jalan lingkungan masih berupa jalan tanah yang sebagian berada di tritisan rumah.

Kondisi lingkungan permukiman seperti ini merupakan suatu gejala penurunan/kemerosotan kualitas permukiman yang harus segera ditangani melalui peremajaan lingkungan permukiman, adalah upaya dan kegiatan pembangunan yang terencana untuk mengubah atau memperbaharui suatu kawasan terbangun yang sudah merosot fungsinya agar meningkat kembali dan lebih sesuai dengan perkembangan

kota. Peremajaan atau penataan lingkungan ini bukan ditujukan pada perbaikan fisik semata, tetapi yang utama adalah perbaikan tatanan sosial ekonomi masyarakat agar lebih mampu menunjang kehidupan kota secara luas.

Dari kondisi yang ada sebelum penataan dan setelah penataan lingkungan permukiman nelayan Bandengan terdapat perubahan dalam aspek fisik lingkungan karena program penataan lingkungan dengan merelokasi semua masyarakat di kawasan permukiman nelayan. Dilihat dari segi derajat kekumuhan yang tadinya kumuh berat menjadi kumuh sedang merupakan suatu bentuk manfaat yang telah dicapai dalam penataan lingkungan permukiman di Kawasan Nelayan Bandengan.

Dari hasil yang dicapai terlihat adanya pengaruh yang kuat terhadap perubahan tingkat kekumuhan setelah adanya penataan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan terhadap 7 dari 29 nilai indikator tingkat kekumuhan dari sebelum penataan dan setelah penataan yaitu:

1. Legalitas Tanah
2. Jumlah KK per-Rumah
3. Tingkat Penggunaan Luas Lantai
4. Tingkat Pelayanan Air Bersih
5. Kondisi Sampah
6. Kondisi Saluran Air Hujan
7. Kondisi Jalan

Kemudian perubahan tingkat kekumuhan tersebut di kaitkan dengan variabel manfaat yang diperoleh masyarakat setelah adanya penataan lingkungan kumuh. Variabel manfaat yang terdiri dari 3 indikator yaitu pendidikan, pendapatan dan prasarana. Ketiga indikator tersebut di crostab kan dengan ke tujuh indikator di atas.

Tabel berikut ini adalah hasil uji statistik dari hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan perubahan tingkat kekumuhan ;

Tabel IV.12
Uji Statistik Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dengan Perubahan Tingkat Kekumuhan

Uji Statistik	Tingkat Signifikan	Coefisien Contingensi	Chi-Square	Spearman Correlation
Legalitas Tanah	0.366	0.337	6.538	-0.338
Jumlah KK per rumah	0.000	0.670	41.614	0.750
Penggunaan Luas lantai	0.000	0.678	43.493	0.712
Pelayanan Air Bersih	0.000	0.694	47.481	0.738
Kondisi Sampah	0.000	0.619	31.638	0.744
Kondisi Drainase	0.000	0.595	27.969	0.587
Kondisi Jalan	0.000	0.777	77.777	0.914

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Hipotesis untuk kasus ini:

Ho : artinya tidak ada hubungan antara baris dan kolom, atau antara tingkat pendidikan dengan perubahan tingkat kekumuhan.

Hi : ada hubungan antara baris dan kolom, atau antara tingkat pendidikan dengan perubahan tingkat kekumuhan.

Dasar Pengambilan Keputusan:

Jika Chi-Square Hitung < Chi-Square Tabel, maka Ho diterima.

Jika Chi-Square Hitung > Chi-Square Tabel, maka Ho ditolak

Berdasarkan perbandingan Chi-Square uji dan tabel,

❖ Oleh karena Chi-Square Hitung < Chi-Square Tabel (6,538 < 12,591), maka **Ho diterima** atau tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan perubahan legalitas tanah

❖ Oleh karena Chi-Square Hitung > Chi-Square Tabel (41,614 > 12,591), maka **Ho ditolak** atau ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan jumlah KK perumah

❖ Oleh karena Chi-Square Hitung > Chi-Square Tabel (43,493 > 16,9190), maka **Ho**

ditolak atau ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan penggunaan luas lantai.

- ❖ Oleh karena Chi-Square Hitung > Chi-Square Tabel ($47,481 > 12,591$), maka **Ho ditolak** atau ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan pelayanan air bersih
- ❖ Oleh karena Chi-Square Hitung > Chi-Square Tabel ($31,638 > 12,591$), maka **Ho ditolak** atau ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kondisi sampah
- ❖ Oleh karena Chi-Square Hitung > Chi-Square Tabel ($27,696 > 12,591$), maka **Ho ditolak** atau ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kondisi drainase
- ❖ Oleh karena Chi-Square Hitung > Chi-Square Tabel ($77,777 > 12,591$), maka **Ho ditolak** atau ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kondisi jalan.

Hasil uji statistik tersebut menunjukkan adanya keterhubungan antara tingkat pendidikan dengan variabel manfaat penataan. Logikanya memang semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin tinggi pula tingkat kesadaran terhadap lingkungan tempat tinggalnya, tetapi hal ini tidak berlaku terhadap tingkat pendidikan dengan legalitas tanah karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang belum tentu menginginkan perubahan status legalitas tanah. Dengan adanya perubahan tingkat pendidikan, seseorang akan berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan akan rumah sehingga jika pendidikannya tinggi akan mendapatkan penghasilan yang menyesuaikan dengan pendidikannya.

Tabel berikut ini adalah hasil uji statistik dari hubungan antara Tingkat Pendapatan dengan perubahan tingkat kekumuhan.

Tabel IV.13
Uji Statistik Hubungan Antara Tingkat Pendapatan dengan Perubahan Tingkat Kekumuhan

Uji Statistik	Tingkat Signifikan	Coefisien Contingensi	Chi-Square	Spearman Correlation
Legalitas Tanah	0.001	0.528	19.718	-0.109
Jumlah KK per	0.000	0.681	44.216	0.756

Uji Statistik	Tingkat Signifikan	Coefisien Contingensi	Chi-Square	Spearman Correlation
rumah				
Penggunaan Luas lantai	0.000	0.661	30.336	0.644
Pelayanan Air Bersih	0.000	0.606	29.639	0.664
Kondisi Sampah	0.000	0.542	21.228	0.635
Kondisi Drainase	0.000	0.575	25.169	0.577
Kondisi Jalan	0.000	0.651	37.460	0.800

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Berdasarkan perbandingan Chi-Square uji dan tabel,

- ❖ Oleh karena Chi-Square Hitung < Chi-Square Tabel ($19,718 < 12,591$), maka **Ho ditolak** atau ada hubungan antara tingkat pendapatan dengan perubahan legalitas tanah
- ❖ Oleh karena Chi-Square Hitung > Chi-Square Tabel ($44,216 > 12,591$), maka **Ho ditolak** atau ada hubungan antara tingkat pendapatan dengan jumlah KK perumah
- ❖ Oleh karena Chi-Square Hitung > Chi-Square Tabel ($30,336 > 12,591$), maka **Ho ditolak** atau ada hubungan antara tingkat pendapatan dengan penggunaan luas lantai.
- ❖ Oleh karena Chi-Square Hitung > Chi-Square Tabel ($29,639 > 12,591$), maka **Ho ditolak** atau ada hubungan antara tingkat pendapatan dengan pelayanan air bersih
- ❖ Oleh karena Chi-Square Hitung > Chi-Square Tabel ($21,228 > 12,591$), maka **Ho ditolak** atau ada hubungan antara tingkat pendapatan dengan kondisi sampah
- ❖ Oleh karena Chi-Square Hitung > Chi-Square Tabel ($25,169 > 12,591$), maka **Ho ditolak** atau ada hubungan antara tingkat pendapatan dengan kondisi drainase
- ❖ Oleh karena Chi-Square Hitung > Chi-Square Tabel ($37,460 > 12,591$), maka **Ho ditolak** atau ada hubungan antara tingkat pendapatan dengan kondisi jalan.

Hasil uji statistik menunjukkan ada keterhubungan antara tingkat pendapatan dengan perubahan tingkat kekumuhan di kawasan kumuh Bandengan. Tingkat

pendapatan masyarakat Bandengan yang di bawah Upah Minimum Regional dikaitkan dengan status kepemilikan rumah menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatannya maka sangat mempengaruhi status kepemilikan lahan. Begitu juga dengan variabel yang lain, perubahan tingkat pendapatan seseorang akan mempengaruhi keinginan seseorang untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Tabel berikut ini adalah hasil uji statistik dari hubungan antara manfaat pembangunan Prasarana dengan perubahan tingkat kekumuhan

Tabel IV.14
Uji Statistik Hubungan Antara Manfaat Prasarana dengan Perubahan Tingkat Kekumuhan

Uji Statistik	Tingkat Signifikan	Coefisien Contingensi	Chi-Square	Spearman Correlation
Legalitas Tanah	0.000	0.595	27.880	-0.569
Jumlah KK per rumah	0.000	0.635	34.437	0.716
Penggunaan Luas lantai	0.000	0.761	70.093	0.874
Pelayanan Air Bersih	0.000	0.770	74.346	0.893
Kondisi Sampah	0.000	0.562	23.514	0.658
Kondisi Drainase	0.000	0.584	26.369	0.592
Kondisi Jalan	0.000	0.732	58.915	0.812

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Berdasarkan perbandingan Chi-Square uji dan tabel,

- ❖ Oleh karena Chi-Square Hitung < Chi-Square Tabel ($27,880 < 12,591$), maka **Ho ditolak** atau ada hubungan antara manfaat pembangunan prasarana dengan perubahan legalitas tanah
- ❖ Oleh karena Chi-Square Hitung > Chi-Square Tabel ($34,437 > 12,591$), maka **Ho ditolak** atau ada hubungan antara manfaat pembangunan prasarana dengan jumlah KK perumahan
- ❖ Oleh karena Chi-Square Hitung > Chi-Square Tabel ($70,093 > 12,591$), maka **Ho ditolak** atau ada hubungan antara manfaat pembangunan prasarana dengan

penggunaan luas lantai.

- ❖ Oleh karena Chi-Square Hitung > Chi-Square Tabel ($74,345 > 12,591$), maka **Ho ditolak** atau ada hubungan antara manfaat pembangunan prasarana dengan pelayanan air bersih
- ❖ Oleh karena Chi-Square Hitung > Chi-Square Tabel ($23,514 > 12,591$), maka **Ho ditolak** atau ada hubungan antara manfaat pembangunan prasarana dengan kondisi sampah
- ❖ Oleh karena Chi-Square Hitung > Chi-Square Tabel ($26,369 > 12,591$), maka **Ho ditolak** atau ada hubungan antara manfaat pembangunan prasarana dengan kondisi drainase
- ❖ Oleh karena Chi-Square Hitung > Chi-Square Tabel ($58,915 > 12,591$), maka **Ho ditolak** atau ada hubungan antara manfaat pembangunan prasarana dengan kondisi jalan.

Hasil uji statistik menunjukkan ada keterhubungan antara manfaat pembangunan prasarana dengan perubahan tingkat kekumuhan. Dari bilangan korelasi menunjukkan bahwa antara pembangunan prasarana dengan legalitas tanah berkorelasi negatif yang berarti adanya pembangunan prasarana belum tentu akan merubah status kepemilikan lahan.

Dari hasil tersebut di atas dapat kita ambil intisarinnya adalah dengan perubahan tingkat kekumuhan dari kumuh berat menjadi kumuh sedang terdapat hubungan yang kuat terhadap manfaat yang diperoleh oleh masyarakat nelayan Bandengan.

Kondisi prasarana lingkungan permukiman yang baik merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam suatu lingkungan permukiman yang akan berfungsi

sebagai pendukung aktivitas (kehidupan sehari-hari dan usaha produksi) dan kesehatan masyarakat. Dengan peran dan fungsi ini, maka keberadaan dan kondisi prasarana permukiman dalam suatu lingkungan permukiman sangat penting untuk disediakan secara baik, efisien, dan tepat.

Prasarana permukiman adalah bersifat layanan umum (*public service*) dan bukan bersifat individual (*personalize*), kerusakan dalam satu sektor atau lokasi akan dapat dirasakan dampaknya oleh banyak orang atau lokasi (masal). Dengan sifat ini, maka semua permasalahan dan solusi harus dikaji secara bersama pula. Prasarana permukiman juga bersifat *integrated system*, ini berarti bahwa persoalan pada suatu tempat atau sektor bisa disebabkan oleh sektor atau tempat lainnya. Ketersediaan sarana fisik saja belum dapat menjamin fungsi infrastruktur, diperlukan aspek pemeliharaan dan pengoperasian yang baik pula. Dengan sifat ini maka dalam aspek perencanaan, perancangan, pembangunan, pengawasan sampai operasional/pemeliharaan sangat diperlukan partisipasi semua masyarakat dalam upaya untuk dapat mencapai sasaran yang tepat serta menumbuhkan "rasa memiliki" (*sense of belonging*) dalam diri seluruh masyarakat.

Dari hipotesa di atas menunjukkan dengan adanya penataan/perbaikan kampung kumuh khususnya di Kelurahan Bandengan setelah adanya program ini sudah mulai terasa manfaatnya, baik dari sektor lingkungan maupun sarana prasarana, sedangkan tingkat pada indikator pendapatan masyarakat setelah adanya program ini secara tidak langsung akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk dapat mewujudkan keberhasilan diperlukan pelibatan masyarakat secara aktif.

4.6 Interpretasi terhadap Penataan Permukiman Kumuh.

Sejumlah program untuk menata permukiman kumuh di kawasan nelayan

Bandengan telah dilaksanakan, namun nampaknya belum memberikan hasil yang memadai hal ini hanya terlihat pada perubahan tingkat kekumuhan dari "kumuh berat" hanya menjadi "kumuh ringan", namun tidak dibarengi perubahan yang lain. Perubahan kekumuhan ini hanya didasarkan pada investasi pemerintah baik pemerintah daerah, propinsi maupun pusat, sedangkan masyarakat yang diharapkan sebagai pelaku pembangunan belum terlihat adanya berbagi peran.

4.6.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Salah satu tujuan penataan permukiman kumuh di kawasan Bandengan adalah memberikan dorongan percaya diri untuk dapat berkembang dan masyarakat mempunyai arti penting dalam pembangunan yang akan dan sedang dilakukan, namun hal ini belum terlihat secara eksplisit pada karakter masyarakat, hal ini dapat terlihat dari indikator kondisi bangunan yang hanya berubah 1,56% (lihat tabel IV.5 Perbandingan tingkat kekumuhan sebelum dan sesudah penataan) relatif tidak ada perubahan sejak 1987 sampai tahun 2002. Sebenarnya masyarakat di kawasan Bandengan ini mempunyai potensi di bidang perikanan yang dapat dijadikan andalan, hal ini diperlukan suatu pendekatan untuk mengembangkan sumberdaya manusia dari nelayan tradisonal menjadi nelayan modern, serta diperlukan diversifikasi keahlian sehingga para nelayan mempunyai ketrampilan lain disamping sebagai nelayan yang handal. Dalam pengembangan sumber daya manusia ini diperlukan suatu program yang berkelanjutan, serta ditangani oleh berbagai macam sektor yang terkait., sehingga masyarakat diharapkan mampu mengelola sumber daya manusia.

4.6.2 Lingkungan Perumahan dan Permukiman

Kegiatan penataan lingkungan permukiman nelayan diharapkan memberikan

manfaat bagi masyarakatnya, dalam analisa manfaat secara eksplisit disimpulkan **bermanfaat** bagi masyarakat, namun hasil yang dicapai belum dapat memecahkan permasalahan-permasalahan lingkungan perumahan dan permukiman, hal ini terlihat masih banyaknya rumah yang dihuni pada kawasan yang ilegal serta naiknya angka tingkat kepadatan bangunan dan penggunaan luas lantai (lihat tabel IV.5 Perbandingan tingkat kekumuhan sebelum dan sesudah penataan).

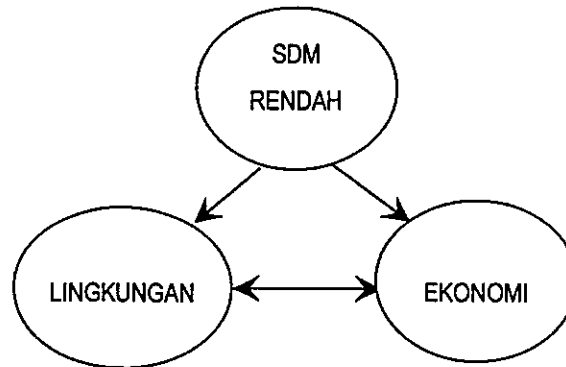
Salah satu harapan dalam kegiatan penataan lingkungan permukiman adalah agar dapat menciptakan suatu bentuk lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih baik, hal ini memang terjadi peningkatan kualitas yang cukup besar mengingat intervensi pemerintah sangat besar.

Dalam penataan lingkungan yang telah ada, juga diperlukan peran serta masyarakat secara aktif, hal ini yang paling penting adalah partisipasi dalam pelaksanaan, yaitu memanfaatkan daya kreatif dari mayoritas penduduk untuk mengembangkan lingkungan mereka sendiri, sejauh mungkin di tempat yang mereka pilih.

4.6.3 Ekonomi dan Usaha

Secara tidak langsung, kegiatan penataan lingkungan permukiman ini memberikan dampak secara ekonomi bagi individu masyarakat, keluarga maupun masyarakat secara luas, walaupun saat ini belum terlihat jelas secara signifikan namun masyarakat telah merasakan kemudahan dalam bidang transportasi (dengan membaiknya sarana jalan), air minum dan lain sebagainya. Dalam jangka panjang juga diharapkan berfungsi sebagai *income generating* serta embrio bagi penciptaan lapangan kerja baru, ditandai dengan makin menurunnya tingkat kemiskinan. Namun

pada saat penelitian dilakukan pada pengembangan ekonomi serta usaha belum menunjukkan dampak yang dapat diukur.



Sumber daya manusia rendah akan berpengaruh pada menurunnya tingkat pendapatan ekonomi dan berdampak pada ketidak-pedulian pada lingkungan, yang pada akhirnya akan menurunkan derajat kekumuhan. Oleh karena itu penataan kualitas lingkungan suatu kawasan harus dimulai pada pemberdayaan manusianya sehingga kebutuhan dasar hidup mereka akan tercukupi, dalam hal ini pemerintah hanya berfungsi sebagai pendorong (*enable*) saja bukan lagi sebagai *provider*.

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Studi yang telah dilaksanakan oleh penulis tentang manfaat penataan permukiman kumuh nelayan terhadap masyarakat di Kelurahan Bandengan dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kawasan permukiman nelayan Bandengan sebelum adanya program penataan lingkungan permukiman memiliki tingkat kekumuhan "**Kumuh Berat**" sesuai hasil dari nilai pembobotan tingkat kekumuhan, artinya kawasan tersebut memiliki tingkat kekumuhan tinggi dengan kurangnya sarana prasarana pendukung permukiman, tata letak bangunan yang tidak tertata, dan masalah-masalah kesehatan lingkungan kurang terjaga.
- b. Dengan adanya program penataan lingkungan permukiman nelayan Bandengan tingkat kekumuhan yang sebelumnya tergolong "**Kumuh Berat**" berubah menjadi "**Kumuh Sedang**" hal ini mencerminkan bahwa adanya program penataan permukiman akan mengurangi tingkat kekumuhan suatu kawasan.
- c. Dengan adanya program penataan lingkungan yang berupa penataan di bidang permukiman dan sarana prasarana memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat nelayan di Kelurahan Bandengan, manfaat yang diterima ada tiga aspek yaitu aspek fisik lingkungan yang terlihat dari semakin baiknya sarana dan prasarana yang ada, aspek ekonomi yang ditunjukkan dari segi pendapatan masyarakat meskipun belum kelihatan secara signifikan tetapi menunjukkan kearah perbaikan

pendapatan dan aspek sosial budaya yang ditunjukkan dari segi pendidikan masyarakat yang mendapatkan kemudahan akses menuju tempat pendidikan.

Dari hipotesa di atas menunjukkan dengan adanya penataan/perbaikan kampung kumuh khususnya di Kelurahan Bandengan setelah adanya program ini sudah mulai terasa manfaatnya, baik dari sektor lingkungan maupun sarana prasarana, sedangkan tingkat pada indikator pendapatan masyarakat setelah adanya program ini secara tidak langsung akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk dapat mewujudkan keberhasilan diperlukan pelibatan masyarakat secara aktif.

5.1. Temuan Studi

Temuan dari studi manfaat penataan permukiman kumuh terhadap masyarakat nelayan di kawasan Bandengan Kabupaten Kendal adalah penataan permukiman kumuh sangat dirasakan oleh masyarakat nelayan Bandengan dengan penyediaan sarana prasarana yang menunjang kelancaran aktivitas, penyediaan perumahan bagi masyarakat nelayan, dan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum bagi kelangsungan hidup masyarakat nelayan Bandengan, akan tetapi dengan penataan permukiman nelayan ini mereka belum dapat meningkatkan hasil pendapatan sehari-hari, serta dengan adanya penataan permukiman nelayan ini, mereka juga belum terlepas dari kekumuhan, hal ini ditunjukkan dengan tingkat kekumuhan kawasan yang masih dianggap kumuh dengan kriteria "**Kumuh Sedang**". Ternyata penataan kawasan kumuh belum tentu selamanya mendapatkan hasil yang optimal, masih dibutuhkan banyak faktor untuk bisa mengentaskan kawasan Bandengan dari kekumuhannya.

Masyarakat perlu diajak berpartisipasi baik saat perencanaan, pelaksanaan

sampai dengan pemanfaatan, dengan cara menggali daya kreatif dari mayoritas penduduk untuk mengembangkan lingkungan mereka sendiri, sejauh mungkin di tempat yang mereka pilih. Oleh karena itu hal terpenting dari penataan lingkungan kumuh bukan hanya menata lingkungannya saja tetapi harus didahului dengan pengembangan sumber daya manusianya sehingga investasi yang telah ditanamkan oleh berbagai macam komponen tidak sia-sia.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disusun beberapa rekomendasi studi, mengingat studi ini merupakan tahap awal yang berfungsi membuka wawasan bagi kajian yang lebih dalam. Rekomendasi studi lebih lanjut yaitu perlunya menggali lebih dalam penelitian-penelitian masyarakat terhadap manfaat penataan permukiman kumuh nelayan di kawasan Bandengan Kabupaten Kendal dengan konsep tridaya tersebut, dengan melibatkan seluruh komponen tridaya yaitu pemberdayaan kelembagaan sosial kemasyarakatan, pemberdayaan usaha ekonomi, serta pendayagunaan prasarana dan sarana dasar.

Studi ini dapat diteruskan dengan studi masalah usaha ekonomi masyarakat setelah adanya penataan lingkungan dengan pendekatan tridaya, bagaimana pengaruh terhadap perekonomian masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut melalui konsep TRIDAYA, dalam konsep tridaya dapat disimpulkan bahwa :

- Pemberdayaan kelembagaan sosial kemasyarakatan sebagai wadah aktifitas dan partisipasi warga,

Kawasan Bandengan adalah daerah nelayan, agar potensi masyarakat ini dapat dimanfaatkan secara terencana, mereka perlu dihimpun dalam suatu wadah organisasi profesi yang jelas. Namun, karena kondisi sosial ekonomi mereka dan

keterbatasan mereka, pembentukan organisasi tersebut memerlukan bantuan dari pihak lain disertai iklim kondusif yang diciptakan oleh pemerintah. Penentuan bentuk organisasi cara pelaksanaan kegiatan dan tingkat peran pelaku yang terlibat tetap menjadi kewenangan kelompok.

Dengan adanya organisasi ini diharapkan masyarakat di daerah nelayan akan dapat memecahkan persoalan-persoalan berkaitan dengan sumber daya manusianya, serta permasalahan lingkungan lainnya.

- Pemberdayaan usaha ekonomi.

Kawasan Bandengan sebagian besar penduduknya nelayan atau bermata-pencaharian yang berhubungan dengan nelayan, masih menggunakan sistim tradisi yang turun temurun, rekomendasi penulis bahwasanya diperlukan suatu pemberdayaan usaha ekonomi lokal yang berbasis keluarga serta menggunakan teknologi lokal melalui pendampingan.

- Pendayagunaan prasarana dan sarana dasar.

Pendayagunaan aspek ini diharapkan dapat mendukung kedua aspek diatas yaitu sosial kemasyarakatan dan usaha ekonomi, untuk itulah diperlukan suatu perencanaan partisipatif agar dapat memanfaatkan daya kreatif dari masyarakat Bandengan untuk mengembangkan kawasan mereka sesuai dengan kondisi dan latar belakang ekonomi mereka.

Langkah-langkah rekomendasi yang diusulkan berikut ini nantinya diharapkan akan dapat mengoptimalkan rencana-rencana program bantuan pemerintah beserta *stakeholdernya*. Langkah-langkah rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk lokasi kumuh di kawasan Bandengan, penanganan direkomendasikan

untuk tetap dilanjutkan dengan lebih menekankan penanganan manusianya, hal menjadi pertimbangan karena :

- Telah adanya kesiapan pihak pemerintah daerah dan masyarakat setempat tentang penanganan kawasan tersebut.
 - Strategi penanganan yang akan dilaksanakan di lokasi ini merupakan upaya melanjutkan kegiatan penanganan kumuh yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
2. Untuk penataan di lokasi lain perlu mengidentifikasi siapa-siapa yang dapat dijadikan *stakeholder* bagi pengembangan kawasan secara kontekstual.
 3. Perlunya menggerakkan/mensinergikan *stakeholder* pada kawasan penataan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aca Sugandhy. 1999. *"Penataan Ruang dalam Pengelolaan Lingkungan hidup"*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- A Ramlan Surbakti, 1984. "Kemiskinan di Kota dan Program Perbaikan Kampung". Prisma LP3ES Jakarta.
- Bambang Panuju, 1999. *"Pengadaan Perumahan Kota Dengan Partisipasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah"*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Chapin, F.S et al. 1995. *"Urban Land Use Planning. Fourth Edition"*. Illinois, University of Illinois press.
- Choguill, Marissa B. Guaraldo, 1996. *"A ladder of Community Participation for Underdevelop Countries"*. Elsevier Science Ltd. England.
- Daldjoeni, N. 1996. *"Geografi Baru: Organisasi Keruangan dalam Teori dan Praktek"*. Bandung, Alumni Bandung.
- Dinas Kimtaru Jateng, 2001. *"Pendampingan Masyarakat Pelaksana Tridaya"*. DPU
- Eko Budihardjo, 1997. *"Lingkungan binaan dan Tata Ruang Kota"*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Eko Budihardjo dan Eddy Darmawan. 1992. *"Pemantauan Pola Perkembangan Kota"*. Jakarta, Direktorat Pembinaan Pembangunan Kota.
- Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto, 1999. *"Kota Berkelanjutan"*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Fink, Arlene, 1995. *"How To Sample in Survey"* SAGE Publication, New Delhi.
- _____, 1995. *"How To Analyze in Survey"* SAGE Publication, New Delhi.
- Gilbert, Allan dan Joseph Gugler. 1996. *"Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga"*. Yogyakarta, PT.Tiara Wacana Yogyakarta.
- G , Shabir, Cheema, 1987. *"Urban Shelter and Services"*. Public Policies and Management Approaches.
- Herlianto, 1997. *"Urbanisasi Pembangunan dan Kerusakan Kota"*. Alumni Bandung.
- Jellinek, Lea, 1994. *"The Whell Of Fortune; The History Of a Poor Community in Jakarta"*. (terj. Eddy Zainuri) LP3ES Jakarta.

- Kamus Tata Ruang, 1997. Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.
- Komarrudin, 1997. *"Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman"*. Yayasan REI Jakarta.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES Jakarta
- M. Agung Ridlo, 2001. *Kemiskinan di Perkotaan*". Unissula Press Semarang.
- Nas, Peter. JM, 1986. *"The Indonesian City"*. Foris Publications Dardeeh. Netherland.
- Oscar Lewis, 1986 dalam Supardi Suparlan. *"Kebudayaan Kemiskinan"*. YOI Jakarta.
- Shubert, Clarence, 1989. *"Building Partnership for Urban Poverty Allevation"*. Urban Management Programme APDC.
- Siswono Yudohusodo, et, al, 1991. *"Rumah Untuk Seluruh Rakyat"*. Jakarta
- Sujarto, Djoko, 1977. *"Wisma Karya Marga Suka dan Penyempurna"*. Bandung , Penerbit Teknik Planologi ITB.
- Supardi Suparlan. 1995. *"Kemiskinan di Perkotaan"*. YOI, Jakarta
- Turner, FC. & John, 1976. *"Housing By People"*. Marion Boyars Publisher Ltd. London.
- United Nation Center for Human Settlement (Habitat) Nairobi and International Labour Office Geneva, 1977. *"Shelter Provision and Employment Generation"*. ILO Geneva.
- YM. Yeung and MC. Gee, TG, 1986. *"Community Partisipation in Delivering Urban Services in Asia"*. International Development Research Center, Ottawa.
- Yunus, H.S. 2000. *"Struktur Tata Ruang Kota"*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

B. Skripsi/Thesis

- Basuki Hanafi, 1999. *"Studi Kesesuaian Fungsi Lahan Pada Kawasan Peremajaan Permukiman Bandarharjo Semarang"*. Tugas Akhir Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik, UNDIP Semarang.
- Gunawan Wibisana,. 1989. *"Partisipasi Masyarakat dalam Proses Peremajaan Pasa"*. Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota. ITB Bandung.
- Inung Purwanti Saptari, 2000. *"Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok (P2BPK) Dalam Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Permukiman Masyarakat Ekonomi Lemah di Lahan Marginal Perkotaan"*. Program Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan, UGM

- Suwanda, 2000, *"Pengaruh Permukiman Kumuh terhadap Keberlanjutan Komunitas (Studi Kasus: Kawasan Permukiman Kumuh Bandarharjo Semarang)*, Magister Teknik Pembangunan Kota, UNDIP, Semarang
- Widyaksono, Amru, 2002, *"Studi Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Penataan Permukiman Nelayan Kawasan Kumuh Nelayan"*, Tugas Akhir Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan kota, Unissula, Semarang
- Yulianti, Cristiana, 2000, *"Studi Partisipasi Masyarakat Permukiman Nelayan di Tambak Lorok Semarang"* Tugas Akhir Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, UNDIP, Semarang

C. Peraturan

- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990, Tentang Peremajaan Permukiman Kumuh yang berada Di atas Tanah Negara, Sekretaris Negara, 1990.
- Undang-undang No. 10 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman
- Undang-undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
- Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002, *"Petunjuk Operasional Penilaian Tingkat Kekumuhan"*